

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Lampung

Mei 2024



LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

Mei 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Lampung

Tim Penyusun

Laporan Perekonomian Provinsi Lampung

Mei 2024

Penanggung Jawab
Junanto Herdiawan

Koordinator Penyusun
Irfan Farulian

Editor
Fiskara Indawan

Tim Penulis
Dimas Raditya Dwi Putra
Teuku Muhammad Rafi Ihsan
Mutiara Dewi Lestari
Khaira Alfatih
Sherline Vicky Aisyiyah
Tania
Gia Amadea

Kontributor
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi
Tim Implementasi KEKDA Provinsi
Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi
Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Jl.Hasanuddin No.38
Bandar Lampung – Lampung, 35225
Tel. (0721) 486-355
Fax. (0721) 481-131

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Periode Mei 2024” akhirnya dapat diselesaikan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia secara periodik melakukan asesmen terhadap perkembangan ekonomi di daerah, sumber-sumber tekanan inflasi, risiko dan prospeknya serta rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah.

Seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak 1999, asesmen ekonomi regional semakin berperan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional dan upaya untuk menstabilkan harga. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi daerah semakin kuat di era pemerintahan saat ini yang menghendaki aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat pada daerah tertentu, melainkan tersebar di berbagai daerah, sehingga disparitas ekonomi antar daerah berkurang. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung melakukan kajian serta memberikan asesmen terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan regional Lampung secara menyeluruh dan dituangkan dalam publikasi “Laporan Perekonomian Provinsi Lampung”. Analisis dalam buku ini mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan inflasi, perbankan dan sistem pembayaran,

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, PLN Wilayah Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Ditjen Bea Cukai, Bapenda Provinsi Lampung, dan semua penyedia data yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa hasil kajian ekonomi yang disajikan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran serta masukan dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kami juga mengharapkan kiranya kerjasama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Mei 2024
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung



Junanto Herdiawan
Direktur

Daftar Isi

Tim Penyusun	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Grafik	VII
Ringkasan Eksekutif	X
Tabel Indikator	XVIII

Bab II	
Keuangan Daerah	24
2.1 APBD Provinsi Lampung	25
2.1.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung	26
2.1.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung	26
2.1.3 Anggaran Belanja Provinsi Lampung	27
2.1.4 Realisasi Belanja Provinsi Lampung	28
2.2 Belanja APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	29
2.3 Penerimaan dan Belanja Negara di Provinsi Lampung	29
2.3.1 Penerimaan	29
2.3.2 Belanja	29

Bab I	
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah	2
1.1 Analisis PDRB Sisi Pengeluaran	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	5
1.1.3 Investasi	5
1.1.4 Ekspor dan Impor	6
1.2 Analisis PDRB Sisi Lapangan Usaha	10
1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10
1.2.2 LU Industri Pengolahan	12
1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran	13
1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya	14
BOKS 1	
<i>Fostering Tourism for Development:</i>	
Tantangan dan Mengoptimalkan Peluang Pengembangan Pariwisata untuk Tumbuh Lebih Kuat	17
BOKS 2	
Menggal Potensi Investasi untuk Mewujudkan I-PRO	21

Bab III	
Perkembangan Inflasi	32
3.1 Inflasi Umum Gabungan Dua Kota di Provinsi Lampung	33
3.1.1 Inflasi Bulanan	33
3.1.2 Inflasi Tahunan	35
3.1.3 Ekspektasi Inflasi	38
3.1.4 Pengendalian Inflasi	38
3.2 Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	39
3.2.1 Inflasi Kota Bandar Lampung	39
3.2.2 Inflasi Kota Metro	40
3.2.3 Inflasi Kabupaten Mesuji	41
3.2.4 Inflasi Kabupaten Lampung Timur	41
3.3 Inflasi Sumatera	42
3.4 Arah Perkembangan Inflasi Triwulan II 2024	42
BOKS 3	
Kartu Petani Berjaya (KPB), Pengungkit Sektor Pertanian Lampung	45

Bab IV		
Stabilitas Keuangan Daerah		48
4.1	Asesmen Sektor Rumah Tangga	49
4.1.1	Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	49
4.1.2	Kinerja Keuangan Rumah Tangga	50
4.1.3	Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan	50
4.1.4	Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga	50
4.2	Asesmen Sektor Korporasi	51
4.2.1	Kinerja Korporasi	51
4.2.2	Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi	52
4.3	Asesmen Institusi Keuangan	52
4.3.1	Bank Umum	52
4.3.2	Bank Syariah	54
4.4	Perkembangan Kredit UMKM	55
4.5	Peningkatan Akses Keuangan UMKM	55

Bab VI		
Ketenagakerjaan & Kesejahteraan		70
6.1	Ketenagakerjaan	71
6.2	Nilai Tukar Petani	74
6.3	Kemiskinan	75

Bab V		
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah		58
5.1	Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran Tunai	59
5.1.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal	59
5.1.2	Penyediaan Uang Layak Edar	59
5.1.3	Perkembangan Temuan Uang Palsu	60
5.2	Perkembangan Sistem Pembayaran Bank Indonesia	61
5.3	Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik	61
5.3.1	Perkembangan Transaksi APMK	62
5.3.2	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	63
5.4	Perkembangan Merchant & Pengguna QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>)	63
5.5	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	64

BOKS 4		
Dorong Perluasan QRIS, Bank Indonesia Provinsi Lampung Gandeng PJP Dan <i>Influencer</i> Pada Event Kuliner		67

Bab VII		
Prospek Perekonomian		82
7.1	Pertumbuhan Ekonomi	83
7.2	Inflasi	86
7.3	Rekomendasi	86

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)	11
Tabel 2.1	Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	25
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	26
Tabel 2.3	Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	27
Tabel 2.4	Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)	28
Tabel 2.5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara	30
Tabel 2.6	Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung	30
Tabel 3.1	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Januari 2024	34
Tabel 3.2	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Februari 2024	34
Tabel 3.3	Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Maret 2024	35
Tabel 3.4	Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)	35
Tabel 3.5	Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)	35
Tabel 3.6	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)	36
Tabel 3.7	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)	37
Tabel 3.8	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)	37
Tabel 3.9	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (% yoy)	37
Tabel 3.10	Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)	37
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung	52
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung	54
Tabel 4.3	Akses Klaster Binaan Bank Indonesia	55
Tabel 4.4	Sebaran Debitur KUR berdasarkan Kabupaten/ Kota Tw 1 2024	56
Tabel 6.1	Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung	71
Tabel 6.2	Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung	73
Tabel 6.3	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2023	76
Tabel 6.4	Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2024	78
Tabel 6.5	Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2024	78
Tabel 7.1	Proyeksi Perekonomian Global 2024	83
Tabel 7.2	Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung	85

Daftar Grafik

Grafik 1.1	PDRB Provinsi Lampung	3	Grafik 1.28	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal	10
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung	3	Grafik 1.29	Pangsa PDRB Lapangan Usaha	10
Grafik 1.3	Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung	4	Grafik 1.30	Produksi Padi	11
Grafik 1.4	Nilai Tukar Petani	4	Grafik 1.31	Luas Panen Tanaman Pangan	11
Grafik 1.5	Indeks Keyakinan Konsumen	4	Grafik 1.32	Volume Impor Pupuk	12
Grafik 1.6	Kredit Konsumsi	5	Grafik 1.33	Perkembangan Iklim	12
Grafik 1.7	<i>Summary Kegiatan Liaison</i>	5	Grafik 1.34	Nilai Tukar Petani Subsektor	12
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing	5	Grafik 1.35	Rata-Rata Harga Gabah	12
Grafik 1.9	Perkembangan Pengadaan Semen	6	Grafik 1.36	Ekspor Luar Negeri Komoditas Industri	12
Grafik 1.10	Perkembangan Kredit Konstruksi	6	Grafik 1.37	CLI Mitra Dagang Utama Provinsi Lampung	13
Grafik 1.11	SKDU Investasi	6	Grafik 1.38	<i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	13
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Non Migas Luar Negeri	6	Grafik 1.39	Penanaman Modal Sektor Sekunder	13
Grafik 1.13	Volume Pengangkutan Batu Bara dari Sumatera Selatan	7	Grafik 1.40	Perkembangan Kredit Industri Pengolahan	13
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	7	Grafik 1.41	<i>Prompt Manufacturing Index</i>	14
Grafik 1.15	Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Internasional	7	Grafik 1.42	Penjualan Kendaraan Bermotor	14
Grafik 1.16	Perkembangan Ekspor Bahan Bakar Mineral	7	Grafik 1.43	Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit LU Perdagangan	14
Grafik 1.17	Perkembangan Harga Batu Bara Internasional	7	Grafik 1.44	Omset Penjualan Eceran	14
Grafik 1.18	Perkembangan Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah	8	Grafik 1.45	Kunjungan Wisatawan	14
Grafik 1.19	Perkembangan Harga Kopi Robusta Internasional	8	Grafik 1.46	Proyek Konstruksi yang Tercatat di BCI Asia	15
Grafik 1.20	Perkembangan Ekspor Ampas/Sisa Industri Makanan	8	Grafik 1.47	Kegiatan Dunia Usaha Sektor Konstruksi	15
Grafik 1.21	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	8	Grafik 1.48	Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian	15
Grafik 1.22	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan	8	Grafik 1.49	Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian	15
Grafik 1.23	Perkembangan Impor Luar Negeri	9	Grafik 1.50	Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung	15
Grafik 1.24	Perkembangan Bahan Baku Penolong	9	Grafik 1.51	Realisasi Angkutan Batubara KAI Sumatera Selatan - Lampung	15
Grafik 1.25	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	9	Grafik 1.52	Kredit Sektor Transportasi, Pegudangan dan Komunikasi	16
Grafik 1.26	Perkembangan Impor Barang Modal	9	Grafik 1.53	Kegiatan Dunia Usaha Sektor Transportasi dan Pegudangan	16
Grafik 1.27	Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas	10	Grafik 1.54	Kegiatan Dunia Usaha Sektor Informasi dan Komunikasi	16
			Grafik 2.1	Perkembangan APBD Provinsi Lampung	25
			Grafik 2.2	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung	26

Daftar Grafik

Grafik 2.3	Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung	27
Grafik 2.4	Perbandingan Pangsa Komponen Anggaran Belanja Provinsi Lampung	28
Grafik 2.5	Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Lampung	28
Grafik 2.6	Pangsa Anggaran Belanja Kab/Kota	29
Grafik 2.7	Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan I 2024	29
Grafik 3.1	Inflasi Lampung dan Nasional	33
Grafik 3.2	Sumbangan Inflasi Bulanan Januari, Februari, Maret 2024	33
Grafik 3.3	Sumbangan Inflasi Bulanan Januari 2024	34
Grafik 3.4	Sumbangan Inflasi Bulanan Februari 2024	34
Grafik 3.5	Sumbangan Inflasi Bulanan Maret 2024	35
Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional	35
Grafik 3.7	Perkembangan Harga Beras	36
Grafik 3.8	Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan	36
Grafik 3.9	Perkembangan Harga Daging dan Telur	36
Grafik 3.10	Perkembangan Harga Sayur Sayuran	36
Grafik 3.11	Perkembangan Harga Rokok	36
Grafik 3.12	Perkembangan Harga Bensin	38
Grafik 3.13	Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan ke Depan	38
Grafik 3.14	Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung	40
Grafik 3.15	Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung	40
Grafik 3.16	Inflasi Bulanan Kota Metro	40
Grafik 3.17	Inflasi Tahunan Kota Metro	40
Grafik 3.18	Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji	41
Grafik 3.19	Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji	41
Grafik 3.20	Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur	41
Grafik 3.21	Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur	41
Grafik 3.22	Inflasi Sumatera	42
Grafik 3.23	Realisasi Inflasi vs Nilai Historis Inflasi 3 Tahun Terakhir	43
Grafik 3.24	Realisasi Inflasi Maret 2024	43
Grafik 4.1	Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga	49
Grafik 4.2	Indeks Keyakinan Konsumen	49
Grafik 4.3	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	49
Grafik 4.4	Kredit Perseorangan Lampung	49
Grafik 4.5	Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang	49
Grafik 4.6	Pertumbuhan DPK Perbankan	50
Grafik 4.7	Komposisi DPK Perbankan	50
Grafik 4.8	Pertumbuhan DPK Perseorangan	50
Grafik 4.9	Pertumbuhan Kredit Perseorangan	50
Grafik 4.10	Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan	51
Grafik 4.11	Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan	51
Grafik 4.12	Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial	51
Grafik 4.13	Perkembangan Ekspor	51
Grafik 4.14	Pertumbuhan Kredit Korporasi	51
Grafik 4.15	Komposisi Penyaluran Kredit Korporasi	52
Grafik 4.16	Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum	52
Grafik 4.17	Perkembangan NPL Kredit Korporasi	52
Grafik 4.18	Pertumbuhan Kredit Bank Umum	53
Grafik 4.19	Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan	53
Grafik 4.20	Pangsa Sektor Ekonomi Utama Lampung	53
Grafik 4.21	Pertumbuhan NPL dan LaR Lampung	53
Grafik 4.22	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum	53
Grafik 4.23	Pertumbuhan Aset, DPK & Pembiayaan Bank Syariah	54
Grafik 4.24	Pertumbuhan DPK Bank Syariah	54
Grafik 4.25	Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan	54
Grafik 4.26	Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektoral	55
Grafik 4.27	Perkembangan Kredit UMKM	55
Grafik 4.28	NPL Kredit UMKM	55
Grafik 4.29	Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota	56
Grafik 4.30	Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi	56
Grafik 4.31	Penyaluran KUR berdasarkan Skema	56
Grafik 5.1	Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan	59
Grafik 5.2	Aliran Uang Kartal <i>Inflow</i>	59

Daftar Grafik

Grafik 5.3	Aliran Uang Kartal <i>Outflow</i>	59
Grafik 5.4	Penukaran Uang Melalui BI	59
Grafik 5.5	Kas Keliling	60
Grafik 5.6	Kas Titipan	60
Grafik 5.7	Perkembangan Pemusnahan UTLE	60
Grafik 5.8	Temuan Uang Palsu	60
Grafik 5.9	Pecahan Uang Palsu Tw IV 2023	60
Grafik 5.10	Perkembangan Transaksi Kliring	61
Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi RTGS	61
Grafik 5.12	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D	62
Grafik 5.13	Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama	62
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	62
Grafik 5.15	Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)	62
Grafik 5.16	Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)	62
Grafik 5.17	Perkembangan Dana <i>Float</i> UE	63
Grafik 5.18	Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi	63
Grafik 5.19	Pangsa Transaksi UE Triwulan I 2024	63
Grafik 5.20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi	63
Grafik 5.21	Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	63
Grafik 5.22	Pertumbuhan <i>Merchant</i> QRIS Triwulanan	64
Grafik 5.23	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS di Sumatera	64
Grafik 5.24	Perkembangan Pengguna QRIS	64
Grafik 5.25	Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung	65
Grafik 5.26	Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang	65
Grafik 5.27	Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR	65
Grafik 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera	72
Grafik 6.2	Perkembangan Upah Minimum Lampung	72
Grafik 6.3	Porsi Penduduk Bekerja	72
Grafik 6.4	TPAK Menurut Tingkat Pendidikan	72
Grafik 6.5	Share Tenaga Kerja	73
Grafik 6.6	Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor	73

Grafik 6.7	NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya	74
Grafik 6.8	NTP Per Sub Sektor	74
Grafik 6.9	Indeks yang Dibayar per Sub Sektor	74
Grafik 6.10	Indeks yang Diterima per Sub Sektor	75
Grafik 6.11	NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera	75
Grafik 6.12	Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor	75
Grafik 6.13	Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional	75
Grafik 6.14	Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Lampung	76
Grafik 6.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	76
Grafik 6.16	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	76
Grafik 6.17	Koefisien Gini Lampung dan Nasional	76
Grafik 7.1	Ekspektasi Pelaku Usaha atas Kegiatan Usaha ke Depan	83
Grafik 7.2	UMP Provinsi Lampung	83
Grafik 7.3	Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung	84
Grafik 7.4	Kuota Biodiesel	84
Grafik 7.5	Konsumsi Batu Bara Global	84

Ringkasan Eksekutif

Kinerja perekonomian Provinsi
Lampung pada triwulan I 2024
tumbuh 3,30% (yoy), melambat
dibandingkan 5,40% (yoy) pada
triwulan sebelumnya

Ekonomi Makro Regional

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik dan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67% (yoy) pada triwulan laporan, terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Dari sisi eksternal, peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor pada triwulan I 2024 menahan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Kinerja net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 85,63% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh impor provinsi Lampung yang tumbuh 8,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 4,80% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan impor antar daerah untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Adapun kinerja ekspor tercatat tumbuh 6,10% (yoy), meningkat dibandingkan 4,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya didukung oleh peningkatan perbaikan kinerja ekspor luar negeri.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 terutama disebabkan oleh penurunan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi 10,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,40% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan produksi padi sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino. Di sisi lain, pertumbuhan positif perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 ditopang oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tumbuh 6,51% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 2,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatkan kinerja industri makanan dan minuman serta industri percetakan sejalan dengan periode HBKN dan penyelenggaraan pemilu. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 8,58% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 8,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya meningkatnya laju suplai barang/jasa domestik.

Keuangan Pemerintah

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan APBD untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp8,34 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,33 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp8,09 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,28 triliun untuk anggaran belanja.

Secara umum, realisasi pendapatan
dan belanja Pemerintah Provinsi
Lampung pada triwulan II 2024
mengalami pertumbuhan.

Ringkasan Eksekutif

Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan momentum perekonomian yang terus meningkat serta intensitas program pengendalian inflasi di daerah. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2023, anggaran pendapatan tercatat meningkat 3,07% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,64% (yoy).

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp22,47 triliun atau menurun sebesar -6,66% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan I 2023 yang sebesar Rp24,08 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 12,40% (Rp2,79 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 11,97%; dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,66%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (4,07%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (3,36%), dan Lampung Timur (2,25%).

Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 mencapai Rp1,76 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -14,62% (yoy) dari Rp2,06 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk periode triwulan I 2024 Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp7,63 triliun, terpantau meningkat sebesar 7,30% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7,11 triliun.

Inflasi

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan *stakeholder* utama lainnya melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan di triwulan I 2024. Inflasi tahunan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih berada pada target inflasi $2,5\% \pm 1,0\%$. Inflasi tercatat sebesar 3,45% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,47% (yoy). Inflasi yang berada pada kisaran target inflasi nasional menunjukkan eratnya sinergi nyata antara kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, perubahan cuaca serta pergeseran musim tanam. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh gejolak harga pangan akibat mundurnya masa tanam. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,64% dan nilai inflasi 8,23% (yoy).

Inflasi bulanan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2023 yang mencatat inflasi sebesar 0,01% (mtm). Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan I 2024 dibandingkan periode sebelumnya khususnya disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,45% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,47% (yoy)

Ringkasan Eksekutif

Dalam menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2024, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersaa dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga. dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

Kinerja rumah tangga pada triwulan I 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (65,64% PDRB), tumbuh 4,67% (yoy) pada triwulan I 2024, relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 7,15% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,61% (yoy) pada triwulan IV 2023. Namun demikian, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi menurun terindikasi dari penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan I 2024, rata-rata IKE sebesar 117 lebih rendah jika dibandingkan dengan 119,67 pada triwulan sebelumnya.

Kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2024 juga tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Tetap kuatnya kinerja korporasi Lampung terutama ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) konstruksi yang meningkat di tengah tetap positifnya pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan Industri Pengolahan. Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan I 2024 berkontraksi sebesar 12,0% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar 20,7% (yoy).

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat meskipun tumbuh melambat. Perlambatan aset bank umum di Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar negatif 0,60% (yoy), menurun jika

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2024 tetap kuat sejalan dengan masuknya HBKN Imlek dan Ramadan. Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum dan Bank Syariah (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat meski melambat

Ringkasan Eksekutif

dibandingkan dengan triwulan IV 2023 (4,89%, yoy). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode laporan tercatat sebesar 0,43% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 2,03% (yoy) pada triwulan IV 2023.

Kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2024 terindikasi tumbuh melambat. Sejalan dengan pertumbuhan aset Bank Umum, aset bank syariah pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 16,22% (yoy), penurunan jika dibandingkan dengan 16,76% (yoy) pada triwulan IV 2024

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan uang kartal di Lampung pada triwulan I 2024 sesuai dengan pola musimannya. Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp1,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp0,16 triliun. Kondisi net inflow yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan tingginya uang yang masuk ke Bank Indonesia pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru

Transaksi pembayaran nilai besar menunjukkan adanya indikator membaiknya perekonomian Lampung. Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 14,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 27,23% (yoy). Berdasarkan jenisnya, fenomena melambatnya penurunan transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring kredit serta kliring debit yang tercatat terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sampai dengan Maret 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 527.051 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan I 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,55%, 16,25%, dan 13,24% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,46% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsaanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,46%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp1,21 triliun. Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tumbuh negatif

Ringkasan Eksekutif

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%

Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Lampung diperkirakan berada pada kisaran 4,6%-5,1%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 2023 yang tumbuh sebesar 4,55%

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja, meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,56% poin dari 72,07% pada Februari 2023 menjadi 71,51% per Februari 2024, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,47% poin dibandingkan Agustus 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 sebesar 3,30% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,06% poin menjadi 4,12% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2024 mencapai 22,18%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 46,19% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17,92%.

Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 120,58; meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 115,66.

Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023

Prospek Ekonomi

Prospek terjaganya permintaan domestik diperkirakan menjadi penopang utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 untuk tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggaran belanja APBD se Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Ringkasan Eksekutif

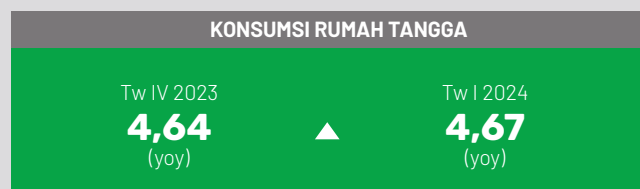
Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan terjaga terjaga pada kisaran $2,5\pm 1\%$. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Inflasi gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan terjaga dalam kisaran target $2,5\pm 1\%$

Infografik Perekonomian

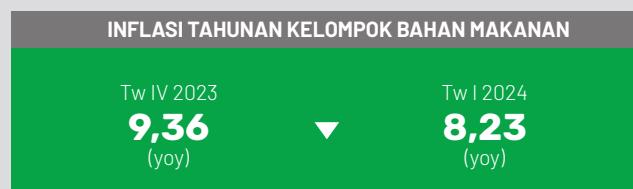
PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Lampung berkontraksi menjadi 3,30% (yoy) pada triwulan I 2024, menurun jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang tumbuh 5,40% (yoy). Penurunan tersebut masih dapat ditopang oleh kinerja komponen Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh positif sebesar 4,67%

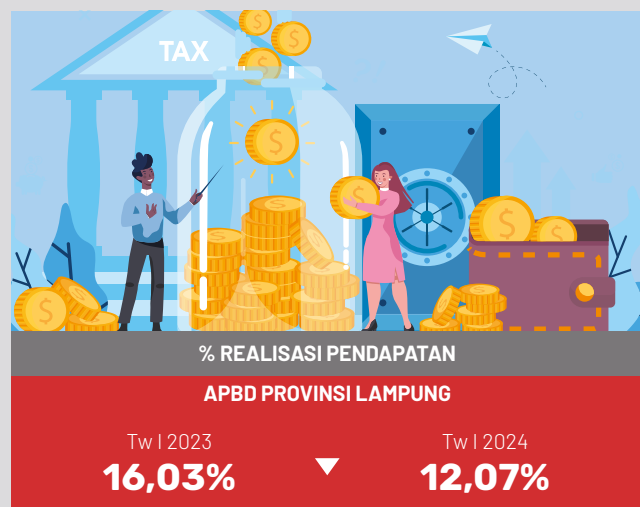


PERKEMBANGAN INFLASI

Adapun inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat berada dalam target sasaran inflasi yaitu sebesar 3,45% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,47% (yoy).



KEUANGAN PEMERINTAH



Infografik Perekonomian

STABILITAS KEUANGAN DAERAH



Berdasarkan Lokasi Bank (% ,yoy)

Pertumbuhan Kredit	Tw IV 2023 0,11 %(yoy)	Tw I 2024 3,39 %(yoy)	Pertumbuhan DPK	Tw I 2023 1,73 %(yoy)	Tw I 2024 1,73 %(yoy)
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw IV 2023 7,94 %(yoy)	Tw I 2024 8,77 %(yoy)	Pertumbuhan Aset (Aset Bersih)	Tw I 2023 4,89 %(yoy)	Tw I 2024 7,71 %(yoy)
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw IV 2023 -33,11 %(yoy)	Tw I 2024 -22,40 %(yoy)	NPL (Gross)	Tw I 2023 2,42 %	Tw I 2024 2,52 %
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw IV 2023 5,87 %(yoy)	Tw I 2024 7,81 %(yoy)	LDR	Tw I 2023 119,56 %	Tw I 2024 119,96 %

Berdasarkan Lokasi Proyek

Pertumbuhan Kredit	Tw IV 2023 -4,37 %(yoy)	Tw I 2024 -0,58 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja	Tw IV 2023 -0,18 %(yoy)	Tw I 2024 3,32 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Investasi	Tw IV 2023 -23,91 %(yoy)	Tw I 2024 -18,80 %(yoy)			
Pertumbuhan Kredit Konsumsi	Tw IV 2023 6,90 %(yoy)	Tw I 2024 9,43 %(yoy)			

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

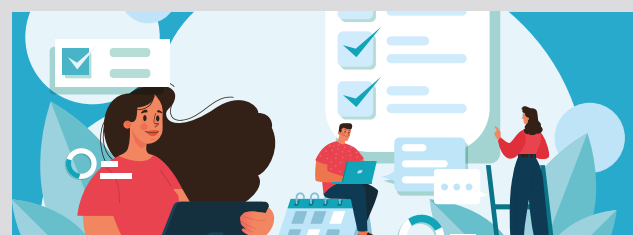


	TUNAI	Inflow	Outflow	Nett Flow
Tw IV 2023		3,36	3,20	0,16
Tw I 2024		4,48 ▼	3,27 ▲	1,21 ▼

Satuan dalam Triliun Rupiah

	NON TUNAI	Nominal Kliring (Debet + Kredit)	Volume Kliring (Debet + Kredit)	Nominal RTGS	Volume RTGS
Tw IV 2023		4,51 Rp Triliun	88,23 Ribu Lembar	35,28 Rp Triliun	14,44 Ribu Lembar
Tw I 2024		4,35 ▼ Rp Triliun	87,60 ▼ Ribu Lembar	35,58 ▲ Rp Triliun	12,14 ▼ Ribu Lembar

KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA		
4,18% Februari 2023	4,23% Agustus 2023	4,12% Februari 2024
ANGKATAN KERJA (Juta Orang)		
5,00 Februari 2023	4,90 Agustus 2023	5,04 Februari 2024
KEMISKINAN		
11,57% Maret 2022	11,44% September 2022	11,11% Maret 2023

Tabel

Indikator

INFLASI DAN PDRB

INDIKATOR	2021				2021	2022				2022	2023				2023	2024
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I
Indeks Harga Konsumen (IHK)																
Bandar Lampung	107,14	107,26	106,92	108,63		109,61	112,50	114,48	114,63		115,84	116,26	117,08	118,66		106,00
Metro	106,83	107,43	107,29	109,22		110,54	113,82	114,54	115,09		115,90	116,55	117,14	118,60		105,78
Mesuji																110,33
Lampung Timur																109,98
Gabungan	107,11	107,28	106,96	108,69		109,71	112,64	114,49	114,68		115,85	116,29	117,0877834	118,6545864		107,35
Laju Inflasi (yoy)																
Bandar Lampung	1,80	2,34	1,52	2,13		2,30	4,88	7,07	5,53		5,68	3,34	2,27	3,52		2,72
Metro	1,40	2,30	1,89	2,73		3,47	5,94	6,76	5,37		4,85	2,40	2,27	3,05		3,21
Mesuji																4,52
Lampung Timur																4,83
Gabungan	1,75	2,34	1,56	2,19		2,43	5,00	7,04	5,51		5,59	3,24	2,27	3,47		3,45
Pertumbuhan PDRB (yoy)	(1,99)	5,12	2,96	5,10	2,77	2,86	5,23	3,94	5,05	4,28	4,94	4,00	3,93	5,40	4,55	3,30
"PDRB - Harga Konstan (Miliar Rp)"	59.152,93	63.098,15	64.398,37	60.317,04	246.966,49	60.844,03	66.396,08	66.933,61	63.360,46	257.534,19	63.852,42	69.053,97	69.580,88	66.782,52	269.240,54	65.952,47
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	16.631,74	18.557,69	18.480,34	14.326,59	67.996,36	16.569,68	19.176,38	18.413,94	15.208,96	69.368,96	16.438,36	19.454,83	18.650,02	15.147,84	69.679,69	14.625,53
Pertambangan & Penggalian	3.220,30	3.251,41	3.152,25	3.193,01	12.816,98	3.063,76	3.102,67	3.048,97	3.103,85	12.319,25	3.014,09	3.047,73	3.260,45	3.360,99	12.675,36	3.375,80
Industri Pengolahan	10.987,31	11.125,76	12.156,81	12.081,11	46.351,00	10.940,21	11.943,39	12.350,24	11.333,01	46.566,85	11.302,32	11.882,45	12.412,39	11.673,45	47.257,61	12.031,62
Pengadaan Listrik, Gas	96,15	94,87	105,03	106,57	402,62	102,98	106,12	109,01	109,57	427,68	106,33	112,06	112,31	101,92	433,62	89,10
Pengadaan Air	64,80	67,09	69,90	71,09	272,88	71,16	69,70	71,22	70,94	283,02	71,07	71,14	71,81	70,45	284,47	68,75
Konstruksi	6.215,46	6.188,08	6.360,62	6.554,63	25.318,79	6.528,78	6.493,34	6.538,72	6.732,22	26.293,06	6.590,09	6.647,42	7.137,45	7.743,96	28.140,92	7.041,32
Perdagangan Besar & Eceran dan Reparasi Mobil & Sepeda	7.125,24	7.781,44	7.855,28	7.850,05	30.612,01	8.075,68	8.883,64	9.125,46	9.224,68	35.309,47	9.229,93	9.769,18	9.778,04	9.977,08	38.754,23	10.021,92
Transportasi & Pergudangan	2.813,74	3.176,67	3.162,39	3.296,56	12.449,35	3.292,99	3.628,03	3.873,11	4.187,39	14.981,52	4.142,70	4.328,84	4.394,25	4.649,41	17.500,20	4.617,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821,38	863,73	846,75	894,28	3.426,13	892,35	937,44	1.001,45	1.027,06	3.858,29	1.020,58	1.106,41	1.119,97	1.127,53	4.374,49	1.093,61
Informasi & Komunikasi	3.293,66	3.593,31	3.644,73	3.284,47	13.816,17	3.209,79	3.502,85	3.556,80	3.593,08	13.862,52	3.593,33	3.770,48	3.740,55	3.819,97	14.924,33	3.928,96
Jasa Keuangan	1.282,23	1.302,23	1.309,42	1.313,49	5.207,37	1.305,27	1.269,90	1.277,15	1.168,83	5.021,15	1.239,99	1.270,57	1.347,02	1.323,79	5.181,36	1.335,16
Real Estate	1.799,59	1.808,26	1.874,80	1.943,86	7.426,51	1.840,43	1.879,26	1.945,04	2.015,45	7.680,18	1.831,04	1.914,91	1.965,92	2.033,99	7.745,86	2.011,21
Jasa Perusahaan	79,09	83,59	82,52	88,04	333,25	90,96	95,99	100,24	104,32	391,52	99,44	100,69	105,51	108,56	414,20	109,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1.742,22	2.137,12	2.108,33	2.139,71	8.127,36	1.722,68	2.034,32	2.130,89	2.137,06	8.024,95	1.869,08	2.123,65	1.939,18	2.087,31	8.034,21	2.135,11
Jasa Pendidikan	1.786,41	1.864,23	1.942,34	1.893,91	7.486,89	1.848,05	1.938,93	1.973,11	1.917,46	7.677,55	1.906,41	1.969,36	1.989,31	1.983,94	7.849,02	1.977,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	646,48	669,15	731,79	720,86	2.768,28	706,29	659,47	704,70	694,98	2.765,44	685,51	703,82	728,79	754,41	2.872,53	712,62
Jasa Lainnya	547,14	533,52	515,06	558,81	2.154,52	582,95	674,65	713,58	731,59	2.702,77	712,15	780,44	807,92	817,93	3.118,44	776,63
Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD)	975,23	1.021,92	1.429,21	1.444,80	4.841,16	1.249,59	1.198,49	1.656,93	1.500,09	5.605,11	1.188,42	996,62	1.221,80	1.150,21	4.557,05	375,43
Volume Ekspor (Ribuan Ton)	2.272,85	2.874,27	4.110,07	3.836,05	13.093,24	2.509,16	2.817,26	4.147,32	4.076,16	13.549,89	4.011,47	3.688,00	4.412,29	4.146,49	16.258,25	3.781,27
Nilai Impor (Juta USD)	382,70	444,83	344,30	223,49	1.395,31	311,31	355,20	356,03	306,62	1.376,90	327,06	304,97	259,84	447,31	1.339,18	137,05
Volume Impor (Ribuan Ton)	766,90	641,07	401,55	341,98	2.151,50	493,88	495,72	494,94	355,98	1.903,34	501,00	461,56	365,81	722,72	2.051,10	242,98

Tabel Indikator

SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Inflow (Triliun Rp)	4,74	4,57	1,91	3,51	3,40	4,76	3,57	3,38	4,77	4,47	4,26	3,36	4,48
Outflow (Triliun Rp)	1,81	4,89	1,49	3,89	1,46	4,37	2,54	3,28	2,27	5,34	2,11	3,2	3,27
Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	23,64	31,15	25,23	27,37	18,15	27,34	25,50	30,08	30,88	30,40	42,50	35,28	35,58
Volume Transaksi RTGS (Lembar)	17.250	21.471	21.501	19.545	32.551	19.769	18.951	12.868	14.309,00	15.543,00	16.124,00	14.440	12.138,00
Rata-Rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Triliun Rp)	387,541	510,721	413,557	421,108	297,541	448,197	418,098	493,11	506,28	498,36	696,72	578,36	583,28
Rata-Rata Harian Volume Transaksi RTGS (Lembar)	283	352	352	301	534	324	311	211	234,57	254,80	264,33	236,72	198,98
Volume Kliring Kredit (Lembar)	76.428	83.062	77.742	83.506	64.283	61.724	59.496	60.380	45.386,00	41.030,00	44.634,00	50.868,00	45.386,00
Nominal Kliring Kredit (Triliun Rp)	4,26	4,70	4,69	5,04	4,03	3,96	3,68	3,41	2,69	2,34	2,72	2,63	2,62
Rata-Rata Harian Volume Kliring Kredit (Lembar)	1.253	1.362	1.274	1.285	1.054	1.012	975	990	744,03	672,62	731,70	833,90	744,03
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Kredit (Miliar Rp)	69,84	76,99	76,81	77,56	66,06	64,92	60,33	55,95	44,16	38,36	44,59	43,11	42,95
Volume Kliring Debet (Lembar)	64.174	58.953	56.819	56.684	51.895	47.243	48.042	44.591	42.807,00	36.027,00	39.602,00	37.360,00	42.213,00
Nominal Kliring Debet (Triliun Rp)	2,88	2,77	2,79	2,70	2,56	2,63	2,43	2,23	2,39	1,95	2,08	1,89	1,73
Rata-Rata Harian Volume Kliring Debet (Lembar)	1.052	934	931	872	851	774	788	731	701,75	590,61	649,21	612,46	692,02
Rata-Rata Harian Nominal Kliring Debet (Miliar Rp)	47,21	45,39	45,75	41,53	41,97	43,11	39,84	36,49	39,10	31,97	34,10	30,98	28,36

PERBANKAN

INDIKATOR	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Bank Umum													
Total Aset (Triliun Rp)	66,47	69,07	70,25	72,21	73,96	76,26	75,21	74,79	74,48	77,56	79,05	78,45	80,22
Pertumbuhan Total Aset (%yoy)	4,49	6,07	3,81	10,17	11,27	10,42	7,06	3,57	0,70	1,70	5,10	4,89	7,71
Pertumbuhan DPK (%yoy)	9,61	9,37	7,35	10,06	10,01	8,04	5,90	5,03	5,47	0,37	4,69	2,99	3,41
DPK (Triliun Rp)	46,57	49,28	49,67	50,89	51,23	53,24	52,60	53,45	54,04	53,44	55,07	55,05	55,88
Giro	8,21	9,16	9,23	7,88	9,30	10,10	9,17	7,78	10,14	8,02	10,26	8,92	10,76
Tabungan	27,60	29,38	29,85	32,27	30,94	32,09	32,37	33,67	31,62	33,02	32,82	33,53	32,47
Deposito	10,76	10,74	10,59	10,74	10,99	11,05	11,06	12,00	12,27	12,40	12,67	12,60	12,63
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	2,87	6,63	5,77	6,03	5,66	5,69	5,65	6,71	5,20	8,26	0,67	0,11	3,38
Kredit (Triliun Rp) - Berdasarkan Jenis Penggunaan	57,38	58,96	59,89	60,86	60,63	62,31	63,28	64,94	63,78	67,46	63,70	65,01	65,94
Modal Kerja (Triliun Rp)	28,58	30,04	30,96	31,71	31,04	32,65	33,57	34,64	34,24	35,81	37,18	37,39	37,24
Investasi (Triliun Rp)	10,86	10,86	10,83	10,94	11,16	11,20	11,15	11,44	10,41	12,35	6,86	7,65	8,07
Konsumsi (Triliun Rp)	17,94	18,06	18,10	18,22	18,43	18,45	18,56	18,86	19,13	19,30	19,66	2,00	20,62
LDR	123,22	119,64	120,58	119,58	118,34	117,04	120,30	121,49	118,04	126,24	115,68	119,56	119,96
Kredit UMKM (Triliun Rp)	19,56	20,07	20,76	23,07	24,21	25,09	25,76	26,46	26,17	26,95	27,65	29,29	29,91
Pertumbuhan Kredit UMKM (%yoy)	0,46	4,25	6,69	17,67	23,73	25,01	24,06	14,70	8,12	7,41	7,33	10,69	14,28
Total Kredit MKM (Triliun Rp)	37,55	38,34	39,06	39,89	41,14	42,09	42,91	43,80	44,23	45,18	46,08	47,26	48,12
Pertumbuhan Kredit MKM (%yoy)	5,88	9,54	8,86	8,08	9,57	9,79	9,85	9,80	7,51	7,34	7,40	7,89	8,79
NPL (%) gross	5,52	5,49	5,36	5,00	4,70	4,94	4,66	4,55	2,60	2,29	2,81	2,42	2,52





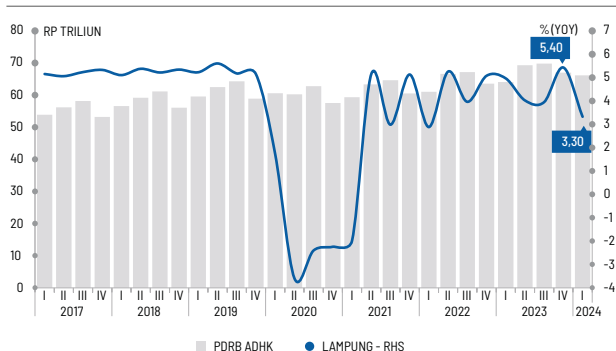
BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik dan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67% (yoy) pada triwulan laporan, terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Dari sisi eksternal, peningkatan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor pada triwulan I 2024 menahan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Kinerja net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 85,63% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh impor provinsi Lampung yang tumbuh 8,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 4,80% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan impor antar daerah untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Adapun kinerja ekspor tercatat tumbuh 6,10% (yoy), meningkat dibandingkan 4,44% (yoy) pada triwulan sebelumnya didukung oleh peningkatan perbaikan kinerja ekspor luar negeri.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 terutama disebabkan oleh penurunan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terkontraksi 10,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,40% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan produksi padi sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino. Di sisi lain, pertumbuhan positif perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 ditopang oleh peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tumbuh 6,51% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 2,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya didorong oleh meningkatkan kinerja industri makanan dan minuman serta industri percetakan sejalan dengan periode HBKN dan penyelenggaraan pemilu. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 8,58% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 8,16% (yoy) pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan meningkatnya meningkatnya laju suplai barang/jasa domestik.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 PDRB Provinsi Lampung

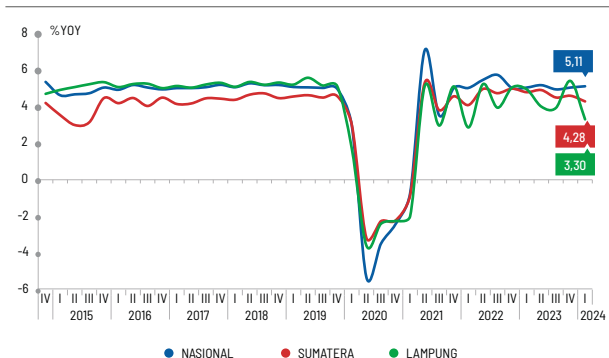
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan positif kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Kinerja perekonomian yang lebih baik tertahan oleh kinerja investasi yang melambat dan net ekspor yang berkontraksi. Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Kelautan yang mengalami kontraksi cukup dalam, sementara LU Perdagangan Besar dan Eceran dan LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang positif.

Secara umum, perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 3,30% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,40% (yoy) (Grafik 1.1). Capaian kinerja ekonomi Lampung tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera dan nasional yang masing-masing tercatat tumbuh 4,28% (yoy) dan 5,11% (yoy) (Grafik 1.2). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 berdasarkan ADHB tercatat sebesar Rp112,09 triliun dan berdasarkan ADHK (2010) sebesar Rp65,95 triliun.

1.1 ANALISIS PDRB SISI PENAWARAN

Melambatnya kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor eksternal seiring dengan peningkatan total impor. Net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kontraksi 85,63% (yoy) dengan andil terhadap



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Sumatera, dan Lampung

pertumbuhan PDRB sebesar -1,43% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar -0,50% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh impor Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 yang tumbuh 8,75% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,80% (yoy), terutama dipengaruhi oleh peningkatan impor antar daerah.

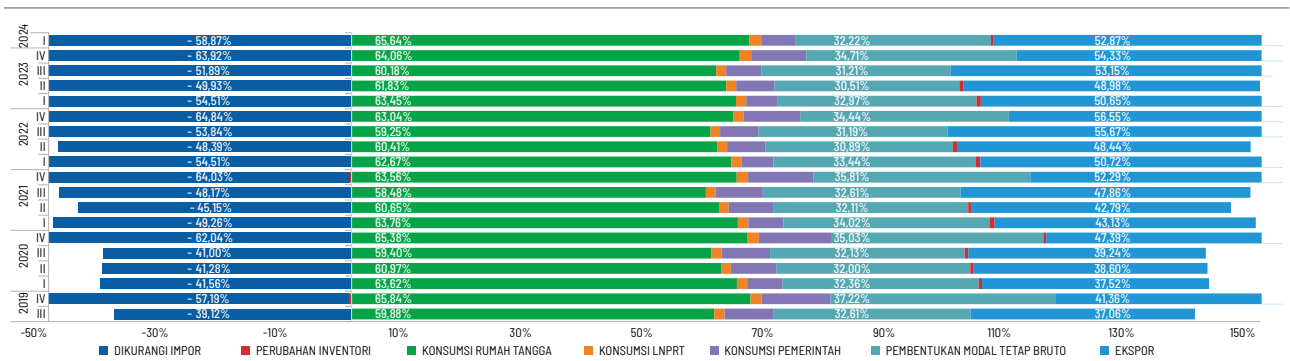
Tetap positifnya pertumbuhan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh tetap kuatnya kinerja permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Kinerja konsumsi rumah tangga tetap kuat meski tumbuh terbatas sebesar 4,67% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tumbuh 15,67% (yoy), terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Adapun kinerja investasi tercatat tumbuh 15,67% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.

Dari sisi eksternal, peningkatan impor pada triwulan I 2024 menahan kinerja perekonomian Lampung untuk tumbuh lebih tinggi. Kinerja net ekspor pada triwulan I 2024 tercatat mengalami kontraksi sebesar 85,63% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 7,57% (yoy). Perkembangan

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Pengeluaran

NO	KOMPONEN	TW I 2021 (yoy)	TW II 2021 (yoy)	TW III 2021 (yoy)	TW IV 2021 (yoy)	TW I 2022 (yoy)	TW II 2022 (yoy)	TW III 2022 (yoy)	TW IV 2022 (yoy)	TW I 2023 (yoy)	TW II 2023 (yoy)	TW III 2023 (yoy)	TW IV 2023 (yoy)	TW I 2024 (yoy)
1	Pengeluaran Konsumsi RT	-3.87	5.12	2.08	3.69	4.03	5.42	4.80	4.67	4.88	5.87	5.21	4.64	4,67
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	0.20	3.38	1.02	9.80	1.23	5.04	3.66	-4.36	6.90	9.29	8.53	17.36	19,13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4.31	4.65	1.58	-0.91	-2.91	-3.79	-7.61	-5.06	3.01	4.62	-2.94	3.36	15,67
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.75	4.44	3.66	5.99	2.33	3.40	1.15	2.83	2.81	2.14	4.37	7.08	2,31
5	Ekspor Barang dan Jasa	14.18	20.71	25.80	9.12	2.33	4.74	9.91	8.89	10.11	9.86	0.44	4.44	6,10
6	Impor Barang dan Jasa	13.20	20.11	22.68	5.84	2.65	2.28	7.60	4.69	8.10	11.44	1.40	4.80	8,75
	PDRB	-1.99	5.12	2.96	5.10	2.86	5.23	3.94	5.05	4.94	4.00	3.93	5.40	3,30

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Kontribusi PDRB Pengeluaran Provinsi Lampung

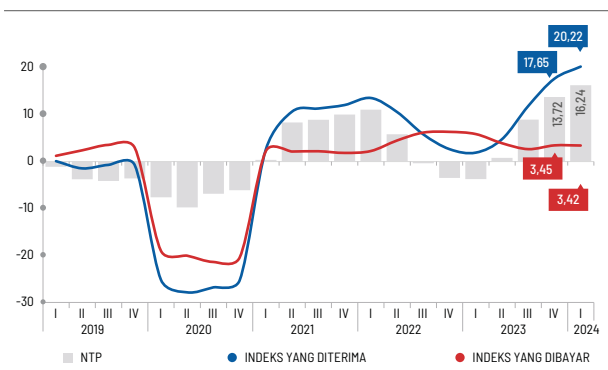
tersebut dipengaruhi oleh impor provinsi Lampung yang tumbuh 8,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,80% (yoy) sejalan dengan peningkatan impor antar daerah untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Adapun kinerja ekspor tercatat tumbuh 6,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,44% (yoy) didukung oleh perbaikan kinerja ekspor luar negeri.

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih didominasi oleh 2 (dua) komponen permintaan domestik, yaitu Konsumsi rumah tangga dan Investasi (PMTB). Konsumsi rumah tangga tercatat berkontribusi sebesar 65,64% terhadap PDRB Provinsi Lampung, kemudian diikuti oleh Investasi (PMTB) dengan kontribusi sebesar 32,52% (**Grafik 1.3**). Adapun komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah dan Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tercatat memiliki kontribusi sebesar 5,69% dan 1,95%. Dari sisi eksternal, ekspor memiliki kontribusi yang cukup dominan terhadap PDRB Provinsi Lampung, yaitu sebesar 52,87%. Namun demikian, Provinsi Lampung juga memiliki permintaan impor yang cukup tinggi, tercermin dari kontribusi impor yang tercatat sebesar 58,87% terhadap PDRB. Perkembangan struktur komponen eksternal PDRB Provinsi Lampung tersebut menjadi tantangan dalam upaya mendorong kontribusi net ekspor yang lebih tinggi terhadap perekonomian Lampung.

1.1.1. Konsumsi Rumah Tangga

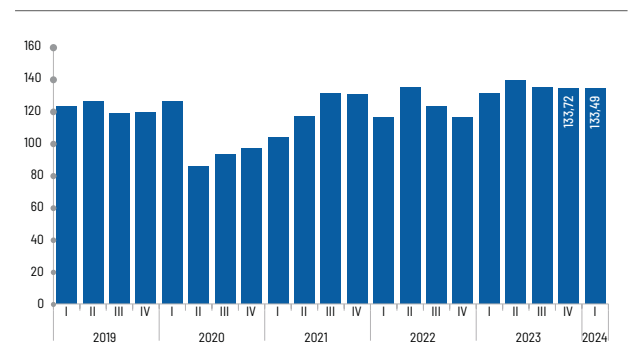
Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2024 tetap kuat didukung oleh peningkatan pendapatan dan kinerja pembiayaan perbankan.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan tumbuh 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan kesejahteraan petani dan kinerja pembiayaan perbankan. Sebagai sektor dan lapangan pekerjaan utama di Provinsi Lampung, kesejahteraan pekerja pada sektor pertanian tercatat mengalami peningkatan, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan yang meningkat 16,24% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang meningkat 13,72% (yoy) seiring dengan tetap tingginya harga jual komoditas pertanian akibat penurunan produksi pada periode El Nino, serta melambatnya indeks yang dibayar oleh petani seiring dengan laju inflasi pada triwulan I 2024 yang tetap terjaga dalam sasaran target (**Grafik 1.4**). Peningkatan kesejahteraan petani menjaga optimisme masyarakat secara umum, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terjaga pada zona optimis sebesar 133,49, sedikit lebih rendah dibandingkan 133,72 pada triwulan sebelumnya (**Grafik 1.5**). Di samping itu, terjaganya konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan turut didukung oleh pembiayaan perbankan, terlihat dari kinerja kredit konsumsi yang tumbuh 9,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan 6,90% (yoy) pada triwulan sebelumnya (**Grafik 1.6**).



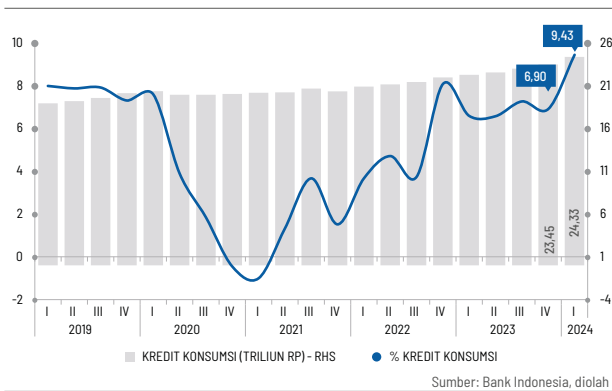
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.4 Nilai Tukar Petani



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5 Indeks Keyakinan Konsumen

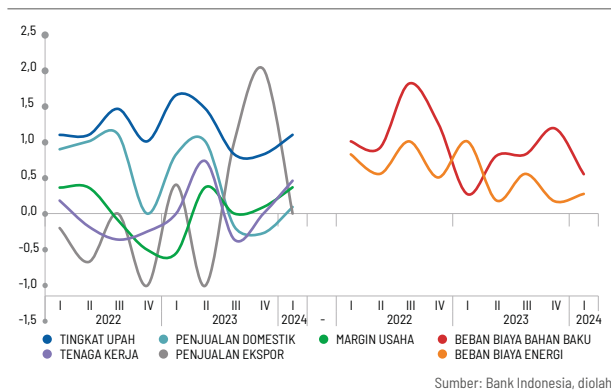


Grafik 1.6 Kredit Konsumsi

Lebih lanjut, tetap kuatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan akselerasi permintaan pada periode HBKN. Peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan meningkatnya kinerja lapangan usaha utama (LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran) mendukung aktivitas konsumsi pada periode *high demand* HBKN Imlek dan Ramadan di tengah peningkatan pendapatan. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan penjualan domestik dan penggunaan tenaga kerja pelaku usaha kontak liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (KPwBI Provinsi Lampung) ysejalan dengan peningkatan permintaan pada periode laporan (Grafik 1.7). Margin usaha kontak liaison KPwBI Provinsi Lampung juga tercatat meningkat seiring beban biaya bahan baku yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.1.2. Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah meningkat didorong oleh realisasi belanja barang jasa dan hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Pada triwulan I 2024, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 15,67% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,36% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya realisasi pos belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja hibah dalam APBD se-Provinsi Lampung. Belanja barang dan jasa Provinsi Lampung tercatat tumbuh 37,21% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp855,87 miliar atau 10,42% dari pagu, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2023 yang sebesar Rp623,77 miliar atau 7,96% dari pagu didorong oleh belanja barang dan jasa dalam rangka operasionalisasi penyelenggaraan pemilu. Belanja modal Provinsi Lampung tercatat tumbuh 108,67% dengan realisasi sebesar Rp334,16 Miliar atau 8,27% dari pagu, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2023 yang sebesar Rp160,14 miliar atau 4,01% dari pagu. Kenaikan realisasi belanja modal didorong oleh percepatan pembangunan proyek-proyek pemerintah pada akhir masa jabatan kepala daerah. Lebih lanjut, belanja hibah Provinsi Lampung pada triwulan laporan tercatat tumbuh 570,35% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp139,15 miliar atau 6,99% dari pagu, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar Rp 20,76% (yoy) atau 1,28% dari pagu yang didukung oleh realisasi belanja hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilu.

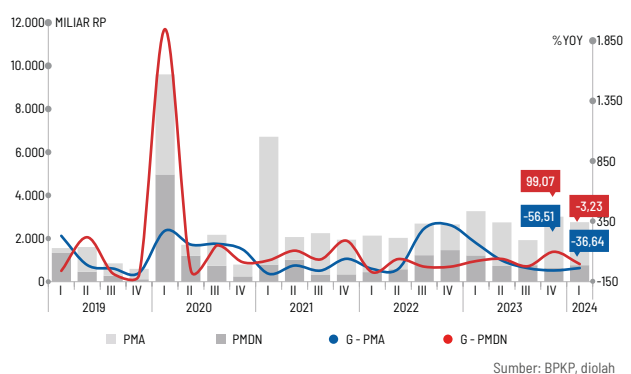


Grafik 1.7 Summary Kegiatan Liaison

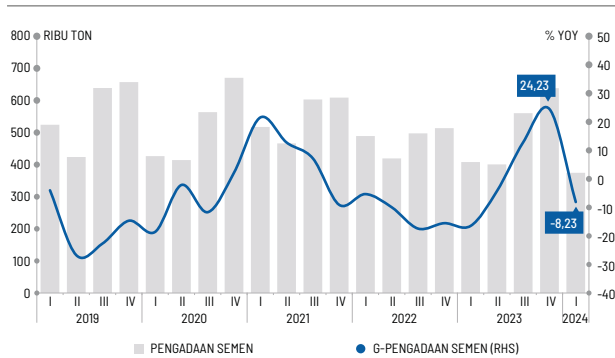
Kinerja pendapatan yang relatif lambat menghambat pertumbuhan kinerja konsumsi pemerintah yang lebih tinggi. Realisasi pendapatan daerah se-Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat terkontraksi sebesar 19,14% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp3.892 miliar atau 12,07% dari pagu, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2023 yang sebesar Rp4.814 miliar atau 16,03% dari pagu. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh lambatnya realisasi PAD dan TKDD yang masing-masing terkontraksi sebesar 42,19% (yoy) dan 13,34% (yoy) dengan realisasi 6,90% dan 13,91% dari pagu, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada triwulan I 2023 yang masing-masing mencapai 13,37% dan 16,95% dari pagu. Penurunan realisasi PAD pada triwulan laporan terutama dipengaruhi oleh lambatnya kinerja pendapatan dari pajak daerah yang terkontraksi 47,64% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp386,94 miliar atau 8,15% dari pagu, lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2023 yang mencapai Rp739,1 miliar atau 17,24% dari pagu.

1.1.3. Investasi

Kinerja investasi tumbuh melambat pada triwulan I 2024 sejalan dengan penurunan kinerja investasi bangunan. Investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan laporan tercatat tumbuh 2,31% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh perlambatan kinerja penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terkontraksi sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 99,07% (yoy) (Grafik 1.8). Aktivitas investasi yang melambat sejalan dengan realisasi



Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing



Sumber: Kementerian Perindustrian, diolah

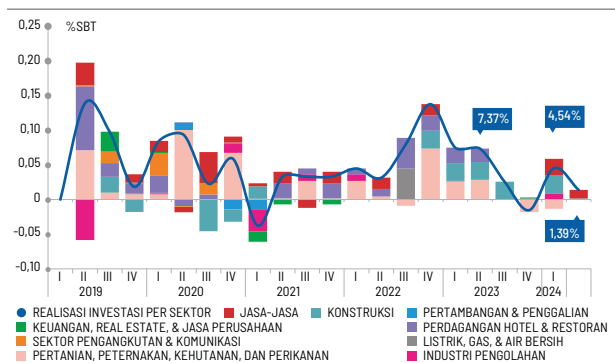
Grafik 1.9 Perkembangan Pengadaan Semen

pengadaan semen di Provinsi Lampung yang mengalami kontraksi sebesar 8,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,23% (yoy)(**Grafik 1.9**). Penurunan investasi bangunan turut berpengaruh terhadap penurunan permintaan kredit konstruksi pada triwulan laporan (**Grafik 1.10**). Lebih lanjut, penurunan kinerja investasi bangunan turut dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pembangunan bernilai besar seiring telah rampungnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Margatiga di Lampung Timur dan pencabutan status PSN Kawasan Industri Tanggamus pada tahun 2023. Adapun pembangunan PSN Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan di Provinsi Lampung masih berada pada tahap desain dan dokumentasi.

Puncak pemilu yang berlangsung pada Februari 2024 diperkirakan turut menahan kinerja realisasi investasi sejalan dengan kecenderungan investor untuk *wait and see*. Ekspansi kegiatan usaha terpantau tertahan hampir pada seluruh sub sektor kegiatan usaha, tercermin dari %SBT Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) untuk investasi pada triwulan laporan yang tercatat sebesar 1,39%, lebih rendah dibandingkan 7,57% pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya, dimana realisasi investasi tercatat stagnan (%SBT sebesar 0,00%) pada hampir seluruh sub sektor kegiatan usaha (**Grafik 1.11**).

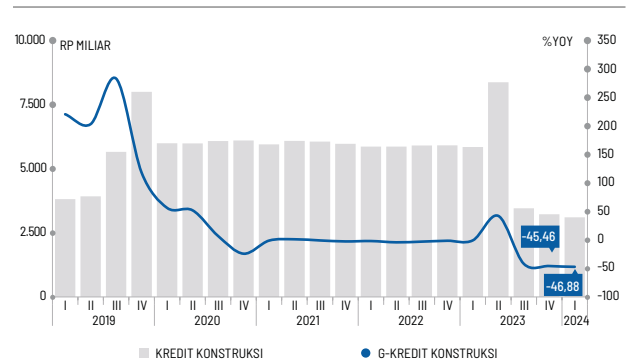
1.1.4. Ekspor dan Impor

Ekspor Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 meningkat didukung oleh perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Total ekspor Provinsi



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 1.11 SKDU Investasi

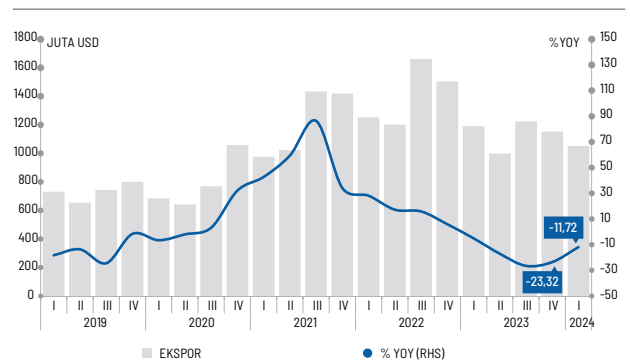


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.10 Perkembangan Kredit Konstruksi

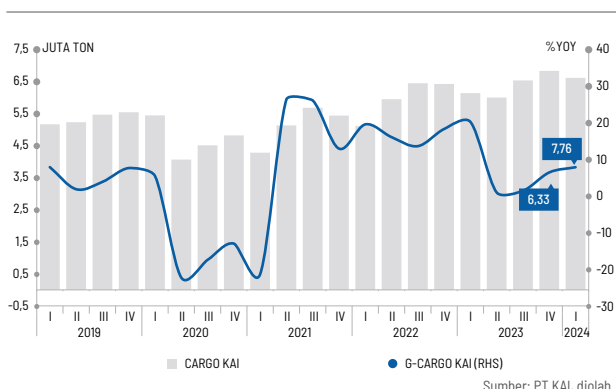
Lampung pada triwulan laporan tercatat tumbuh 6,10% (yoy) pada, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,44% (yoy). Dari sisi ekspor luar negeri, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ekspor luar negeri non migas Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar USD1.049,15 juta atau terkontraksi 11,72% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 23,32% (yoy) (**Grafik 1.12**). Perbaikan kinerja ekspor luar negeri non migas pada triwulan laporan terutama didukung oleh terjaganya kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan peningkatan ekspor berbagai makanan olahan. Namun demikian, pertumbuhan kinerja ekspor yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan ekspor sejumlah komoditas utama, diantaranya batu bara, kopi robusta, dan ampas/ sisa industri makanan.

Pada triwulan I 2024, kinerja ekspor lemak dan minyak hewan/nabati sebagai penopang kinerja ekspor non migas Provinsi Lampung mengalami perlambatan. Ekspor *refined palm oil* (RPO) pada triwulan laporan tercatat tumbuh 5,12% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 82,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya (**Grafik 1.17**). Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh moderasi permintaan dari negara mitra dagang utama Lampung, terutama Eropa, Tiongkok di tengah tingginya harga CPO dunia (**Grafik 1.15**). Dibukanya jalur perdagangan melalui *Black Sea Grain Initiative* yang ditandatangani Rusia berimbas pada penurunan harga minyak nabati dari biji bunga matahari dan biji-bijian lainnya di wilayah Eropa dan mendorong peningkatan stok di tahun 2023. Selain itu, masih tingginya stok CPO Tiongkok dan India



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Non Migas Luar Negeri



Sumber: PT KAI, diolah

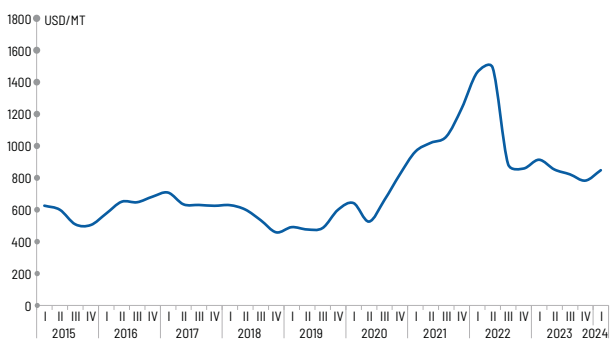
Grafik 1.13 Volume Pengangkutan Batu Bara dari Sumatera Selatan

turut menjadi faktor memengaruhi penurunan kinerja ekspor minyak kelapa sawit pada triwulan laporan. Meskipun mengalami perlambatan, komoditas minyak kelapa sawit tetap merupakan penopang utama kinerja ekspor Provinsi Lampung dengan andil sebesar 1,86% terhadap pertumbuhan ekspor luar negeri non migas pada triwulan laporan.

Perbaikan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan I 2024 tertahan oleh kinerja ekspor batu bara yang berkontraksi cukup dalam.

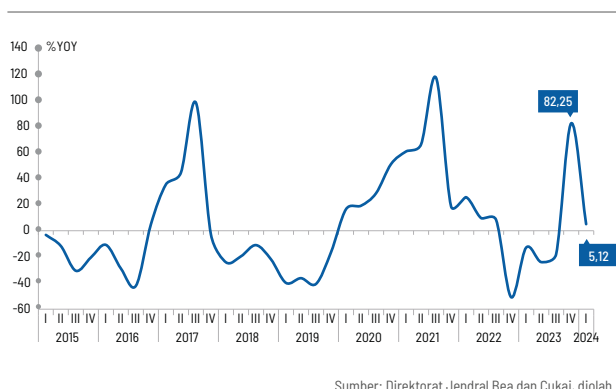
Kinerja ekspor luar negeri batu bara pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi sebesar 24,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 32,04% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, sejalan dengan masifnya tingginya inventori Tiongkok dan India dari impor pada akhir tahun 2023. Selain itu, harga batu bara dunia yang berkontraksi -43,69% (yoy) pada triwulan laporan turut menekan kinerja ekspor batu bara Provinsi Lampung. Koreksi harga yang cukup dalam tersebut terutama didorong oleh kenaikan stok batu bara dunia, salah satunya peningkatan suplai dari Australia setelah mengalami gangguan produksi akibat faktor cuaca pada tahun 2022-2023.

Penurunan produksi akibat El Nino menghambat kinerja ekspor kopi robusta Provinsi Lampung di tengah kenaikan harga kopi dunia pada triwulan I 2024. Kinerja ekspor kopi robusta Provinsi Lampung berkontraksi 45,33% (yoy) pada triwulan laporan, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi sebesar 43,23% (yoy) pada triwulan



Sumber: Bloomberg, diolah

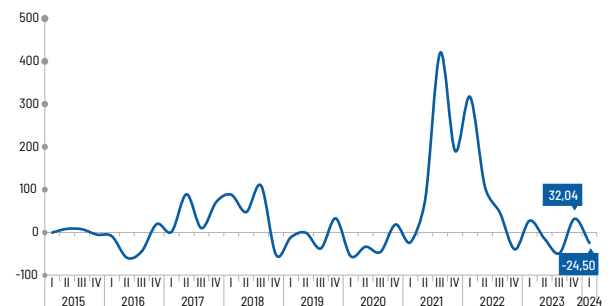
Grafik 1.15 Perkembangan Harga Minyak Kelapa Sawit Internasional



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

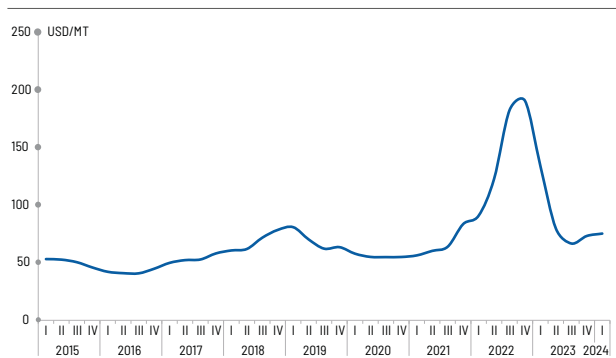
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Lemak dan Minyak Hewan/Nabati

sebelumnya (Grafik 1.18). Terganggunya proses pembungaan dan pembuahan tanaman kopi akibat tingginya intensitas El Nino pada akhir tahun 2023 menyebabkan penurunan produksi kopi robusta di sentra-sentra produksi Provinsi Lampung dan berdampak pada kurang baiknya kualitas hasil benih bergulir yang dipanen. Di samping itu, penurunan produksi kopi juga disebabkan oleh minimnya penggunaan pupuk oleh petani di tengah penyebaran hama kutu putih akibat kemarau panjang. Di tengah penurunan produksi, permintaan kopi robusta baik untuk kebutuhan domestik maupun luar negeri masih relatif tinggi. Hal tersebut tercermin dari berlanjutnya tren kenaikan harga acuan kopi robusta dunia pada triwulan laporan (Grafik 1.19), sejalan dengan tingginya harga kopi robusta di tingkat petani di Provinsi Lampung yang tercatat pada kisaran Rp55.000-Rp60.000 per kg, lebih



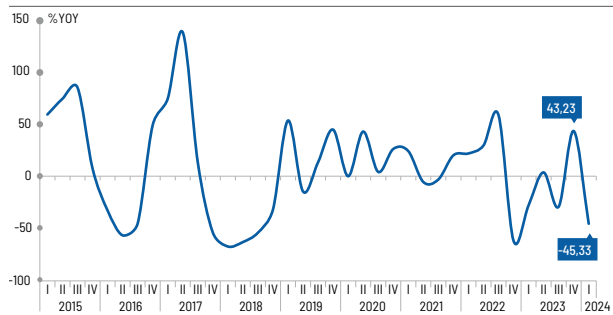
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor Bahan Bakar Mineral



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Harga Batu Bara Internasional



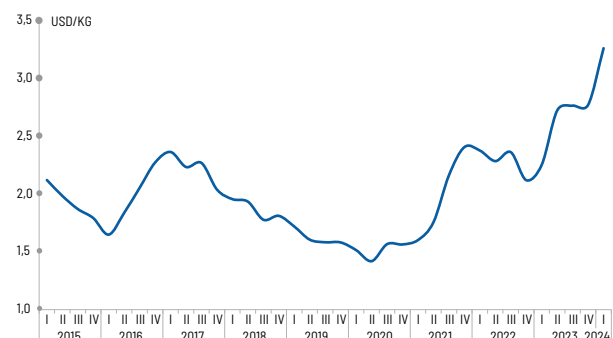
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Ekspor Kopi, Teh, dan Rempah-rempah

tinggi dibandingkan Rp20.000–Rp25.000 p per kg pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan harga tersebut sejalan dengan besarnya kontribusi Lampung terhadap produksi kopi robusta Indonesia yang merupakan produsen kopi robusta terbesar kedua setelah Vietnam.

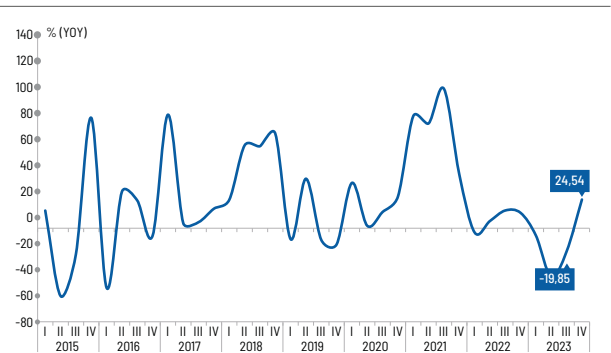
Penurunan kinerja ekspor minyak kelapa sawit diikuti oleh produk turunannya. Kinerja ekspor bungkil inti kelapa sawit dan *Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein* (RBDPO) berkontraksi 19,26% (yoy) pada triwulan I 2024, melambat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,54% (yoy) (Grafik 1.20). Penurunan permintaan produk turunan kelapa sawit dipengaruhi oleh melimpahnya ketersediaan pasokan produk kompetitor sejalan dengan peningkatan produksi *sunflower oil* (SFO) di negara-negara produsen utama (Ukraina, Rusia, EU dan Argentina). Berbeda dengan *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Refined Palm Oil* (RPO) yang lebih diminati oleh negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama untuk bungkil inti kelapa sawit dan RBD *Palm Olein*. Lebih lanjut, dibukanya jalur perdagangan baru melalui penandatanganan *Black Sea Grain Initiatives* oleh Rusia mendukung kinerja ekspor SFO dari negara-negara Eropa dengan harga yang relatif lebih murah.

Dilihat dari kontribusinya, lemak dan minyak hewan/nabati (CPO dan *refined palm oil*); bahan bakar mineral (batu bara); kopi, teh, rempah-rempah (kopi robusta); ampas/ sisa industri makanan (bungkil inti sawit); dan olahan dari buah-buahan/sayuran masih menjadi komoditas ekspor luar negeri utama Provinsi Lampung, dengan besaran kontribusi masing-masing komoditas secara berurutan



Sumber: World Bank, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Harga Kopi Robusta Internasional

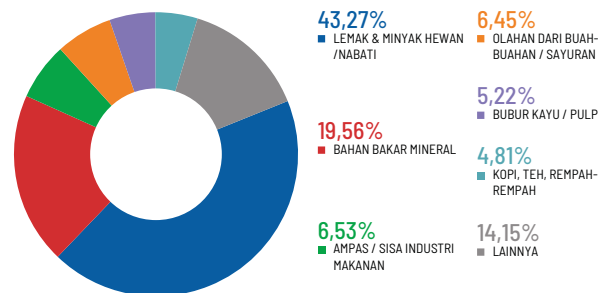


Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Ekspor Ampas/Sisa Industri Makanan

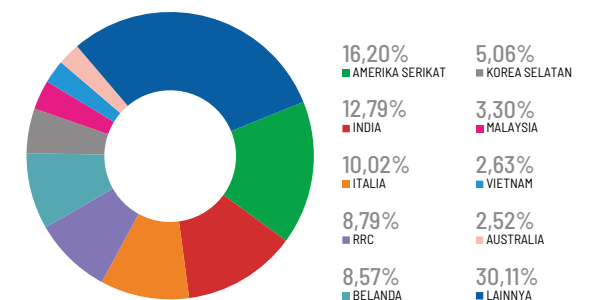
sebesar 43,27%, 19,56%, 6,53%, 6,45% (Grafik 1.21). Selain itu, 61,58% ekspor Provinsi Lampung pada triwulan laporan bersumber dari subsektor Industri Makanan dan Minuman, diikuti oleh LU Pertambangan dan LU Pertanian yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 19,44% dan 7,18%. Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung pada triwulan laporan adalah Amerika Serikat (16,20%), India (12,79%), Italia (10,02%), Tiongkok (8,79%), dan Belanda (8,57%) (Grafik 1.22).

Sejalan dengan kinerja ekspor, impor Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 8,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy). Secara umum, peningkatan impor pada triwulan laporan didorong oleh kinerja impor antar daerah untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat di tengah melambatnya kinerja LU utama.



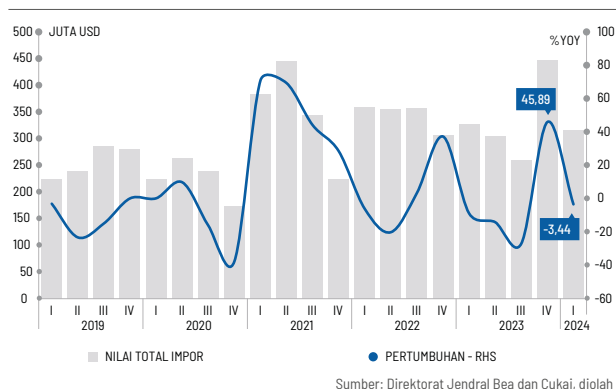
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.21 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

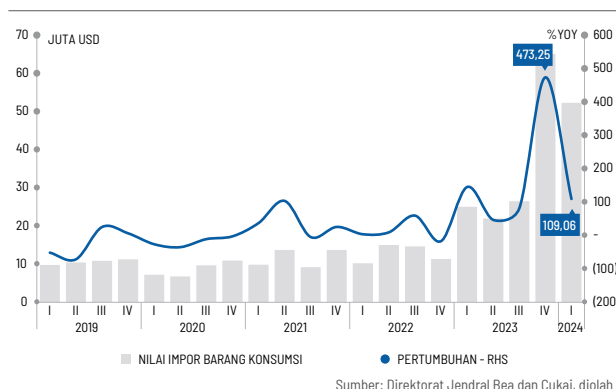
Grafik 1.22 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Tujuan



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

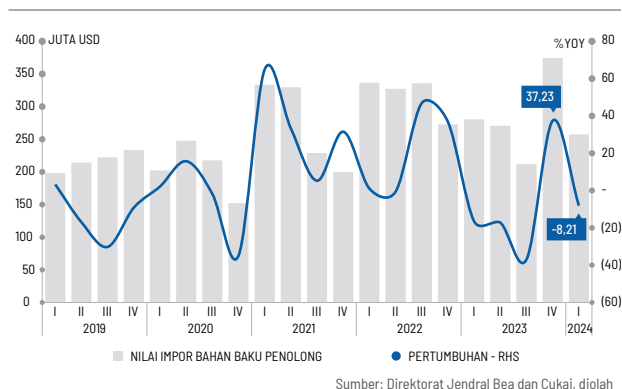
Grafik 1.23 Perkembangan Impor Luar Negeri

Meski total impor Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada triwulan I 2024, impor luar negeri Provinsi Lampung tercatat sebesar USD315,80 Juta atau terkontraksi 3,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 45,89% (yoy). Penurunan kinerja impor luar negeri pada triwulan laporan disebabkan oleh terkontraksinya impor bahan baku penolong dan barang modal, serta melambatnya impor barang konsumsi. Pada triwulan I 2024, impor bahan baku penolong tercatat mengalami kontraksi sebesar 8,21% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,23% (yoy) (Grafik 1.24). Penurunan kinerja impor bahan baku penolong disebabkan oleh impor komoditas ampas/sisa industri makanan (bungkil kedelai) dan gula rafinasi yang masing-masing terkontraksi sebesar 23,59% (yoy) dan 14,87% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 31,37% (yoy) dan 194,20% (yoy). Penurunan impor gula rafinasi sejalan dengan penurunan kuota impor gula industri yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menjadi sebesar 3,45 juta ton untuk tahun 2024 dari sebelumnya 3,61 juta ton di tahun 2023. Lebih lanjut, impor barang modal pada triwulan I 2024 terkontraksi sebesar 69,73% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 61,66% (yoy). Penurunan kinerja impor barang modal disebabkan oleh impor mesin/peralatan listrik yang terkontraksi sebesar 78,68% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6,78% (yoy). Adapun impor barang konsumsi tercatat tumbuh 109,06% (yoy), melambat dibandingkan 473,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Gambar



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Impor Barang Konsumsi



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

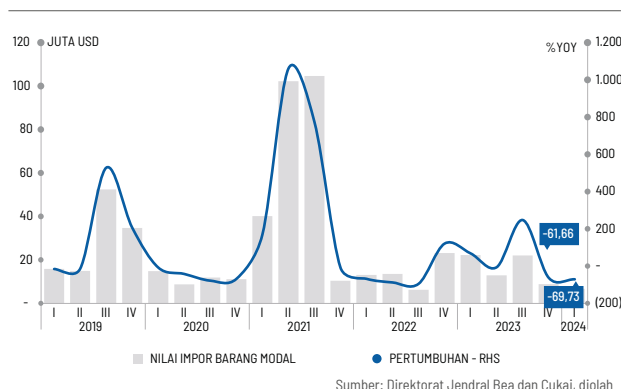
Grafik 1.24 Perkembangan Bahan Baku Penolong

1.25). Melambatnya kinerja impor barang konsumsi pada triwulan laporan terutama disebabkan oleh impor sereal yang tumbuh 138,33% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 922,46% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Melambatnya kinerja impor luar negeri barang konsumsi juga dipengaruhi oleh meningkatnya laju suplai barang/jasa domestik sejalan dengan peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan Perdagangan pada triwulan laporan.

Dilihat dari kontribusinya, gula dan produk olahan gula (gula kristal dan rafinasi); sereal; ampas/sisa industri makanan (bungkil kedelai); biji-bijian berminyak; binatang hidup (sapi bakalan); dan hewan hidup merupakan komoditas utama impor luar negeri Provinsi Lampung, dengan kontribusi masing-masing komoditas secara berurutan sebesar 27,89%; 15,46%; 13,86%; 11,78%; dan 9,86% (Grafik 1.27). Sementara itu, negara asal impor terbesar Provinsi Lampung pada triwulan laporan adalah Australia (16,76%), Amerika Serikat (14,55%), Thailand (14,14%), Tiongkok (5,48%), dan Kanada (3,32%) (Grafik 1.28).

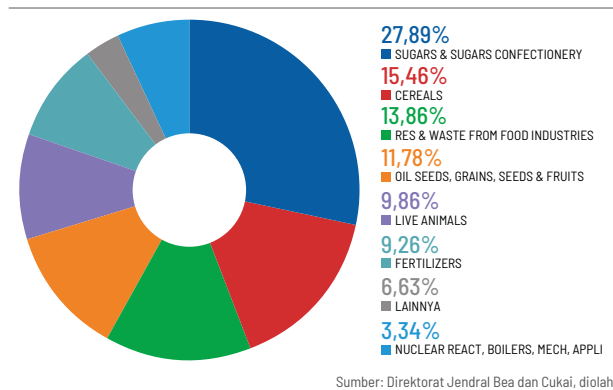
1.2 ANALISIS PDRB SISI LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), melambatnya kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 disebabkan oleh penurunan produksi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan laporan terkontraksi 10,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi



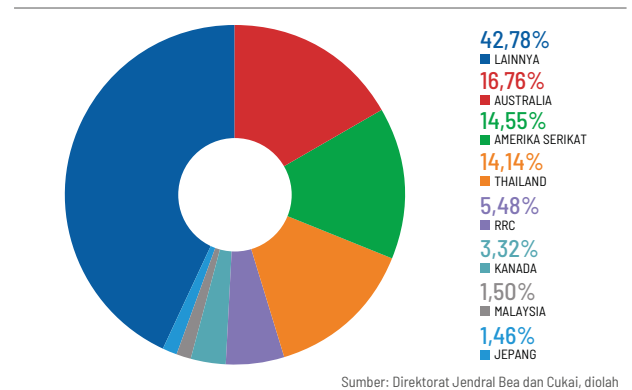
Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Impor Barang Modal



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.27 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Komoditas



Sumber: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diolah

Grafik 1.28 Distribusi Ekspor Non Migas Berdasarkan Negara Asal

0,40% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan produksi padi, sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino.

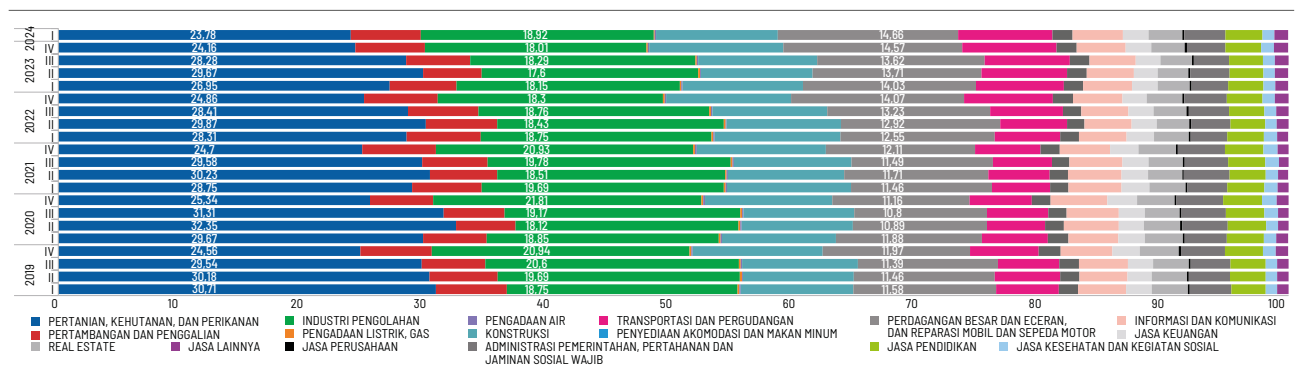
Di sisi lain, pertumbuhan positif perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 ditopang oleh peningkatan kinerja LU industri pengolahan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kinerja LU industri pengolahan pada triwulan laporan tumbuh 6,51% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,94% (yoy), terutama didorong oleh meningkatkan kinerja industri makanan dan minuman serta industri percetakan sejalan dengan periode HBKN dan penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut, kinerja LU perdagangan besar dan eceran pada triwulan laporan tercatat tumbuh 8,58% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,16% (yoy) sejalan dengan peningkatan laju suplai barang/jasa domestik.

PDRB Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih didominasi oleh tiga LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Industri Pengolahan; dan LU Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan dengan besaran kontribusi masing-masing sebesar 23,78%, 18,92%, dan 14,66% (Grafik 1.29). Kontribusi LU utama, khususnya pertanian tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tengah meningkatnya kontribusi lapangan usaha lainnya. Adapun penurunan proporsi LU Pertanian sejalan dengan pergeseran masa tanam dan puncak produksi padi tahun 2024.

1.2.1 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melambat sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino. Produksi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan I 2024 berkontraksi 10,97% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,40% (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh produksi padi yang berkontraksi 59,08% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 14,40% (yoy) (Grafik 1.30). Perkembangan tersebut sejalan dengan penurunan luas panen padi yang disebabkan oleh pergeseran periode tanam – panen, serta menurunnya luas panen ubi kayu. Luas tanam padi dan ubi kayu pada triwulan laporan tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar 56,83% (yoy) dan 32,23% (yoy), lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 18,91% (yoy) dan 10,86% (yoy). Perlambatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan lebih lanjut tertahan oleh kinerja produksi jagung yang lebih baik sejalan dengan peningkatan luas panen. Luas panen jagung pada triwulan I 2024 tercatat berkontraksi sebesar -26,64% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 49,88% (yoy).

Kondisi kemarau dengan curah hujan yang masih cukup rendah hingga pertengahan triwulan IV 2023 berdampak terhadap penurunan produksi komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa sawit dan lada pada triwulan I 2024. Pada kondisi suhu



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.29 Pangsa PDRB Lapangan Usaha

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung - Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

NO	LAPANGAN USAHA	TW I 2021 (yoy)	TW II 2021 (yoy)	TW III 2021 (yoy)	TW IV 2021 (yoy)	TW I 2022 (yoy)	TW II 2022 (yoy)	TW III 2022 (yoy)	TW IV 2022 (yoy)	TW I 2023 (yoy)	TW II 2023 (yoy)	TW III 2023 (yoy)	TW IV 2023 (yoy)	TW I 2024 (yoy)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,05	0,28	-1,80	2,07	-0,35	3,33	-0,51	6,01	-0,56	1,56	1,28	-0,40	-10,97
2	Pertambangan dan Penggalian	-6,44	-4,54	-9,02	-1,40	-4,86	-4,57	-3,28	-2,18	-1,23	-2,42	6,94	8,28	11,55
3	Industri Pengolahan	1,72	8,04	7,11	2,17	-0,88	7,33	1,57	-5,98	2,97	-0,55	0,49	2,94	6,51
4	Pengadaan Listrik, Gas	-12,40	-10,28	-10,32	8,13	7,10	12,08	3,80	2,79	4,12	5,49	3,03	-7,74	-16,90
5	Pengadaan Air	4,36	6,52	7,22	9,55	9,82	3,90	1,88	-0,21	-0,12	2,06	0,83	-0,70	-3,27
6	Konstruksi	5,54	9,01	7,92	5,48	5,04	4,93	2,80	2,59	0,94	2,37	9,49	15,16	6,86
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,33	13,48	10,22	16,80	13,82	14,19	16,17	17,51	14,29	9,97	7,15	8,16	8,58
8	Transportasi dan Pergudangan	-14,49	9,95	1,39	15,30	17,74	14,21	22,47	26,28	25,04	19,32	13,07	11,03	11,46
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	-12,68	2,50	-2,73	8,29	8,64	8,53	18,27	14,85	14,37	18,02	11,84	9,78	7,16
10	Informasi dan Komunikasi	8,15	8,19	9,63	-0,38	-2,55	-2,52	-1,86	9,40	11,95	7,64	4,57	6,31	9,34
11	Jasa Keuangan	1,78	7,08	1,26	-1,41	1,48	-2,48	-2,46	-11,01	-5,00	0,05	5,47	13,26	7,68
12	Real Estate	-6,27	0,16	3,89	7,98	2,27	3,93	3,75	3,68	-0,51	1,90	1,07	0,92	9,84
13	Jasa Perusahaan	-7,46	4,21	-0,69	8,69	15,01	14,84	21,46	18,49	9,32	4,89	5,26	4,06	9,91
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,05	7,81	4,67	9,23	-1,12	-4,81	1,07	-0,12	8,50	4,39	-8,29	-2,33	14,23
15	Jasa Pendidikan	-1,61	0,03	0,14	5,94	3,45	4,01	2,11	1,24	3,16	1,57	0,82	3,47	3,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,90	10,03	1,31	2,13	9,25	-1,45	-3,70	-3,59	-2,94	6,73	3,42	8,55	3,95
17	Jasa Lainnya	-10,21	5,29	-4,47	2,20	6,55	26,45	38,54	30,92	22,16	15,68	13,22	11,80	9,05
	PDRB	-1,99	5,12	2,96	5,10	2,86	5,23	3,94	5,05	4,94	4,00	3,93	5,40	3,30

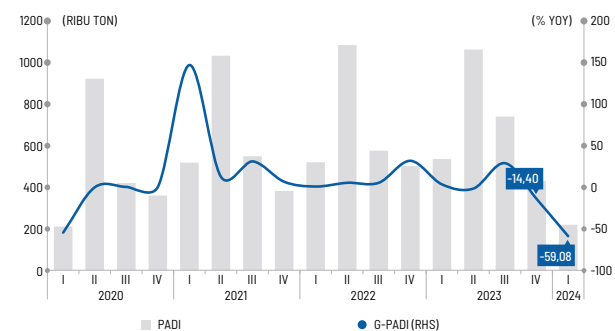
Sumber: BPS, diolah

permukaan tanah yang cukup tinggi, aktivitas pemupukan dapat memicu kenaikan risiko terjadinya pembusukan bunga/buah. Kondisi ini menyebabkan tertahannya aktivitas pemupukan bagi tanaman perkebunan yang kualitas buahnya sangat dipengaruhi oleh dosis pemberian NPK. Tertahannya aktivitas pemupukan ditunjukkan oleh volume impor pupuk pada triwulan II dan III 2023 yang terkonsentrasi cukup dalam (**Grafik 1.32**). Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap rendahnya produksi komoditas perkebunan pada triwulan I 2024, salah satunya komoditas kopi yang mengalami keterlambatan panen hingga dua bulan dari kondisi normal. Panen komoditas kopi yang biasanya berlangsung mulai bulan Maret atau April bergeser menjadi bulan Mei atau Juni pada tahun 2024 sejalan dengan Indeks Osilasi Selatan atau *Southern Oscillation Index* (SOI) yang mulai menuju netral

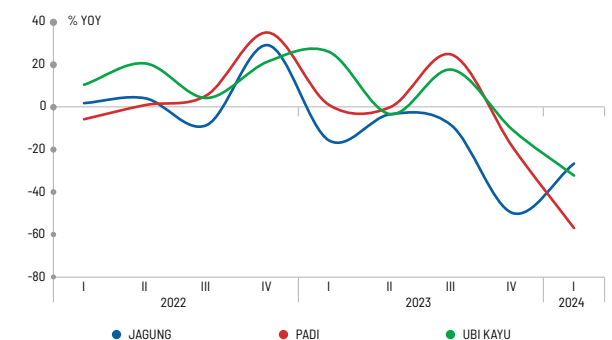
pada pertengahan triwulan IV 2023 (**Grafik 1.33**). Sejalan dengan kondisi tersebut, aktivitas pemupukan terindikasi mulai meningkat, tercermin dari peningkatan volume impor pupuk triwulan IV 2023 dan berlanjut pada triwulan I 2024 yang tercatat tumbuh sebesar 115,23% (yoy) (**Grafik 1.32**).

Pendapatan sebagian petani terpantau meningkat didukung harga komoditas yang tetap tinggi di tengah perlambatan produksi.

Hal tersebut tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum, terutama NTP subsektor Hortikultura dan Perkebunan. NTP Pertanian terpantau tetap tinggi meski sedikit mengalami perlambatan seiring dengan harga gabah yang masih tinggi namun mulai mengalami penurunan pada Maret 2024 (**Grafik 1.35**). Adapun NTP perikanan

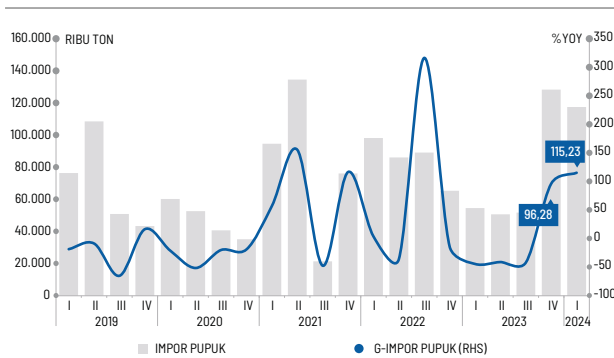


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.30 Produksi Padi


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.31 Luas Panen Tanaman Pangan

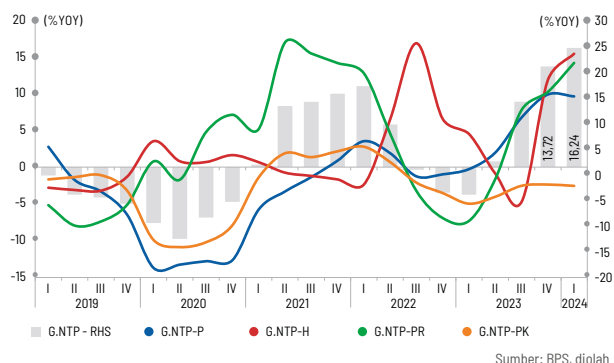


Grafik 1.32 Volume Impor Pupuk

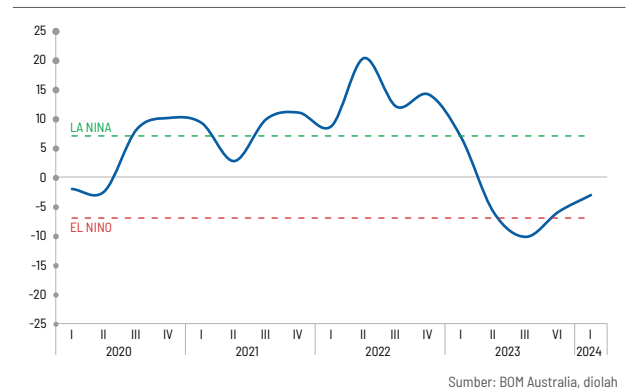
tercatat mengalami kontraksi dan melambat dari triwulan sebelumnya (Grafik 1.34).

1.2.2 LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri pengolahan meningkat didukung kinerja sub-LU Makanan dan Minuman. Kegiatan LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2024 tumbuh 6,51% (yoy), meningkat jika dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,95% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh perbaikan kinerja ekspor komoditas industri manufaktur yang meskipun tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,86% (yoy), namun tidak sedalam capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 17,19% (yoy). Kinerja ekspor industri manufaktur yang lebih baik salah satunya disebabkan oleh perbaikan kinerja ekspor sub sektor makanan dan minuman yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,90% (yoy), lebih baik dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,93% (yoy) (Grafik 1.36). Perbaikan kinerja ekspor komoditas industri Provinsi Lampung didukung oleh kinerja permintaan yang lebih baik seiring prospek aktivitas ekonomi yang lebih baik di negara mitra dagang utama, terutama Amerika Serikat, India, Jerman dan Italia (Grafik 1.37). Peningkatan produksi industri pengolahan juga didukung oleh akselerasi permintaan domestik, terutama pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Hal ini terkonfirmasi dari likert scale penjualan domestik dari kegiatan *liason* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 0,09, lebih tinggi jika dibandingkan -0,27 pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.38).

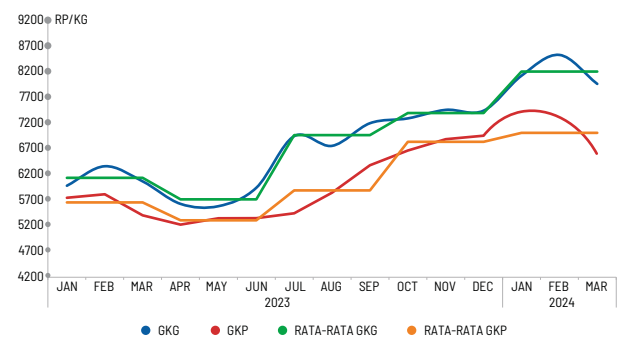


Grafik 1.34 Nilai Tukar Petani Subsektor

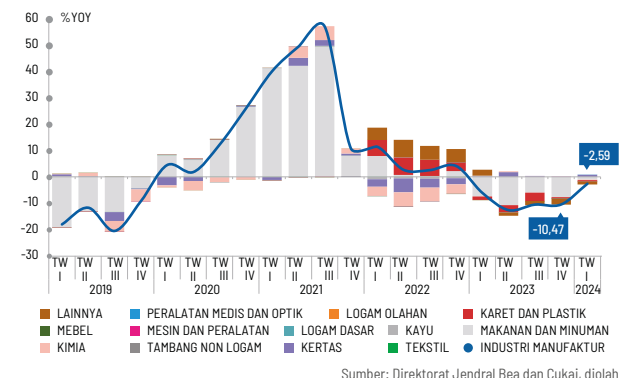


Grafik 1.33 Perkembangan Iklim

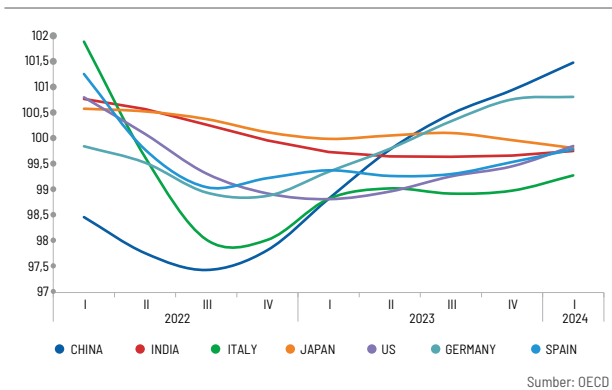
Maraknya aktivitas kampanye pada periode pemilu turut mendorong kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya sub sektor industri percetakan. Hal tersebut tercermin dari kinerja investasi pada sektor industri yang menunjukkan perbaikan, salah satunya didukung oleh peningkatan kinerja investasi pada sub sektor industri kertas dan percetakan. Ekspansi kegiatan usaha di sektor sekunder melalui penanaman modal (PMDN dan PMA) pada triwulan laporan cenderung tertahan sejalan dengan penanaman modal pada LU Industri Pengolahan didominasi oleh industri makanan yang terkontraksi semakin dalam. Namun demikian, kontraksi investasi di sektor industri pada triwulan laporan tercatat sebesar 36,92% (yoy), tidak sedalam capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi 45,21% (yoy). Perkembangan tersebut



Grafik 1.35 Rata-Rata Harga Gabah



Grafik 1.36 Ekspor Luar Negeri Komoditas Industri

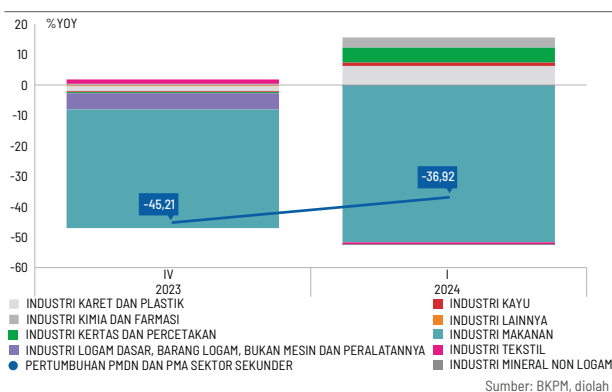


Grafik 1.37 CLI Mitra Dagang Utama Provinsi Lampung

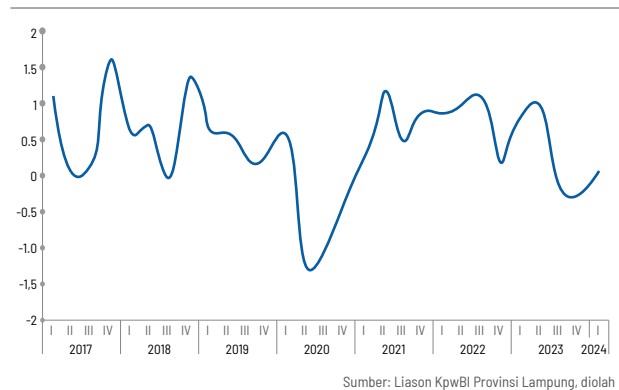
salah satunya didorong oleh peningkatan penanaman modal pada sub sektor industri kertas dan percetakan yang tercatat tumbuh 16.836,75% (yoy), terakselerasi dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 43,54% (yoy) didukung oleh maraknya aktivitas kampanye pada periode puncak pemilihan umum 2024 (Grafik 1.39). Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU industri pengolahan juga didukung dengan kinerja penyaluran kredit yang lebih baik dan terkonfirmasi dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang meningkat (Grafik 1.40 dan 1.41).

1.2.3 LU Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran meningkat didorong oleh perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PBE) pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 8,58% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,16% (yoy) seiring dengan perbaikan kinerja penjualan kendaraan bermotor. Meski masih terkontraksi, kinerja penjualan kendaraan bermotor pada triwulan I 2024 terpantau mengalami perbaikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh kinerja penjualan kendaraan sepeda motor (roda 2) dan mobil (roda 4) yang meskipun terkontraksi masing-masing sebesar 5,30% (yoy) dan 31,31% (yoy), namun tidak sedalam capaian triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,91% (yoy) dan 38,42% (yoy) (Grafik 1.42), sejalan dengan kinerja kredit kendaraan bermotor yang tercatat meningkat pada triwulan laporan (Grafik 1.43). Lebih lanjut, dukungan



Grafik 1.39 Penanaman Modal Sektor Sekunder

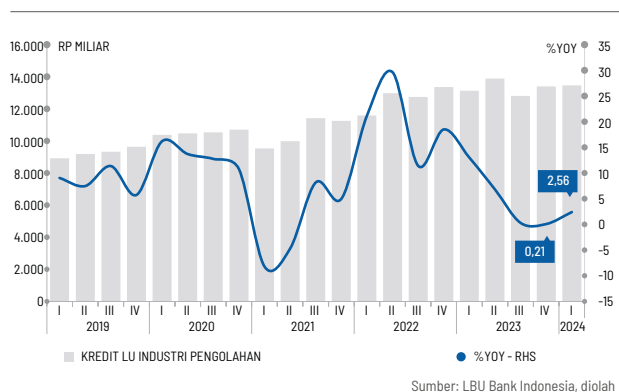


Grafik 1.38 Likert Scale Penjualan Domestik

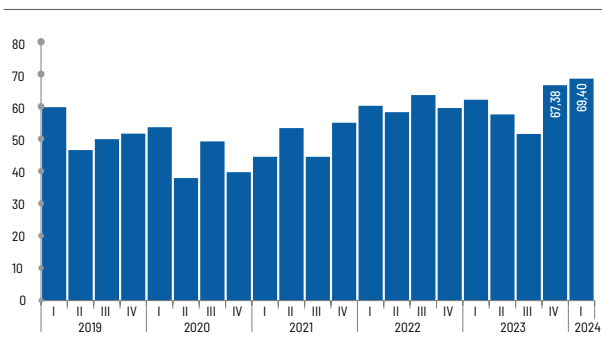
pemerintah juga menjadi faktor yang mendukung perbaikan kinerja penjualan sepeda motor dan mobil pada triwulan laporan, termasuk berlanjutnya implementasi kebijakan makroprudensial longgar oleh Bank Indonesia, dimana salah satunya adalah melanjutkan uang muka kredit atau *down payment* (DP) paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru tertentu.

Terjaganya aktivitas perdagangan pada triwulan laporan turut didorong oleh peningkatan kinerja penjualan eceran.

Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan terdapat peningkatan aktivitas perdagangan eceran pada triwulan I 2024, terlihat dari total omset penjualan yang tumbuh 13,68% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,95% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan omset penjualan kelompok kendaraan; suku cadang dan aksesoris; serta makanan, minuman dan tembakau sejalan dengan peningkatan aktivitas Masyarakat pada periode HBKN Imlek, Ramadan dan persiapan Idul Fitri (Grafik 1.44). **Berlanjutnya pemulihan sektor pariwisata turut mendukung peningkatan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran.** Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung yang tercatat tumbuh 5,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,38% (yoy). Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap aktivitas perdagangan didukung oleh maraknya penyelenggaraan event, salah satunya festival kuliner.

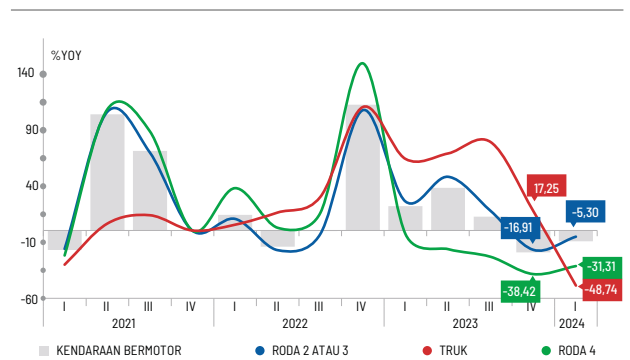


Grafik 1.40 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.41 Prompt Manufacturing Index



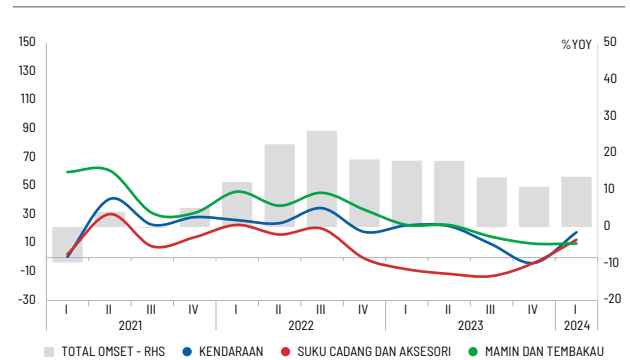
Sumber: Bapenda Provinsi Lampung, diolah

Grafik 1.42 Penjualan Kendaraan Bermotor

1.2.4 Lapangan Usaha Lainnya

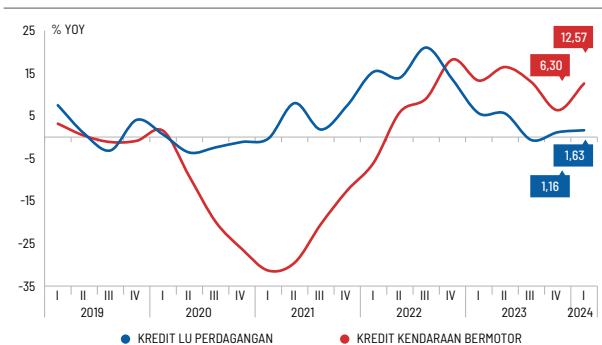
Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024 tumbuh melambat sejalan dengan masih rendahnya aktivitas konstruksi pada awal tahun. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh 6,86% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,16% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh aktivitas konstruksi pada triwulan laporan yang terpantau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, seiring berakhirnya beberapa proyek pembangunan bernilai besar seperti pembangunan bendungan, irigasi dan hotel bintang lima pada tahun 2023. Di samping itu, banyaknya proyek yang masih dalam tahap konsep, desain dan pra konstruksi juga turut memengaruhi perlambatan kinerja LU konstruksi pada triwulan laporan (Grafik 1.46). Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung mengonfirmasi perlambatan kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024. Realisasi kegiatan usaha sektor konstruksi dalam SKDU menunjukkan penurunan %SBT menjadi 5,15% pada triwulan laporan, lebih rendah jika dibandingkan dengan 7,72% pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan SBT realisasi penggunaan tenaga kerja yang juga melandai (Grafik 1.47). Perkembangan tersebut turut tercermin dari perlambatan realisasi pengadaan semen dan kinerja kredit konstruksi (Grafik 1.9 dan 1.10).

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan pada triwulan I 2024 meningkat didukung peningkatan produktivitas *lifting* minyak bumi di perairan Lampung Timur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan pada triwulan laporan tumbuh 11,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,28% (yoy). Berlanjutnya peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalan didorong oleh peningkatan produktivitas *lifting* minyak bumi di perairan Lampung Timur, dari 6.100 BOPD menjadi 20.500 BOPD pasca dilakukannya revitalisasi *main oil line* (pipa bawah air) sepanjang 30 km oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES). Revitalisasi pipa yang telah selesai pada triwulan III 2023 mendukung reaktivasi 48 sumur-



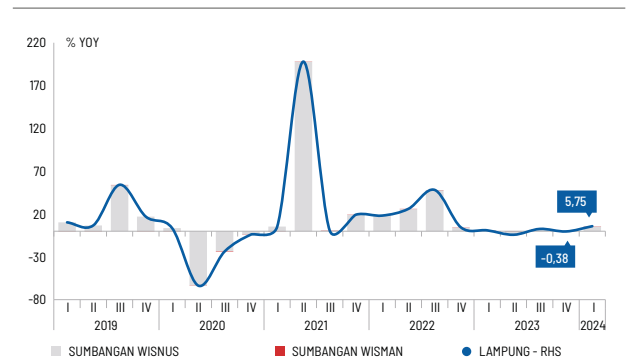
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.44 Omset Penjualan Eceran

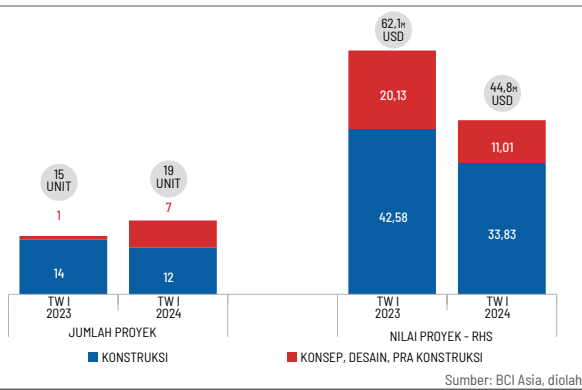


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

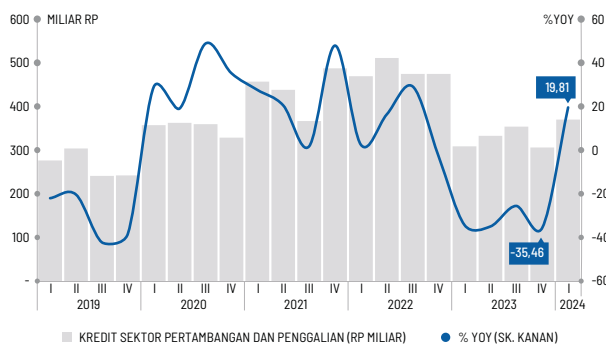
Grafik 1.43 Kredit Kendaraan Bermotor dan Kredit LU Perdagangan



Grafik 1.45 Kunjungan Wisatawan



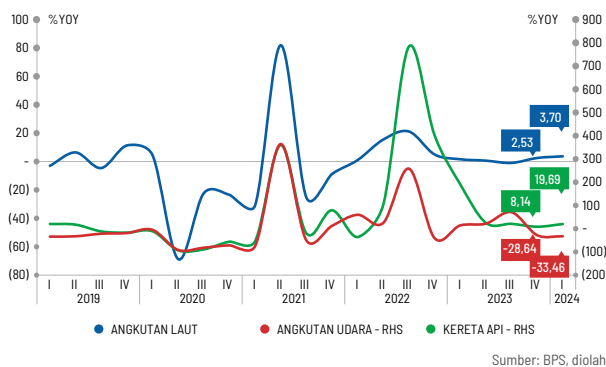
Grafik 1.46 Proyek Konstruksi yang Tercatat di BCI Asia



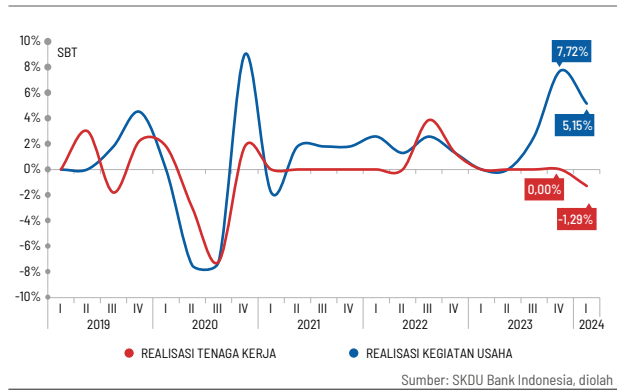
Grafik 1.48 Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian

sumur minyak di *Central Business Unit* pada kilang minyak tersebut. Perkembangan ini meningkatkan optimisme terkait prospek perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian ke depan yang ditunjukkan oleh perbaikan kinerja Kredit LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan (Grafik 1.48). Lebih lanjut, perkembangan tersebut juga sejalan dengan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung, dimana SBT untuk realisasi kegiatan usaha, penggunaan tenaga kerja dan kapasitas terpakai LU Pertambangan dan Penggalian menunjukkan arah perkembangan yang akseleratif pada triwulan I 2024 (Grafik 1.49).

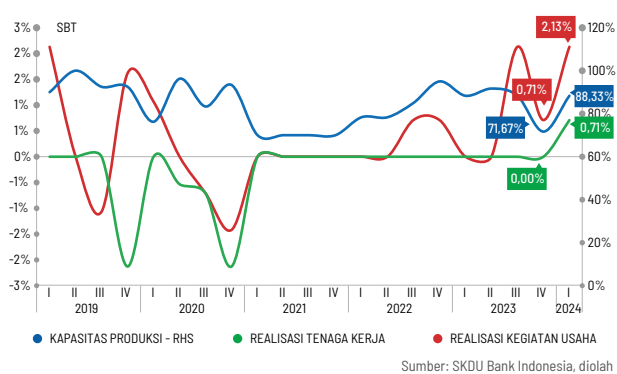
Kegiatan usaha LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2024 meningkat sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat



Grafik 1.50 Perkembangan Arus Penumpang Provinsi Lampung

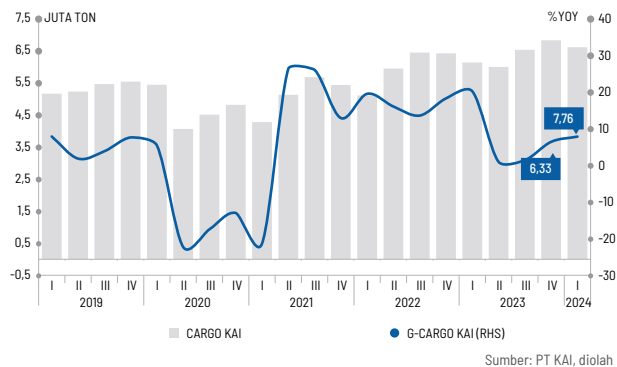


Grafik 1.47 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Konstruksi

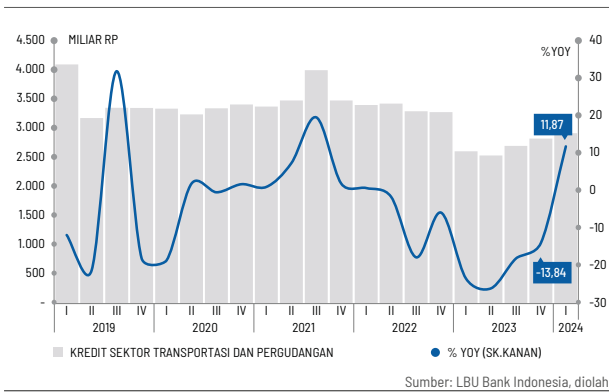


Grafik 1.49 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian

pada periode HBKN dan puncak pemilu. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan laporan tercatat tumbuh 11,46% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,03% (yoy). Perkembangan tersebut terutama didorong oleh peningkatan mobilitas Masyarakat pada periode HBKN Imlek dan Ramadan, serta menjelang Hari Raya Idul Fitri, tercermin dari peningkatan arus penumpang angkutan penyeberangan yang melalui Pelabuhan Bakauheni dan peningkatan penumpang yang berangkat dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang di Provinsi Lampung (Grafik 1.50). Di samping itu, tetap kuatnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan juga didukung dengan meningkatnya aktivitas pengangkutan barang menggunakan moda kereta api, terutama untuk pengiriman batubara dari Sumatera Selatan menuju Lampung dan



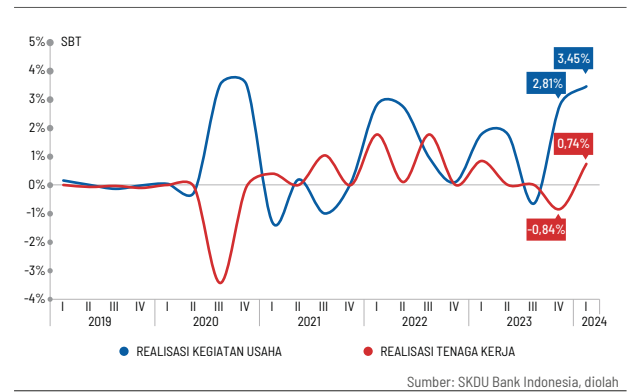
Grafik 1.51 Realisasi Angkutan Batubara KAI Sumatera Selatan - Lampung



Grafik 1.52 Kredit Sektor Transportasi, Pegudangan dan Komunikasi

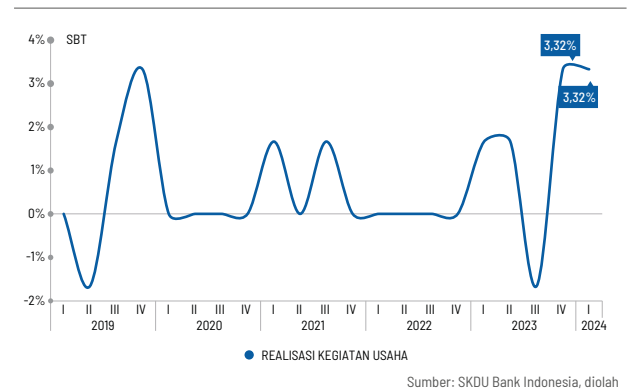
Banten dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik nasional (Grafik 1.51). Lebih lanjut, perkembangan LU ini sejalan dengan peningkatan minat terhadap pembiayaan di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (Grafik 1.52), serta SKDU yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung, dimana SBT realisasi kegiatan usaha di Sektor Transportasi dan Pergudangan tercatat meningkat menjadi 3,45% dari 2,81% pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan realisasi penggunaan tenaga kerja yang juga meningkat (Grafik 1.53).

Maraknya aktivitas kampanye pada periode pemilihan umum mendukung peningkatan kinerja LU Informasi dan Komunikasi pada triwulan laporan. Kinerja LU Informasi dan Komunikasi pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh 9,34% (yoy), meningkat dibandingkan dengan 6,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh meningkatnya kebutuhan publikasi dan periklanan melalui berbagai media cetak, televisi, radio dan daring untuk mendukung kegiatan kampanye menjelang pemilihan umum. Kinerja LU Informasi dan Komunikasi yang meningkat sejalan dengan peningkatan



Grafik 1.53 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Transportasi dan Pegudangan

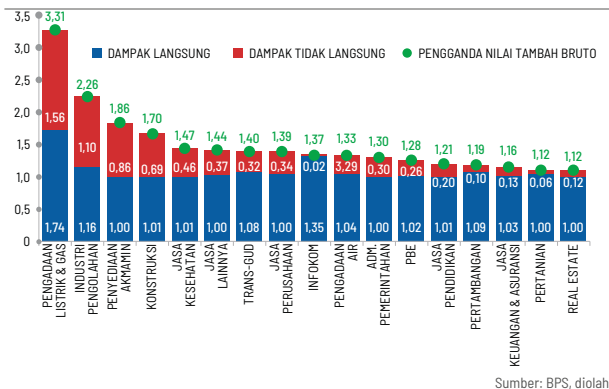
minat terhadap pembiayaan di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (Grafik 1.52), serta SBT kegiatan usaha sektor informasi dan komunikasi dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang tercatat stabil pada 3,32% (Grafik 1.54).



Grafik 1.54 Kegiatan Dunia Usaha Sektor Informasi dan Komunikasi

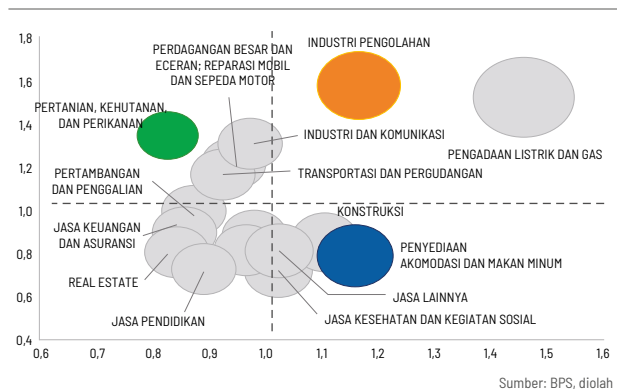
BOKS 1

Fostering Tourism for Development: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Kuat



Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.1 Multiplier Effect LU terhadap PDRB



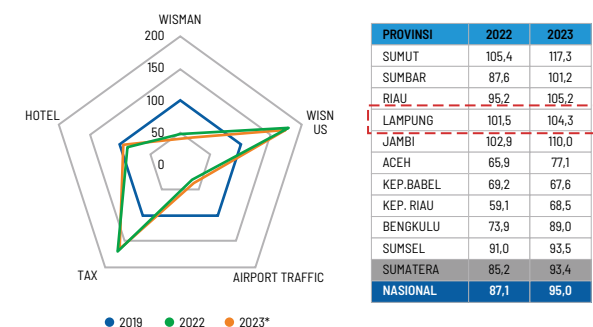
Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.2 Forward dan Backward Linkage LU terhadap PDRB

Memasuki tahun 2024, perekonomian Provinsi Lampung tumbuh melambat disebabkan sektor Pertanian yang berkontraksi cukup dalam. Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan I 2024 tumbuh 3,30% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,40% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berkontraksi 10,94% (yoy) dengan andil -2,82% terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung. Kondisi tersebut tidak terlepas dari fenomena El Nino yang berdampak pada pergeseran siklus tanam dan menyebabkan mundurnya masa panen, terutama padi yang merupakan komoditas pertanian utama Provinsi Lampung. Perubahan iklim memang telah menjadi risiko yang tidak terelakan bagi perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, termasuk Provinsi Lampung. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi sangat

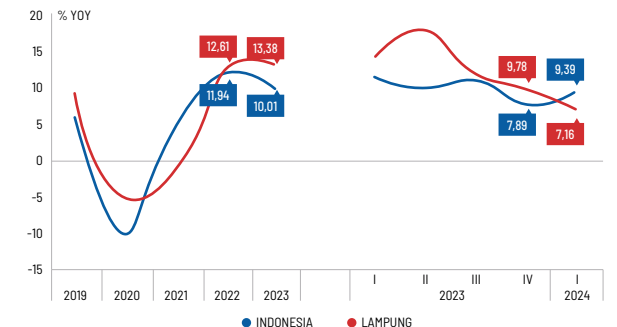
penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Pariwisata berpotensi untuk menjadi sektor pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi Lampung, didukung oleh *backward linkage* yang cukup tinggi dan dampak penggandanya terhadap PDRB yang relatif besar (Grafik B1.1 dan B1.2). Pasca pandemi Covid-19, sektor Pariwisata Provinsi Lampung pulih lebih cepat. Indikator Tourism Recovery Index (TRI) mengindikasikan aktivitas pariwisata Lampung pasca Pandemi Covid-19 telah pulih pada tahun 2022, relatif lebih cepat dibandingkan dengan pemulihan aktivitas pariwisata di wilayah Sumatera dan nasional secara *broadwide* (Grafik B1.3). Dalam perkembangannya, kinerja sektor pariwisata Lampung terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari capaian nasional pada



Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.3 Indikator Tourism Recovery Index Provinsi Lampung



Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.4 Perkembangan LU Akomodasi Makan Minum

	KONDISI EKSISTING	TANTANGAN	PELUANG	REKOMENDASI
ATRAKSI	- Jumlah atraksi wisata yang beroperasi relatif tinggi, tidak berkurang pasca adanya pandemi. - Kepuasan wisatawan di bawah rerata Sumatera	Pemahaman dan implementasi sistem ramah lingkungan di destinasi wisata rendah	- Biaya tiket memasuki destinasi wisata cukup kompetitif, terutama bagi masyarakat <i>middle class</i> - Potensi SDA laut, olahraga air, dan taman budaya flora fauna	Optimalkan atraksi wisata unggulan seperti pantai, olahraga air, dan eksplorasi gajah Lampung dengan penyediaan SOP pariwisata dan perhatikan keramahan lingkungan
AMENITAS	- Ketersediaan pra-sarana dasar cukup baik - Fasilitas jasa dan sarana penunjang atraksi rendah - Kualitas akomodasi mengalami peningkatan. Hadirnya 2 hotel Bintang 5 menambah variasi pilihan akomodasi.	- Ketersediaan fasilitas toilet di destinasi wisata masih rendah - Layanan panduan berwisata bagi wisatawan masih rendah	- Telah dilakukan perluasan jaringan 5G di Lampung pada tahun 2023 - Peluang peningkatan pendidikan kualitas SDM pariwisata tinggi	Utamakan penyediaan jasa dan fasilitas penunjang kenyamanan pada destinasi wisata
AKSES	- Akses memasuki Lampung melalui jalur transportasi darat, laut, dan udara sudah baik. - Jarak antar destinasi wisata relatif dekat.	- Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota masih perlu peningkatan - Bandara Taufik Kemas Krui belum beroperasi optimal sbg penunjang konektivitas wisata <i>water sport</i>	Concern berbagai pihak terhadap perbaikan kualitas infrastruktur di Lampung meningkat, perbaikan jalan dengan <i>dropping dana APBN</i> dilakukan pada tahun 2023	Tingkatkan komitmen, supervisi, dan rumuskan APBD untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung konektivitas antar daerah lokasi destinasi utama dan potensial
PELAKU USAHA	- Jumlah SDM pariwisata masih rendah. - Jumlah SDM Pariwisata dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah masih cukup tinggi	Pemerintah Daerah belum memprioritaskan peningkatan serapan pendidikan vokasi untuk SDM Pariwisata	- SDM Pariwisata Lampung memiliki produktivitas tinggi - Jumlah wadah pendidikan vokasi, SMK, di Lampung relatif tinggi	Optimalkan peran SMK untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata, melalui sosialisasi, kampanye, dan kemitraan
PROMOSI	Eksposur destinasi wisata Lampung pada media <i>online</i> masih rendah	- Promosi Lampung yang dilakukan pada wadah berskala nasional masih rendah - Perlu upaya untuk meningkatkan traffic dan tinjauan destinasi Lampung di platform pencarian populer	- Lokasi geografis Lampung yang strategis menunjang promosi pariwisata secara fisik. - Potensi penyusunan paket wisata, dgn jarak antar destinasi yg dekat - Demografi wisatawan didominasi generasi muda, peluang peningkatan kunjungan wisnus lebih besar	Penyusunan paket-paket pariwisata dengan konten dan sajian yang menarik untuk dipromosikan scr fisik maupun <i>online</i> hingga ke skala nasional

Gambar B1.1 Analisis 3A2P Pengembangan Sektor Pariwisata Lampung

keseluruhan tahun 2022 s.d. 2023. Meski bukan merupakan provinsi dengan kinerja terbaik, sektor pariwisata Provinsi Lampung pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022 tumbuh kuat sebesar 12,61% (yoy) seiring dengan tingginya tingkat penghunian kamar (TPK) dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik (**Grafik B1.4**). Namun demikian, *length of stay* wisatawan di Provinsi Lampung masih tergolong rendah, yaitu hanya 1,56 hari, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian wilayah Sumatera, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap di tingkat nasional yang tercatat 1,64 hari pada tahun 2022 (**Grafik B1.6**). Di samping itu, sektor pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan untuk dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Lampung (**Gambar B1.1**).

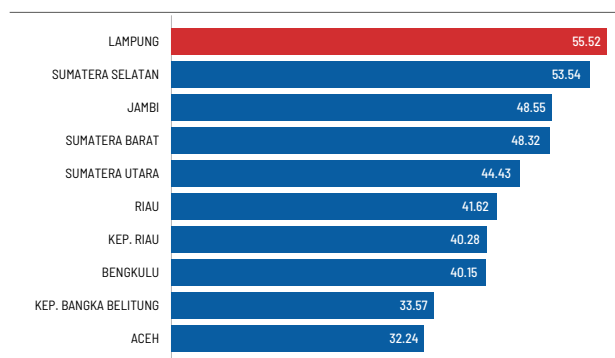
QUALITY OVER QUANTITY: PRIORITAS PENGEMBANGAN PARIWISATA PASCA PANDEMI COVID-19

Perubahan tren pariwisata pasca pandemi Covid-19 perlu menjadi perhatian dalam Upaya merumuskan strategi pengembangan

pariwisata ke depan, salah satunya adalah transformasi model bisnis dari *mass tourism* ke *quality tourism*. Konsep *quality tourism* tidak hanya berorientasi pada kuantitas wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi (*mass tourism*), melainkan lebih berorientasi pada aspek kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal untuk menarik kunjungan wisatawan dengan *spending power* yang lebih tinggi dan *length of stay* yang lebih lama (**Grafik B1.5 dan B1.6**). Pengembangan *quality tourism* di Lampung menjadi urgensi tersendiri di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini, terutama masih rendahnya kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap ekosistem ramah lingkungan (**Grafik B1.7**).

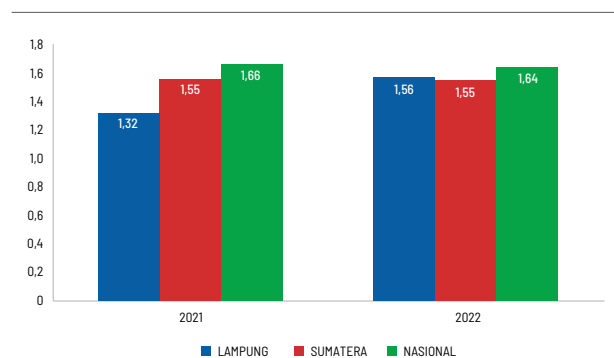
TARGET PROMOSI LEISURE, ATRAKSI MENARIK DAN OPTIMALISASI PROMOSI SECARA DARING...

...menjadi strategi yang perlu didorong sejalan dengan transisi demografi wisatawan ke arah generasi muda (Gen Z dan Milenial). Pergeseran tersebut terlihat dari perubahan demografi wisatawan Provinsi Lampung tahun 2019-2022, dimana pada tahun 2019 mayoritas



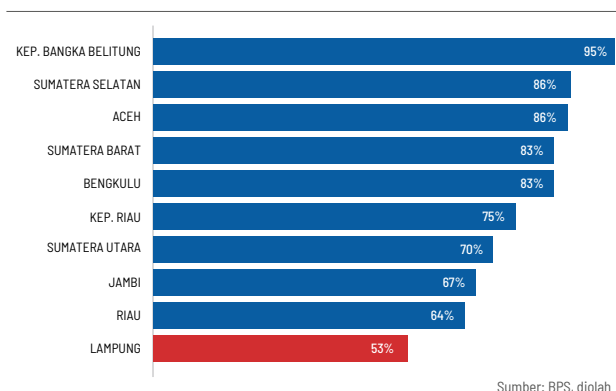
Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.5 Rata-Rata Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang



Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.6 Rata-Rata Lama Menginap Hotel



Sumber: BPS, diolah

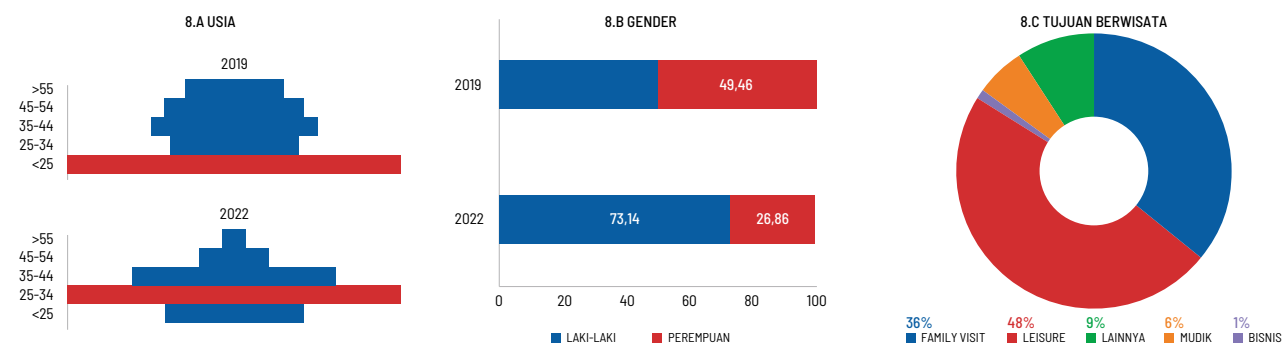
Grafik B1.7 Ketersediaan Sistem Ramah Lingkungan pada Destinasi Wisata Komersil

wisnus berusia di bawah 25 tahun, dengan komposisi gender yang seimbang dan tidak terdapat tujuan khusus dalam berwisata. Pada 2022 mayoritas wisnus berusia 25-34 tahun, didominasi laki-laki, dengan tujuan utama adalah mengunjungi keluarga dan liburan. Dengan demikian *millennial travellers* dapat menjadi target promosi utama dengan pendekatan promosi yang memerhatikan karakteristik dan aspek-aspek yang menjadi perhatian kelompok ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa kelompok wisatawan millennial merupakan pengguna teknologi dan internet aktif yang menjadikan media sosial sebagai preferensi utama dalam menentukan destinasi tujuan, dimana pengalaman unik, otentisitas, kearifan budaya lokal, tujuan *healing*, dan tren media sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan berwisata mereka.¹

OPTIMALISASI POTENSI DESA WISATA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LEBIH IKLUSIF

Daya tarik wisata Lampung juga terkait dengan budaya didukung dengan tumbuhnya berbagai desa wisata. Secara umum, atraksi desa wisata dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) dengan dukungan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2023, terdapat 137 desa wisata dengan 255 atraksi di provinsi Lampung yang tercatat dalam jejaring desa wisata kemenparekraf, dimana jumlah tersebut merupakan yang terbesar ketiga di Sumatera setelah Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Salah satu *success story* pengembangan desa wisata Lampung adalah desa wisata Kelawi yang termasuk dalam 75 besar anugerah desa wisata Indonesia (adwi) 2023 dan berhasil meraih juara 2 untuk kategori desa wisata maju. Dukungan pemerintah melalui pemanfaatan dana desa untuk pengembangan atraksi berbasis alam dan inovasi produk berbasis potensi lokal menjadi *key success* dalam pembangunan pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa Kelawi.

Pengembangan sektor pariwisata akan lebih berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi jika terintegrasi dengan baik dengan sektor lainnya. Dalam hal ini keterkaitan antara sektor basis (pertanian), sekunder (industri pengolahan) dan tersier (pariwisata) perlu diperkuat dan memiliki perencanaan pembangunan yang saling berkaitan dan berjalan secara berkesinambungan. Dengan demikian stabilitas domestik dan eksternal dapat terjaga dalam jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih resilien dan berkelanjutan (gambar B1.2).



Sumber: BPS, diolah

Grafik B1.8 Demografi Wisatawan Domestik Provinsi Lampung

1 Indonesia *Millennial Report* 2024, IDN Research Institute



Gambar B1.2 Keterkaitan Sektor Primer, Sekunder dan Tersier untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

BOKS 2

Menggali Potensi Investasi untuk Mewujudkan I-PRO

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui percepatan realisasi investasi di daerah. Peran sinergi tersebut diwujudkan melalui Investor Relations Unit (IRU) di tingkat pusat, Regional IRU (RIRU) di daerah, dan Global IRU (GIRU) di luar negeri, yang bertujuan untuk menjadi pusat informasi terpadu bagi para investor baik dalam maupun luar negeri tentang pengembangan potensi investasi dan komoditas unggulan daerah.

Provinsi Lampung memiliki 13 (tiga belas) kabupaten dan 2 (dua) kota yang memiliki potensi investasi tersendiri menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Potensi ini meningkatkan peluang bagi Provinsi Lampung untuk dapat meningkatkan realisasi investasi di berbagai sektor. Mengutip data realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2024, Provinsi Lampung berhasil merealisasikan Rp2,7 Triliun nilai investasi atau setara dengan 21,08% dari target realisasi investasi yakni Rp12,96 Triliun. Realisasi investasi ini didominasi oleh sektor Industri Makanan, Listrik, Gas, dan Air, dan Pertambangan. Padahal, Provinsi Lampung juga memiliki keunggulan pada sektor Pertanian, Perkebunan, Tanaman Pangan, Pariwisata, dan sektor lainnya. Hal inilah yang dapat dijadikan potensi dalam mewujudkan peningkatan investasi di Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan nilai realisasi investor di sektor lainnya, Bank Indonesia bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) berkolaborasi menyelenggarakan acara Capacity Building FOILA. Acara ini dihadiri oleh masing-masing PIC FOILA dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menggali potensi dan menyusun proyek investasi agar dapat dipromosikan dengan cara menyusun Investment Project Ready to Offer (I-PRO). Dalam acara ini, KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung memberikan kesempatan kepada para PIC FOILA untuk dapat mengikuti kegiatan seminar terkait penyusunan materi I-PRO dan meningkatkan wawasan terkait pemahaman melakukan investasi secara langsung oleh praktisi serta mengikuti workshop website dalam rangka meningkatkan skill masing-masing PIC FOILA Kabupaten/Kota untuk mempromosikan proyek investasi di daerahnya.

Adapun pada pelaksanaannya, disampaikan bahwa status lahan yang Clean and Clear suatu proyek investasi merupakan hal yang sangat menjadi concern oleh para calon investor. Selain itu, regulasi

dan legalitas yang berkaitan dengan pemerintahan juga bergantung pada status lahan proyek investasi tersebut. Lebih lanjut, kebutuhan investor dalam melihat profitabilitas dan prospek kedepan dari proyek investasi adalah dilihat berdasarkan informasi pada Feasibility Studies dan Masterplan dari proyek investasi. Hal ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh para PIC FOILA agar dapat memahami bahwa proses dalam penanaman modal di suatu proyek investasi dapat dilakukan apabila proyek investasi tersebut termasuk ke dalam klasifikasi I-PRO.

Berkaca pada kesuksesan seorang project owner sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung, penyusunan proyek investasi I-PRO dilakukan dengan berbagai proses dan tidak instan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan skema Creating Shared Value (CSV) dalam mendayagunakan masyarakat lokal dalam mempertahankan eksistensi proyek investasi di daerah. Melalui skema ini, masyarakat lokal secara langsung memiliki andil sebagai small holder yang memiliki peran dalam meningkatkan produktifitas penyusunan proyek investasi khususnya pada proyek investasi dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Untuk mencapai peningkatan perolehan nilai realisasi investasi, perlu diadakannya sounding ke kancah internasional terkait potensi proyek investasi di Provinsi Lampung. Dalam hal ini, PIC FOILA diberikan workshop untuk dapat meningkatkan skillnya dalam memanfaatkan website FOILA sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan masing-masing daerahnya ke kancah internasional. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Bank Indonesia bersama FOILA telah bersinergi dalam melakukan promosi investasi di tingkat Internasional. Dengan adanya Capacity Building FOILA ini, tahun ini akan mempromosikan proyek investasi dengan status I-PRO yang variatif dan diharapkan mampu meningkatkan nilai realisasi investasi di berbagai lini sektor.







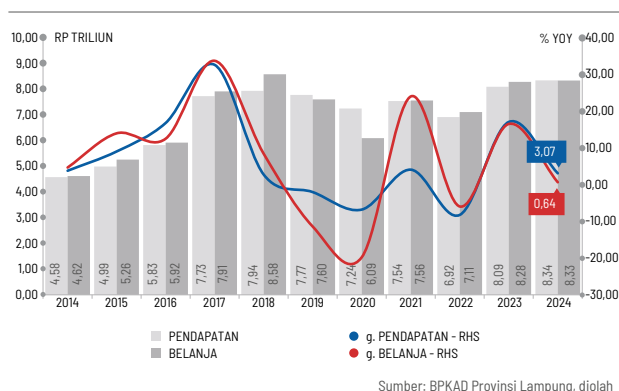
BAB 2

Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mengarahkan kebijakan APBD untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2024, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp8,34 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,33 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp8,09 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,28 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan momentum perekonomian yang terus meningkat serta intensitas program pengendalian inflasi di daerah. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2023, anggaran pendapatan tercatat meningkat 3,07% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,64% (yoy).

Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar Rp22,47 triliun atau menurun sebesar -6,66% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan I 2023 yang sebesar Rp24,08 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 12,40% (Rp2,79 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 11,97%; dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,66%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (4,07%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (3,36%), dan Lampung Timur (2,25%).

Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 mencapai Rp1,76 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -14,62% (yoy) dari Rp2,06 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk periode triwulan I 2024 Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp7,63 triliun, terpantau meningkat sebesar 7,30% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7,11 triliun.



Grafik 2.1 Perkembangan APBD Provinsi Lampung

2.1 APBD PROVINSI LAMPUNG

Pada Tahun 2024, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai **Rp8,34 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,33 triliun untuk anggaran belanja**. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp8,09 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,28 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan momentum perekonomian yang terus meningkat serta intensitas program pengendalian inflasi di daerah. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2023, anggaran pendapatan tercatat meningkat 3,07% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,64% (yoy) (**Grafik 2.1**).

Memasuki triwulan I 2024, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,18 triliun atau mencapai 14,13% dari target penerimaan pendapatan tahun

2024 sebesar Rp8,34 triliun. Pencapaian ini secara kinerja terpantau menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar -21,82% (yoy) (**Tabel 2.1**). Realisasi tersebut didorong oleh realisasi pos penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat menurun sebesar -28,18% (yoy), serta Pendapatan Transfer yang menurun sebesar -12,19% (yoy). Adapun penyumbang terbesar pada komponen PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 17,60% di triwulan I 2024 serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan dengan realisasi sebesar 9%. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 21,20% untuk komponen Pendapatan Pajak Daerah dan 13,60% (yoy) untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan. Selain itu, pada pos Pendapatan Transfer, komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan kinerja realisasi sebesar -11,48% (yoy) dan diikuti pada Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan kinerja realisasi sebesar -94,12% di triwulan I 2024.

Pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 mencapai Rp917,19 miliar atau sebesar 11,01% dari target anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp8,33 triliun. Realisasi anggaran belanja di periode ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya lebih tinggi dari sisi nominal namun lebih rendah dari sisi persentase yaitu sebesar Rp886,22 miliar atau mencapai 12,01% dari target belanja APBD tahun 2023. Realisasi belanja daerah pada periode laporan terutama didorong oleh kinerja penyerapan anggaran pada pos Belanja Operasi sebesar 18,14% (yoy) dengan realisasi Rp596,23 miliar (11,11%) di triwulan I 2024 dibandingkan Rp437,78 miliar (9,41%) pada triwulan I 2023, dan pos Belanja Modal sebesar Rp91,22 miliar (7,71%) di triwulan I 2024 dari Rp41,28 miliar (3,34%) pada triwulan I 2023. Secara rinci,

Tabel 2.1 Struktur Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

URAIAN	APBD 2021	APBD-P 2021	APBD 2022	APBD-P 2022	APBD 2023	APBD-P 2023	APBD 2024	Δ '23 - '24
Pendapatan	7.593,71	7.529,73	6.558,09	6.915,25	7.412,64	8.093,97	8.342,20	3,07
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.337,31	3.337,31	3.447,85	3.784,65	4.146,23	4.808,70	4.936,50	2,66
Pendapatan Pajak Daerah	2.797,56	2.797,56	2.678,86	2.806,00	2.982,80	3.308,84	3.344,12	1,07
Pendapatan Retribusi Daerah	11,43	11,43	8,42	8,45	8,46	6,88	341,16	4.860,10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75,33	75,33	276,86	307,39	375,25	496,14	584,82	17,87
Lain-lain PAD yang Sah	453,00	453,00	483,71	662,82	779,72	996,84	666,40	(33,15)
b. Pendapatan Transfer	4.242,48	4.178,50	3.090,98	3.084,45	3.251,81	3.271,20	3.391,92	3,69
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.213,04	4.149,07	3.062,18	3.062,90	3.224,29	3.235,76	3.354,66	3,67
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	135,37	135,37	175,44	184,78	232,17	231,98	160,12	(30,98)
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.783,41	1.726,30	1.726,30	1.726,30	1.801,10	1.801,10	2.041,22	13,33
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.276,87	2.287,40	1.159,01	1.150,39	1.140,17	1.140,62	1.138,24	(0,21)
- Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	1,44	1,44	50,85	62,06	15,08	(75,70)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29,43	29,43	28,80	21,55	27,52	35,44	37,25	5,13
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,92	13,92	19,26	46,15	14,60	14,08	13,79	(2,06)
Pendapatan Hibah	13,92	13,92	19,26	46,15	14,60	14,08	13,79	(2,06)
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

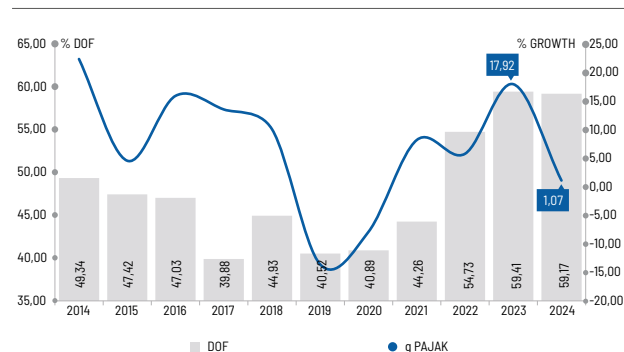
peningkatan kinerja realisasi belanja daerah pada pos Belanja Operasi terutama didorong oleh adanya kenaikan realisasi komponen Belanja Hibah sebesar 808,50% (yoy), dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 32,92% (yoy).

Di sisi lain, realisasi pos Belanja Transfer tercatat sebesar Rp229,74 miliar (13,10%) di triwulan I 2024 dari Rp407,16 miliar (27,81%) pada triwulan I 2023 atau mengalami penurunan kinerja sebesar -52,89% (yoy).

2.1.1 Anggaran Pendapatan Provinsi Lampung

Alokasi anggaran pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp8,34 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,07% (yoy) dibandingkan dengan alokasi pendapatan pada APBD-P 2023 yang sebesar Rp8,09 triliun (Tabel 2.1). Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh kenaikan pagu pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,66% (yoy) dari sebesar Rp4,81 triliun menjadi Rp4,94 triliun pada periode laporan. Kenaikan pagu pada pos tersebut sebesar Rp127,80 miliar dari APBD-P 2023 utamanya disumbang oleh peningkatan pagu Pendapatan Retribusi Daerah dari sebelumnya Rp6,88 miliar menjadi Rp341,16 miliar dan pagu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan dari Rp496,14 miliar menjadi Rp584,82 miliar. Sementara itu pagu pada pos Lain-lain PAD yang Sah menurun dari Rp996,84 miliar menjadi Rp666,40 miliar.

Selain itu, tercatat pula adanya peningkatan pagu pada pos **Pendapatan Transfer sebesar 3,69% (yoy) di periode laporan.** Baik komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan pagu masing-masing menjadi sebesar Rp3,35 triliun (3,67% (yoy)) dan Rp37,25 miliar (5,13% (yoy)).



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 59,41% menjadi 59,17% pada tahun 2024 (Grafik 2.2). Peningkatan anggaran Pendapatan Transfer yang lebih tinggi dibanding anggaran Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor rasio DOF Provinsi Lampung menurun.

2.1.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Lampung

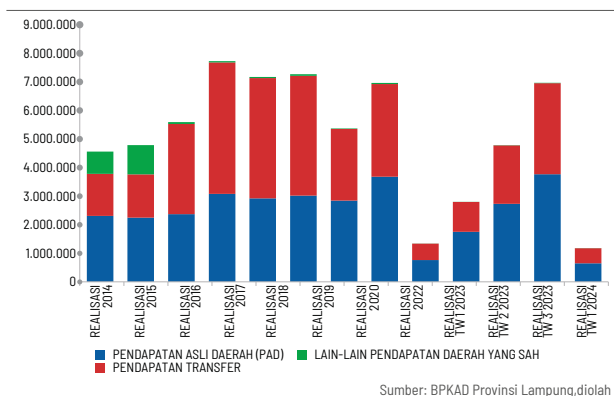
Perkembangan keuangan daerah Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp1,18 triliun atau mencapai 14,13% dari target anggaran pendapatan tahun 2024 yang sebesar Rp8,34 triliun. Pencapaian ini tercatat mengalami penurunan sebesar -21,82% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp1,34 triliun (18,07%) (Tabel 2.2).

Realisasi pendapatan dari komponen PAD pada periode laporan tercatat sebesar Rp651,55 miliar (13,20%), lebih rendah baik dari

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

URAIAN	REALISASI TW I 2023		REALISASI TW II 2023		REALISASI TW II 2023		APBD-P 2023	REALISASI TW IV 2023		APBD-P 2024	REALISASI TW I 2024		% YOY
	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%		RUPIAH	%		RUPIAH	%	
1 Pendapatan	1.339,46	18,07	2.798,77	37,76	4.784,99	64,55	8.093,97	6.964,47	86,05	8.342,20	1.178,52	14,13	(21,82)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	762,00	18,38	1.753,15	42,28	2.729,60	65,83	4.808,70	3.765,57	78,31	4.936,50	651,55	13,20	(28,18)
Pendapatan Pajak Daerah	632,25	21,20	1.516,06	50,83	2.353,86	78,91	3.308,84	3.232,82	97,70	3.344,12	588,57	17,60	(16,97)
Pendapatan Retribusi Daerah	0,92	10,92	2,43	28,77	4,32	51,04	6,88	7,07	102,74	341,16	1,05	0,31	(97,18)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51,02	13,60	51,02	13,60	51,11	13,62	496,14	51,11	10,30	584,82	52,64	9,00	(33,80)
Lain-lain PAD yang Sah	77,80	9,98	183,63	23,55	320,31	41,08	996,84	474,57	47,61	666,40	9,29	1,39	(86,03)
b. Pendapatan Transfer	575,31	17,69	1.041,67	32,03	2.046,95	62,95	3.271,20	3.187,98	97,46	3.391,92	526,96	15,54	(12,19)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571,87	17,74	1.035,93	32,13	2.022,05	62,71	3.235,76	3.155,98	97,53	3.354,66	526,68	15,70	(11,48)
- Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	30,22	13,02	65,24	28,10	88,47	38,11	231,98	183,76	79,21	160,12	0,00	0,00	(100,00)
- Dana Alokasi Umum (DAU)	435,08	24,16	768,59	42,67	1.378,75	76,55	1.801,10	1.801,10	100,00	2.041,22	0,00	0,00	(100,00)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	106,57	9,35	176,67	15,50	529,41	46,43	1.140,62	1.109,06	97,23	1.138,24	0,00	0,00	(100,00)
- Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	25,42	50,00	25,42	50,00	62,06	62,06	100,00	15,08	0,00	0,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	3,44	12,50	5,74	20,85	24,90	90,47	35,44	32,00	90,30	37,25	0,27	0,73	(94,12)
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2,15	14,71	3,95	27,08	8,44	57,81	14,08	10,92	77,55	13,79	0,02	0,13	(99,09)
Pendapatan Hibah	2,15	14,71	3,95	27,08	8,44	57,81	14,08	10,92	77,55	13,79	0,02	0,13	(99,09)
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah



Grafik 2.3 Realisasi dan Target Pendapatan APBD Provinsi Lampung

sisi nominal maupun dari sisi persentase apabila dibandingkan pencapaian pada triwulan I 2023 yang sebesar Rp762,00 miliar (18,38%). Komponen PAD yang secara umum menjadi pendorong utama pertumbuhan keuangan daerah yang menunjang perekonomian regional, pada periode laporan mengalami penurunan kinerja realisasi sebesar -28,18% (yoy), disumbang oleh turunnya kinerja Pendapatan Pajak Daerah (-16,97% (yoy)), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan (-33,80% (yoy)) dan Lain-Lain PAD yang Sah (-86,03% (yoy)).

Pos Pendapatan Retribusi Daerah tercatat mengalami penurunan kinerja realisasi mencapai 97,18% (yoy) atau sebesar 0,31% dari pagu tahun 2024. Namun demikian, penurunan Kinerja pos tersebut lebih disebabkan kenaikan pagu anggaran yang sangat tinggi. Sementara itu, Pos Pendapatan Transfer mengalami penurunan realisasi sebesar -12,19% (yoy), dimana pada triwulan I 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp526,96 miliar (15,54%) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp575,31 miliar (17,69%) (**Grafik 2.3**).

Tabel 2.3 Struktur Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

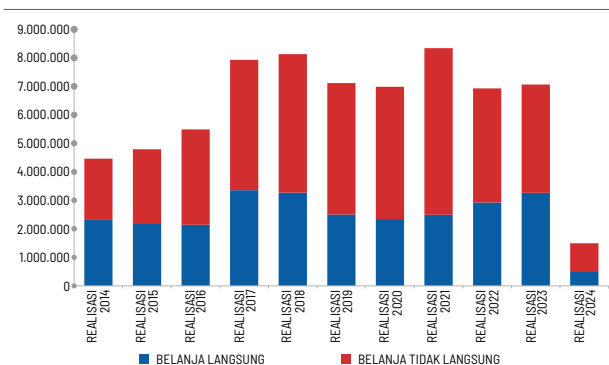
URAIAN	APBD-P 2021	APBD 2022	APBD-P 2022	APBD 2023	APBD-P 2023	APBD-P 2023	Δ '23 - '24
Belanja	7.557,05	7.011,70	7.106,76	7.381,76	7.382,73	8.280,86	0,84
a. Belanja Operasi	5.352,38	4.204,54	4.587,84	4.653,72	4.637,18	5.129,74	4,58
Belanja Pegawai	2.001,14	2.003,66	2.044,92	2.145,05	2.150,00	2.202,10	13,57
Belanja Barang dan Jasa	1.594,90	1.661,51	1.895,52	1.798,32	1.780,00	2.155,36	(6,66)
Belanja Bunga	22,50	25,49	12,83	3,55	3,55	3,11	(100,00)
Belanja Subsidi						2,80	(100,00)
Belanja Hibah	1.728,58	504,46	613,98	692,91	689,74	752,92	12,44
Belanja Bantuan Sosial	5,26	9,42	20,59	13,89	13,89	13,44	(61,83)
b. Belanja Modal	923,70	1.468,30	1.135,98	1.237,43	1.250,02	1.456,70	(18,79)
Belanja Modal Tanah	4,64	0,07	0,00	3,52		1,50	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168,96	180,29	0,00	111,51		157,33	(25,05)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255,71	282,33	0,00	294,74		316,54	(15,82)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	394,14	975,48	0,00	798,91		950,24	(18,32)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32,07	26,93	0,00	28,76		31,09	(29,03)
Belanja Modal Aset Lainnya						-	-
c. Belanja Tidak Terduga	30,00	31,50	20,49	26,57	31,50	23,42	38,68
d. Belanja Transfer	1.250,96	1.307,35	1.362,45	1.464,04	1.464,04	1.671,01	4,94

BPKAD Provinsi Lampung, diolah

2.1.3 Anggaran Belanja Provinsi Lampung

Anggaran belanja Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer secara total mengalami kenaikan pagu pada 2024, dengan total anggaran belanja mencapai Rp8,33 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 0,64% dibandingkan dengan APBD-P 2023 yang sebesar Rp8,28 triliun (Tabel 2.3). Kenaikan pagu belanja daerah didorong oleh naiknya alokasi komponen belanja seperti Belanja Operasi (4,58%; yoy) yang pada tahun 2024 merupakan pos belanja dengan alokasi terbesar. Pos Belanja Transfer turut mengalami peningkatan alokasi yakni sebesar 4,94% (yoy) dari semula sebesar Rp1,67 triliun menjadi Rp1,75 triliun pada APBD 2024. Pos Belanja Tidak Terduga terpantau juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp32,47 miliar atau 38,68% (yoy) dibandingkan APBD-P 2023 sebesar Rp23,42 miliar. Di sisi lain Pos Belanja Modal mengalami penurunan alokasi (-18,79%; yoy) pada APBD 2024 menjadi sebesar Rp1,18 triliun dibandingkan dengan alokasi pada APBD-P 2023 yang sebesar Rp1,46 triliun.

Komponen belanja dengan pangsa terbesar yaitu Belanja Operasi tercatat mengalami peningkatan alokasi sebesar 4,58% (yoy); dari alokasi sebesar Rp5,13 triliun pada APBD-P 2023 menjadi Rp5,36 triliun pada APBD 2024. Kenaikan tersebut didorong oleh penambahan alokasi pada pagu pos Belanja Pegawai yang pada APBD 2024 ini ditetapkan sebesar Rp2,50 triliun dibandingkan dengan Rp2,20 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, serta pos Belanja Hibah yang alokasinya naik menjadi Rp846,2 miliar dari sebelumnya Rp752,92 miliar. Di sisi lain, pada komponen Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Bantuan Sosial tercatat mengalami penurunan alokasi masing-masing sebesar -6,66% (yoy) dan -61,83% (yoy), menjadi Rp2,01 triliun



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.4 Perbandingan Pangsa Komponen Anggaran Belanja Provinsi Lampung

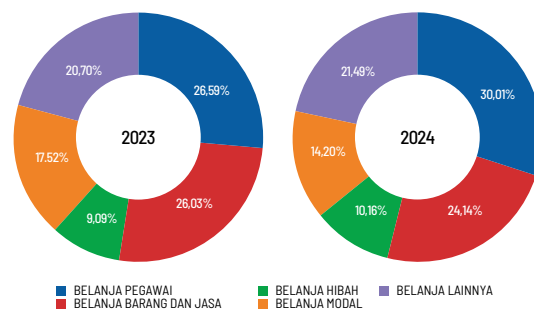
dan Rp5,13 miliar dibandingkan dengan APBD-P 2023 sebesar Rp2,15 triliun dan Rp13,44 miliar.

Alokasi Belanja Modal mencatatkan penurunan sebesar 18,79% (yoy), yang utamanya disumbang oleh penurunan pagu pada pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar -18,32% (yoy).

Selain itu, pos Belanja Modal lainnya seperti Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan turut mengalami penurunan pagu masing-masing sebesar -25,05% (yoy) dan -15,82% (yoy). Sedangkan untuk pos Belanja Modal Tanah pada APBD 2024 tercatat tidak dianggarkan.

2.1.4 Realisasi Belanja Provinsi Lampung

Pada triwulan I 2024, realisasi belanja daerah di Provinsi Lampung mencapai Rp917,19 miliar atau 11,01% dari total pagu anggaran belanja tahun 2024 yang sebesar Rp8,33 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi dari sisi nominal dibanding realisasi triwulan I 2023 yang sebesar Rp886,22 miliar, meskipun lebih rendah dari sisi persentase yang mencapai 12,01% dari pagu APBD-P 2023 (**Tabel 2.4**). Dari empat



Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.5 Proporsi Anggaran Belanja Provinsi Lampung

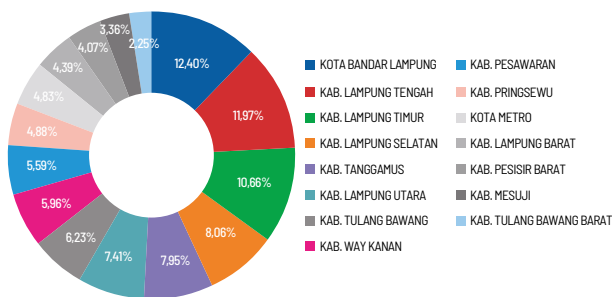
komponen pembentuk anggaran belanja, komponen dengan pangsa terbesar yakni Belanja Operasi mencatatkan realisasi sebesar 11,11% dari total pagu APBD 2024 atau sebesar Rp596,23 miliar; lebih tinggi 18,14% (yoy) dibandingkan dengan serapan anggaran periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,41% atau Rp437,78 miliar.

Komponen utama penyumbang serapan tertinggi Belanja Operasi adalah komponen Belanja Pegawai, dengan tingkat realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp311,27 miliar (12,45%). Pos Belanja Barang dan Jasa terpantau mengalami peningkatan kinerja realisasi sebesar 32,92% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan persentase realisasi terhadap APBD 2024 sebesar 9,73% atau Rp195,84 miliar. Pos belanja lainnya dengan pangsa realisasi terbesar secara nominal yaitu Belanja Transfer sebesar Rp229,74 miliar atau 13,10% dari pagunya pada APBD 2024, menurun sebesar -52,89% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2023 sebesar Rp407,16 miliar atau 27,81% dari pagu APBD-P 2023.

Tabel 2.4 Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung (dalam Miliar Rp)

URAIAN	REALISASI TW I 2023		REALISASI TW II 2023		REALISASI TW III 2023		APBD-P 2023	REALISASI TW IV 2023		REALISASI TW I 2024		% yoy
	RUPIAH	%	RUPIAH	%	RUPIAH	%		RUPIAH	%	RUPIAH	%	
Belanja	886,22	12,01	2.354,41	31,89	4.220,85	57,17	8.280,86	7.049,14	85,13	917,19	11,01	(8,33)
a. Belanja Operasi	437,78	9,41	1.576,39	33,87	2.749,71	59,30	5.129,74	4.627,56	90,21	596,23	11,11	18,14
Belanja Pegawai	296,26	13,81	972,94	45,36	1.467,32	68,25	2.202,10	2.066,22	93,83	311,27	12,45	(9,89)
Belanja Barang dan Jasa	131,70	7,32	532,02	29,58	1.042,31	58,56	2.155,36	1.971,80	91,48	195,84	9,73	32,92
Belanja Bunga	1,76	49,73	3,11	87,75	3,11	87,75	3,11	3,11	100,00	0,00	-	(100,00)
Belanja Subsidi							2,80	2,80	100,00	0,00	-	-
Belanja Hibah	8,03	1,16	68,19	9,84	236,76	34,33	752,92	570,23	75,74	89,08	10,52	808,50
Belanja Bantuan Sosial	0,03	0,25	0,12	0,88	0,21	1,52	13,44	13,40	99,70	0,03	0,58	133,24
b. Belanja Modal	41,28	3,34	176,71	14,28	492,93	39,43	1.456,70	1.208,11	82,94	91,22	7,71	131,19
c. Belanja Tidak Terduga	0,00	-	2,58	9,73	2,70	8,57	23,42	2,79	11,94	0	-	-
d. Belanja Transfer	407,16	27,81	598,73	40,90	975,50	66,63	1.671,01	1.210,67	72,45	229,74	13,10	(52,89)

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Lampung, diolah



Grafik 2.6 Pangsa Anggaran Belanja Kab/Kota

2.2 BELANJA APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

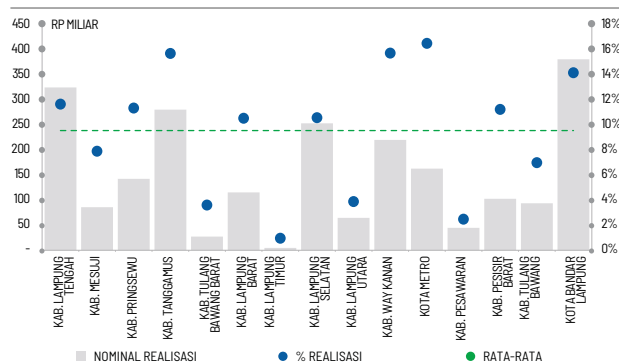
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp22,47 triliun** atau menurun sebesar **-6,66% (yoy)** dibandingkan anggaran belanja triwulan I 2023 yang sebesar **Rp24,08 triliun**. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 12,40% (Rp2,79 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 11,97%; dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,66%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (4,07%), Kabupaten Tulang Bawang Barat (3,36%), dan Lampung Timur (2,25%) (**Grafik 2.6**).

Realisasi belanja APBD dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mencapai Rp2,32 triliun atau 10,31% terhadap total anggaran, dengan rata-rata realisasi sebesar 9,60% (Grafik 2.8). Adapun secara nominal realisasi tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung dengan total realisasi pada triwulan I 2024 sebesar Rp382,89 miliar, diikuti oleh Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan, dengan capaian realisasi masing-masing sebesar Rp326,45 miliar, Rp281,87 miliar, dan Rp254,56 miliar. Sedangkan dari sisi persentase, realisasi terbesar dimiliki oleh Kota Metro yang tercatat sebesar 16,59%, diikuti Kabupaten Way Kanan (15,81%), Kabupaten Tanggamus (15,78%), Kota Bandar Lampung (14,23%), Kabupaten Lampung Tengah (11,72%), Kabupaten Pringsewu (11,40%), dan Kabupaten Pesisir Barat (11,30%).

2.3 PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG

2.3.1 Penerimaan

Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 mencapai Rp1,76 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -14,62% (yoy) dari Rp2,06 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Negara tersebut bersumber dari penerimaan



Sumber: BPKAD Provinsi Lampung, diolah

Grafik 2.7 Realisasi Belanja per Kab/Kota Triwulan I 2024

perpajakan (75,42%) serta penerimaan negara bukan pajak (24,58%). Pada triwulan I 2024, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp1,33 triliun atau mengalami perlambatan realisasi sebesar -24,21% (yoy) dari Rp1,75 triliun pada triwulan I 2023. Sementara itu, komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mencatatkan realisasi sebesar Rp432,89 miliar; meningkat sebesar 39,53% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp310,25 miliar.

Secara lebih rinci, komponen Penerimaan Perpajakan didominasi oleh Pendapatan Pajak Dalam Negeri utamanya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) (pangsa 58,53%) yang terealisasi sebesar Rp777,47 miliar pada triwulan I 2024, diikuti dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp511,07 miliar (pangsa 38,48%). Sementara itu, pada penerimaan luar negeri yang berasal dari Pajak Perdagangan Internasional pada triwulan I 2024 belum mencatatkan realisasi bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp343,60 miliar.

2.3.2 Belanja

Untuk periode triwulan I 2024 Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp7,63 triliun, terpantau meningkat sebesar 7,30% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7,11 triliun. Komponen penyumbang realisasi arus keluar belanja terbesar bersumber dari pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp5,23 triliun atau sebesar 68,53% dari keseluruhan total Belanja Negara Provinsi Lampung. Realisasi ini tercatat melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,57 triliun. Di sisi lain, pos Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan serapan sebesar 56,59% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp2,40 triliun pada triwulan I 2024 dibandingkan dengan triwulan I 2023 yang sebesar Rp1,53 triliun. Penyumbang terbesar pada pos ini antara lain pada Belanja Barang yang terealisasi sebesar Rp1,18 triliun dan Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp1,06 triliun pada triwulan I 2024. Sementara itu, pos Belanja Modal pada triwulan I 2024 mencatatkan realisasi sebesar Rp144,13 miliar, menurun 11,04% (yoy) dibandingkan triwulan I tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp162,03 miliar.

Tabel 2.5 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Hibah Negara

LAPORAN ARUS KAS MASUK	TW I TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW II TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW III TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW IV TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW I TAHUN 2024 (Miliar Rp)	% Δ TW I 2023 - 2024 (yoy)
Pendapatan Negara & Hibah	2.062,87	4.457,36	7.055,40	10.176,92	1.761,22	(14,62)
Penerimaan Perpajakan	1.752,62	3.813,15	5.940,61	8.704,11	1.328,32	(24,21)
- Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.409,02	3.218,22	5.186,22	7.687,66	1.328,32	(5,73)
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	740,80	1.671,65	2.526,43	3.621,89	777,47	4,95
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	637,10	1.427,68	2.438,41	3.785,91	511,07	(19,78)
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	3,24	58,22	109,36	130,08	0,85	(73,80)
4) Pendapatan BPHTB	-	-	-	-	-	-
5) Pendapatan Cukai	0,15	0,49	1,33	3,55	2,58	1.666,99
6) Pendapatan Pajak Lainnya	27,74	55,94	87,57	146,23	28,01	0,96
7) Pendapatan Penagihan Bunga Pajak	-	4,24	23,11		8,35	-
- Pendapatan Pajak Perdagangan Intl.	343,60	594,93	754,39	1.016,45		(100,00)
1) Pendapatan Bea Masuk	108,36	200,91	286,87	504,16		(100,00)
2) Pendapatan Bea Keluar	235,23	394,02	467,52	512,29		(100,00)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	310,25	644,01	1.112,29	1.472,81	432,89	39,53
Penerimaan Hibah	-	0,20	2,50	-	-	-

Sumber: Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, diolah

Tabel 2.6 Laporan Arus Kas Keluar di Provinsi Lampung

LAPORAN ARUS KAS MASUK	TW I TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW II TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW III TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW IV TAHUN 2023 (Miliar Rp)	TW I TAHUN 2024 (Miliar Rp)	% Δ TW I 2023 - 2024 (yoy)
Belanja	7.107,44	13.983,57	22.102,21	31.704,50	7.626,39	7,30
Belanja Pegawai Pusat	1.532,48	3.815,55	6.243,03	10.234,02	2.399,68	56,59
Belanja Pegawai	742,69	1.968,98	2.809,01	3.782,84	1.058,54	42,53
Belanja Barang	623,67	1.496,12	2.724,29	4.901,78	1.176,66	88,67
Belanja Modal	162,03	333,13	679,09	1.511,22	144,13	(11,04)
- Belanja Modal Tanah	-	0,61	6,72	8,52	-	-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,70	33,46	67,08	184,99	16,26	18,66
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,93	67,83	129,42	286,57	32,74	17,23
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108,75	204,83	418,19	814,51	83,25	(23,45)
- Belanja Modal Lainnya	11,16	20,80	27,66	44,02	11,28	1,09
- Belanja Modal Badan Layanan Umum	0,49	5,59	30,02	172,61	0,61	25,38
Belanja Bantuan Sosial	4,09	17,32	30,64	38,18	20,35	397,35
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	5.574,96	10.168,02	15.859,18	21.470,48	5.226,71	(6,25)

Sumber: Kanwil Perbendaharaan Provinsi Lampung, diolah





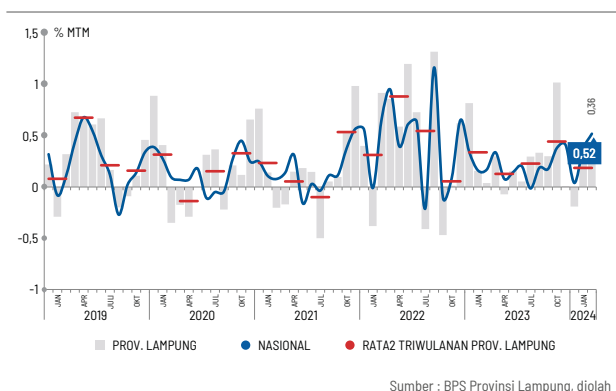
BAB 3

Perkembangan Inflasi

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan stakeholder utama lainnya melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan di triwulan I 2024. Inflasi tahunan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih berada pada sasaran target inflasi nasional $2,5\% \pm 1,0\%$. Inflasi tercatat sebesar $3,45\%$ (yoy), stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya $3,47\%$ (yoy). Inflasi yang masih dalam sasaran target ini menunjukkan eratnya sinergi nyata antara kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, perubahan cuaca serta pergeseran musim tanam. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar $3,05\%$ (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh gejolak harga pangan akibat mundurnya masa tanam. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil $2,64\%$ dengan nilai inflasi $8,23\%$ (yoy).

Inflasi bulanan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar $0,36\%$ (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2023 yang mencatat inflasi sebesar $0,01\%$ (mtm). Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan I 2024 dibandingkan periode sebelumnya khususnya disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Dalam menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2024, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersa dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga. dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.1 Inflasi Lampung dan Nasional

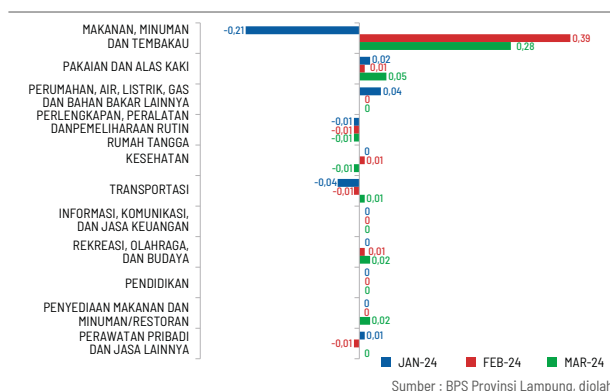
3.1 INFLASI UMUM GABUNGAN DUA KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

3.1.1 Inflasi Bulanan

Rata-rata IHK gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2023 yang mencatat inflasi sebesar 0,44% (mtm) (Grafik 3.1). Secara garis besar, melandainya tekanan inflasi sepanjang triwulan I 2024 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan terjaganya tekanan inflasi pada hampir seluruh kelompok (Grafik 3.2). Walaupun demikian, terjadi peningkatan inflasi bulanan khususnya pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada bulan Februari dan Maret 2024. Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga pangan yang terjadi akibat mundurnya masa panen sebagai dampak iklim El Nino pada akhir tahun 2023.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Januari 2024 tercatat mengalami deflasi 0,19% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Desember 2023 yang mengalami inflasi 0,01% (mtm) dan rata-rata inflasi bulan Januari pada 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat mengalami inflasi 0,66% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Januari 2024 tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,57% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada bulan Januari 2024 didorong oleh melambatnya harga pada beberapa komoditas seperti: cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, bensin, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing secara bulanan sebesar -0,136%; -0,086%; -0,064%; -0,039%; dan -0,026%. Berlanjutnya penurunan harga aneka cabai dipengaruhi oleh masuknya periode panen di Mesuji dan sejalan dengan normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru. Selain itu, intensitas sinergi program stabilisasi harga TPID se-Provinsi Lampung pada Januari 2024 semakin intensif dengan pelaksanaan sidak pasar rutin, pengecekan pasokan pada gudang distributor, serta pelaksanaan operasi pasar aneka cabai yang disertai pemberian subsidi Rp10.000/kg melalui realisasi dana



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.2 Sumbangan Inflasi Bulanan Januari, Februari, Maret 2024

Bantuan Tidak Terduga (BTT). Lebih lanjut, penurunan harga daging ayam ras dipengaruhi kondisi *oversupply* (surplus 8.841 ton) seiring dengan peningkatan produksi korporasi besar.

Di sisi lain, pada bulan Januari 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, antara lain bawang putih, kontrak rumah, beras, susu cair kemasan, dan cumi-cumi dengan andil masing-masing secara bulanan sebesar 0,04%; 0,03%; 0,03%; 0,02%; dan 0,01%. Kenaikan harga komoditas makanan dan minuman menjadi penyumbang utama inflasi pada Januari 2024. Kenaikan harga bawang putih dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari petani pada kondisi cuaca yang tidak menentu serta tingginya harga di tingkat importir yang dapat mencapai Rp38.500/kg di tengah permintaan yang cenderung stabil. Sementara, kenaikan kontrak rumah sejalan dengan tren historisnya dimana kenaikan didorong oleh penyesuaian harga pada awal tahun. Kenaikan harga beras didorong oleh masih berlanjutnya faktor *demand pull* dari pulau Jawa namun dengan dampak yang lebih rendah sejalan dengan penurunan intensitas El Nino, serta pergeseran panen raya menjadi akhir triwulan I 2024.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Februari 2024 tercatat mengalami inflasi 0,39% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode Januari 2024 yang mengalami deflasi 0,19% (mtm). Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung bulan Februari 2024 tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,75% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Februari 2024 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan cabai rawit dengan andil secara bulanan masing-masing sebesar 0,31%; 0,15%; 0,06%; 0,04%; dan 0,04%. Peningkatan harga beras didorong oleh penurunan pasokan sejalan dengan pergeseran masa tanam akibat El Nino pada tahun 2023 yang berimplikasi pada mundurnya masa panen. Di samping itu, kelangkaan stok beras di sejumlah pasar modern turut memengaruhi kenaikan harga beras. Kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh penurunan pasokan di sejumlah wilayah sentra

Tabel 3.1 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Januari 2024

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BAWANG PUTIH	0,04	CABAI MERAH	(0,14)
KONTRAK RUMAH	0,03	CABAI RAWIT	(0,09)
BERAS	0,03	DAGING AYAM RAS	(0,06)
SUSU CAIR KEMASAN	0,02	BENSIN	(0,04)
CUMI-CUMI	0,01	TELUR AYAM RAS	(0,03)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

produksi (Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, dan Pringsewu) akibat serangan jamur dan hama pada saat musim hujan. Di samping itu, kenaikan harga aneka cabai di Lampung juga turut dipengaruhi pasokan cabai rawit dari Sukabumi, selaku salah satu pemasok utama cabai untuk Provinsi Lampung. Kenaikan harga telur dan daging ayam ras dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak, dimana harga jagung pakan pada Februari yang meningkat menjadi Rp6.729,00 dari Rp6.537,00 pada bulan sebelumnya.

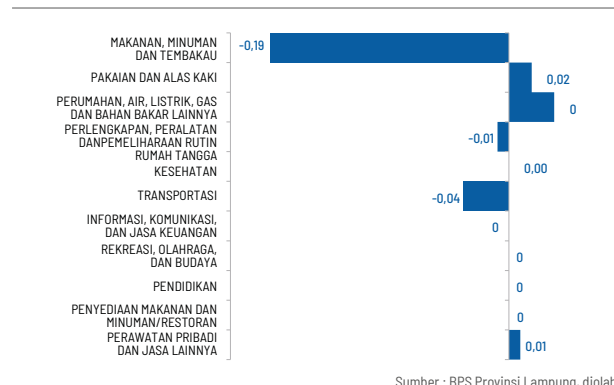
Di sisi lain, pada bulan Februari 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, antara lain tomat, bawang putih, bawang merah, kacang panjang, dan cumi-cumi dengan andil secara bulanan masing-masing secara bulanan sebesar -0,08%; -0,04%; -0,03%; -0,03%; dan -0,02%. Penurunan harga komoditas tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan pada periode panen di beberapa sentra produksi di tengah permintaan yang stabil dan kenaikan kuota impor khusus bawang putih menjelang HBKN Ramadhan. Harga bawang merah pada Februari tercatat mengalami penurunan menjadi Rp27.500,00 dari Rp35.000,00 pada bulan sebelumnya.

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan di Provinsi Lampung bulan Maret 2024 tercatat mengalami inflasi 0,36% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode Februari 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,39% (mtm). Tingkat inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi gabungan di Provinsi Lampung bulan Maret pada 3 (tiga) tahun terakhir dan tingkat inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 0,44% (mtm) dan 0,52% (mtm). Secara tahunan, IHK gabungan di Provinsi Lampung bulan Maret 2024 tercatat mengalami inflasi 3,45% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Sumatera dan nasional yang masing-masing tercatat sebesar 3,47% (yoy) dan 3,05% (yoy).

Tabel 3.2 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Februari 2024

KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
BERAS	0,31	TOMAT	(0,08)
CABAI MERAH	0,15	BAWANG PUTIH	(0,04)
TELUR AYAM RAS	0,06	BAWANG MERAH	(0,03)
DAGING AYAM RAS	0,04	KACANG PANJANG	(0,03)
CABAI RAWIT	0,04	CUMI-CUMI	(0,02)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

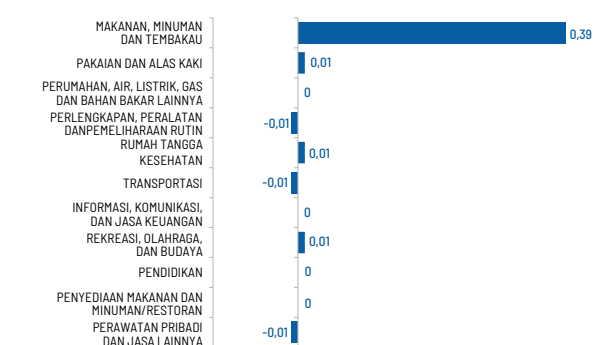


Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.3 Sumbangan Inflasi Bulanan Januari 2024

Dilihat dari sumbernya, inflasi pada bulan Maret 2024 didorong oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti: daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, ayam hidup, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing secara bulanan sebesar 0,12%; 0,11%; 0,09%; 0,07%; dan 0,05%. Peningkatan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan ayam hidup terutama didorong oleh kenaikan harga pakan ternak dan akselerasi permintaan pada periode HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Adapun kenaikan harga bawang putih berasal dari peningkatan harga di tingkat distributor akibat meningkatnya harga beli dari negara asal impor, terutama Tiongkok.

Di sisi lain, pada bulan Maret 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, antara lain cabai merah, beras dan cumi-cumi dengan andil masing-masing -0,19%; -0,13%; dan -0,03%. Penurunan harga cabai merah sejalan dengan masuknya periode panen di beberapa daerah produsen cabai di Lampung dan panen raya di Sukabumi sebagai salah satu daerah pemasok cabai merah terbesar untuk Lampung. Adapun penurunan harga beras didorong oleh surplus gabah sejalan dengan masuknya periode panen pada Maret 2024. Sementara itu, penurunan harga cumi-cumi sejalan dengan terjaganya pasokan di tengah kondisi cuaca yang lebih kondusif. Lebih lanjut, terjaganya stabilitas harga pada Maret 2024 turut didukung oleh semakin intensifnya sinergi TPID se-Provinsi Lampung menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, terutama melalui pelaksanaan



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.4 Sumbangan Inflasi Bulanan Februari 2024

Tabel 3.3 Lima Komoditas Inflasi & Deflasi Maret 2024

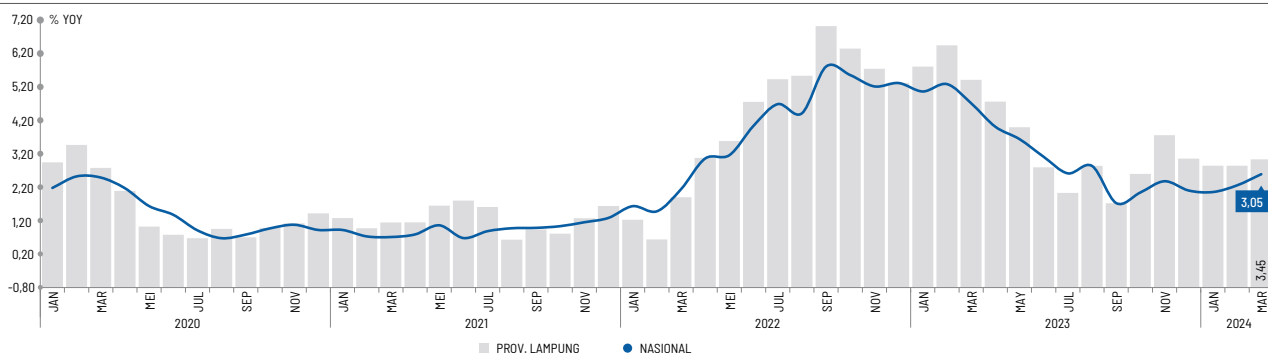
KOMODITAS	ANDIL	KOMODITAS	ANDIL
DAGING AYAM RAS	0,12	CABAI MERAH	(0,19)
TELUR AYAM RAS	0,11	BERAS	(0,13)
BAWANG PUTIH	0,09	CUMI-CUMI	(0,03)
AYAM HIDUP	0,07	PARFUM	(0,02)
KOPI BUBUK	0,05	PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT	(0,01)

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

sidak pasar, pengecekan pasokan pada gudang distributor, serta pelaksanaan operasi pasar beras dan aneka cabai.

3.1.2 Inflasi Tahunan

Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,45 % (yoy), stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,47% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,06% (yoy) (Grafik 3.6). Meningkatnya tekanan Inflasi IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung di triwulan I 2024 ini disebabkan oleh tingginya harga pangan akibat mundurnya masa panen. Secara



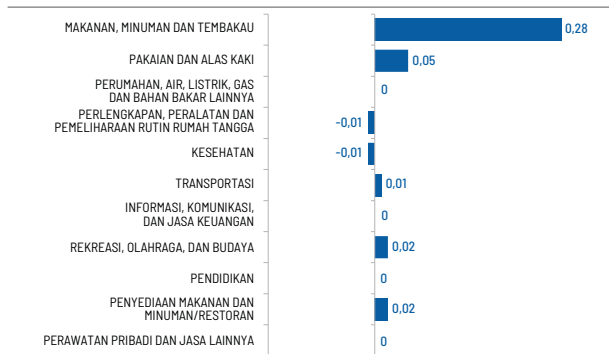
Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Lampung dan Nasional

Tabel 3.4 Inflasi Bulanan Menurut Kelompok (pangsa % mtm)

NO	KELOMPOK INFLASI	JAN-24	FEB-24	MAR-24
UMUM		(0,19)	0,39	0,36
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	(0,21)	0,39	0,28
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,02	0,01	0,05
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,04	-	-
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	(0,01)	(0,01)	(0,01)
5	KESEHATAN	-	0,01	(0,01)
6	TRANSPORTASI	(0,04)	(0,01)	0,01
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-	-	-
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	-	0,01	0,02
9	PENDIDIKAN	-	-	-
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	-	-	0,02
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,01	(0,01)	-

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 3.5 Sumbangan Inflasi Bulanan Maret 2024

tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,64% dengan nilai inflasi 8,23% (yoy).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terpantau mengalami penurunan tekanan inflasi yaitu sebesar 8,23%(yoy) pada triwulan I 2024, lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 9,36% (yoy). Pada triwulan I 2024, kelompok Makanan, Minuman,

Tabel 3.5 Andil Inflasi Tahunan Menurut Kelompok (% yoy)

NO	KELOMPOK INFLASI	TWI 2023	TWII 2023	TWIII 2023	TWIV 2023	TWI 2024
UMUM		5,59	3,24	2,27	3,47	3,45
1	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	1,88	0,43	1,43	2,77	2,64
2	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	0,28	0,28	0,11	0,09	0,24
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	0,29	0,27	0,16	0,12	0,10
4	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	0,15	0,13	0,09	0,11	0,02
5	KESEHATAN	0,08	0,05	0,03	0,03	0,03
6	TRANSPORTASI	1,86	1,19	0,05	-0,04	0,03
7	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
8	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	0,08	0,06	0,03	0,03	0,02
9	PENDIDIKAN	0,46	0,45	0,19	0,19	0,18
10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	0,25	0,21	0,09	0,08	0,08
11	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	0,31	0,20	0,12	0,09	0,12

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.6 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Makanan, Minuman Non Alkohol & Tembakau (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI(% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI(% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
MAKANAN (2,33%)						
1	BERAS	26,01	1,01	BAWANG MERAH	-9,34	-0,10
2	BAWANG PUTIH	27,72	0,22	MINYAK GORENG	-2,91	-0,04
3	DAGING AYAM RAS	12,48	0,17	CUMI-CUMI	-17,02	-0,04
MINUMAN NON ALKOHOL (0,12%)						
1	KOPI BUBUK	19,78	0,13	AIR KEMASAN	-2,42	-0,02
ROKOK DAN TEMBAKAU (0,19%)						
1	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	4,15	0,11			
2	SIGARET KRETEK TANGAN (SKT)	3,15	0,05			
3	SIGARET PUTIH MESIN (SPM)	7,10	0,03			

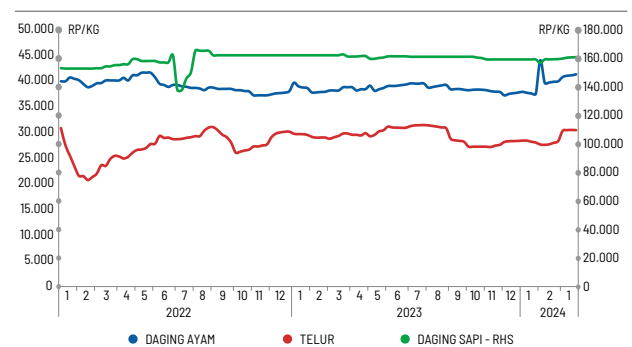
Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

dan Tembakau merupakan kelompok penyumbang inflasi dengan andil terbesar pertama, yaitu 2,64% (yoy).

Dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, sub kelompok makanan merupakan penyumbang inflasi dengan andil sebesar (2,33%). Komoditas utama yang penyumbang tekanan inflasi pada sub kelompok tersebut antara lain beras (1,01%), bawang putih (0,22%)

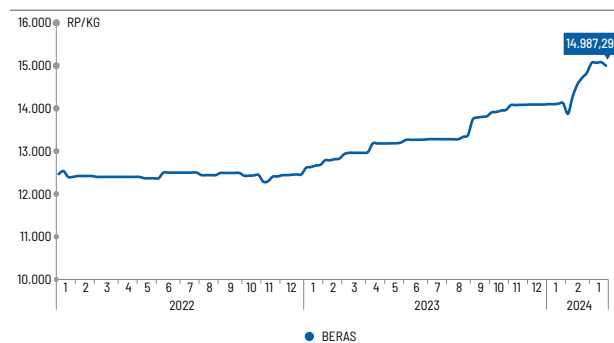
dan daging ayam ras (0,17%). Peningkatan tekanan Inflasi pada sub kelompok ini didorong oleh masih tingginya harga gabah baik gabah kering giling (GKG) ataupun gabah kering panen (GKP) dampak mundurnya puncak panen raya.

Di sisi lain, tekanan inflasi pada sub kelompok makanan tertahan oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti bawang merah, minyak goreng, dan cumi-cumi dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,10%, -0,04%, dan -0,04%. Penurunan harga bawang merah disebabkan oleh disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan pasokan yang terjaga khususnya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Brebes.



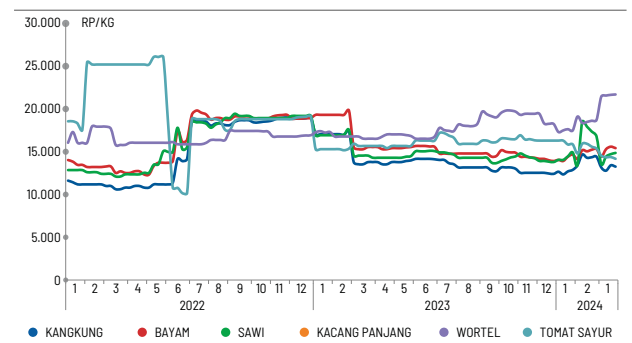
Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.9 Perkembangan Harga Daging dan Telur



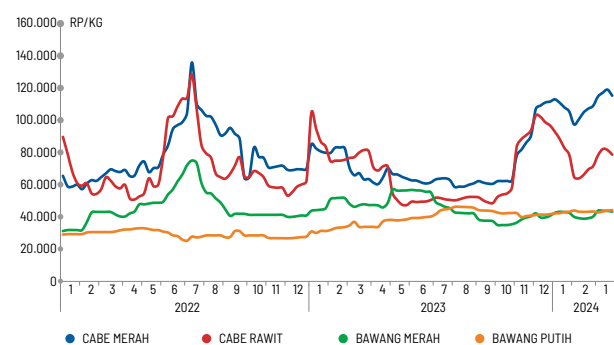
Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.7 Perkembangan Harga Beras



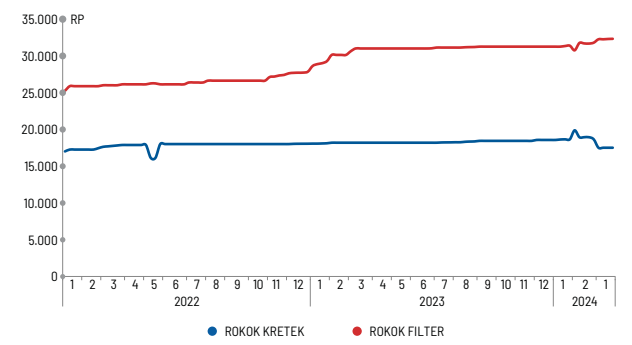
Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Sayur Sayuran



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Bumbu-bumbuan



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.11 Perkembangan Harga Rokok

Tabel 3.7 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Pendidikan (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI (0,06%)						
1	TAMAN KANAK KANAK	10,02	0,03			
2	SEKOLAH DASAR	3,86	0,03			
PENDIDIKAN MENENGAH (0,07%)						
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS	4,31	0,06			
2	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0,86	0,01			
PENDIDIKAN TINGGI (0,04%)						
1	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	1,61	0,04			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Kelompok Pendidikan

Pada triwulan I 2024, kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,06% tercatat mengalami inflasi sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi pada kelompok pendidikan terutama didorong oleh inflasi pada sub kelompok pendidikan dasar dan anak usia dini dengan andil (0,06%), sub pendidikan menengah dengan andil (0,07%), dan sub kelompok pendidikan tinggi dengan andil (0,04%). Kenaikan harga tercatat disumbang oleh sekolah menengah atas dan akademi/ perguruan tinggi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,31% (yoy) dan 1,61% (yoy) (Tabel 3.7).

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,97% dengan andil sebesar 0,12%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi 1,57% (yoy) dengan andil sebesar 0,09%. Komoditas pendorong tekanan inflasi pada kelompok ini bersumber dari peningkatan harga pada komoditas pembalut wanita, pasta gigi, sabun mandi cair, dan emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,02% (yoy); 0,02% (yoy); 0,01% (yoy); dan 0,09% (yoy). Peningkatan harga emas perhiasan mengikuti perkembangan harga emas global dampak pengetatan kebijakan moneter sejumlah negara

Tabel 3.8 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PERAWATAN PRIBADI (0,04%)						
1	PEMBALUT WANITA	9,22	0,02	PARFUM	-5,92	-0,03
2	PASTA GIGI	4,35	0,02	SABUN MANDI	-2,23	-0,01
3	SABUN MANDI CAIR	5,47	0,01	HAND BODY LOTION	-3,05	-0,010
PERAWATAN PRIBADI LAINNYA (0,08%)						
1	EMAS PERHIASAN	15,39	0,09	POPOK BAYI SEKALI PAKAI / DIAPERS	-1,93	-0,01

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Tabel 3.9 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN (0,08%)						
1	KUE KERING BERMINYAK	2,22	0,01			
2	MIE	1,48	0,01			
3	NASI DENGAN LAUK	0,46	0,01			

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

maju, sedangkan kenaikan harga beberapa komoditas *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) disebabkan oleh peningkatan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1445 H (Tabel 3.8).

Kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 0,93% (yoy) dengan andil sebesar 0,08%, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV 2023 yang sebesar 0,98% (yoy), dengan andil sebesar 0,08%. Tekanan inflasi yang terjadi pada sub kelompok jasa pelayanan makanan dan minuman terutama berasal dari peningkatan harga pada komoditas kue kering berminyak, mie, serta mie dengan lauk dengan andil semua komoditas sebesar 0,01% (yoy) (Tabel 3.9). Peningkatan tekanan Inflasi pada kelompok penyedia makanan dan minuman/ restoran disebabkan oleh imbas dari peningkatan harga komoditas beras serta meningkatnya permintaan kue kering menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 1445 H.

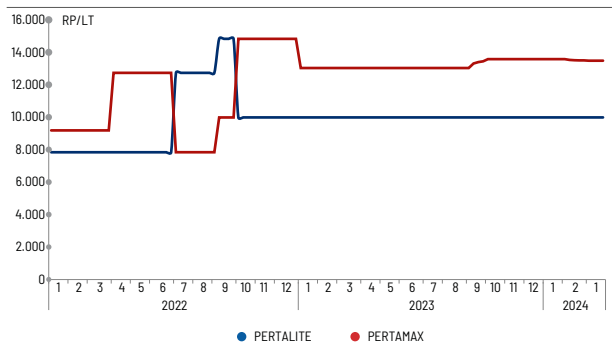
Kelompok Transportasi

Kelompok transportasi pada periode triwulan I 2024 tercatat kembali mengalami inflasi sebesar 0,28% (yoy) dengan andil sebesar 0,03%, setelah pada triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,27% (yoy) dengan andil sebesar -0,04% (Tabel 3.10). Inflasi pada kelompok tersebut utamanya disumbang oleh sub

Tabel 3.10 Sumbangan Inflasi dan Deflasi Kelompok Transportasi (% yoy)

NO	KOMODITAS INFLASI	INFLASI (% YOY)		KOMODITAS DEFLASI	INFLASI (% YOY)	
		PERUBAHAN	ANDIL		PERUBAHAN	ANDIL
PEMBELIAN KENDARAAN (0,02%)						
1	MOBIL	0,81	0,01			
2	SEPEDA MOTOR	0,52	0,01			
PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI (0,05%)						
1	TARIF JALAN TOL	52,29	0,03	BENSIN	-0,38	-0,02
2	PEMELIHARAAN/ SERVICE	1,59	0,01			
3	PERBAIKAN RINGAN KENDARAAN	4,00	0,01			
JASA ANGKUTAN PENUMPANG (-0,03%)						
1	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	10,35	0,010	ANGKUTAN UDARA	-24,82	-0,05

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah



Sumber: SPH Bank Indonesia

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Bensin

kelompok pengoperasian peralatan transportasi, utamanya tarif jalan tol, pemeliharaan/service, dan perbaikan ringan kendaraan yang masing-masing menyumbang inflasi sebesar 0,03% (yoy), 0,01% (yoy), dan 0,01% (yoy). Peningkatan pada sub kelompok tersebut utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pasca HBKN Natal dan Tahun baru serta HBKN Ramadan dan Idulfitri. Di sisi lain, peningkatan lebih tinggi tertahan oleh menurunnya harga angkutan udara sejalan dengan meningkatnya armada pesawat di tengah melandainya harga avtur dunia.

3.1.3 Ekspektasi Inflasi

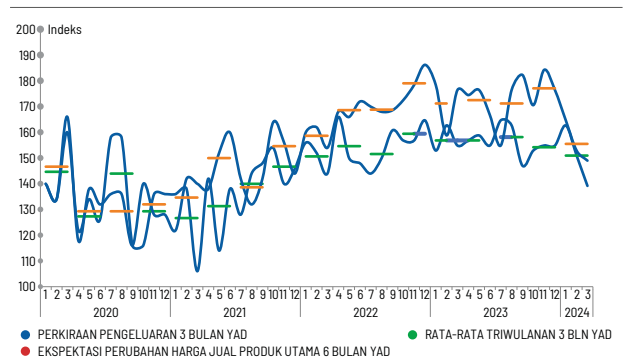
Inflasi pada triwulan II 2024 diperkirakan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya seiring dengan berlanjutnya puncak panen serta normalisasi permintaan pasca periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Penurunan tersebut sejalan dengan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 yang mengindikasikan penurunan rerata indeks ekspektasi perubahan harga jual produk 3 (tiga) bulan ke depan senilai 150,97, lebih rendah jika dibandingkan 154,25 pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, rerata indeks ekspektasi perubahan harga jual 6 (enam) bulan ke depan tercatat sebesar 155,55, lebih rendah dibandingkan 177,12 pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.13).

3.1.4 Pengendalian Inflasi

Dalam rangka menjaga sasaran inflasi IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rentang 2,5±1% di tahun 2024, beberapa upaya pengendalian inflasi telah ditempuh tim TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung selama triwulan I 2024. Upaya-upaya dimaksud meliputi:

a. Monitoring kecukupan pasokan dan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan gudang oleh TPID baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sekaligus memastikan kualitas barang pokok memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi, di antaranya:

1. Melaksanakan pemantauan harga secara harian yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis



Sumber: Survei Penjualan Eceran KPw BI Provinsi Lampung

Grafik 3.13 Ekspektasi Perubahan Harga 3 & 6 Bulan ke Depan

(PIHPS) yang aktif disosialisasikan dalam setiap rapat koordinasi TPID. Selain itu, pemantauan harga juga aktif dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

2. KPwBI Provinsi Lampung secara aktif menyampaikan analisis perkembangan harga komoditas bahan pokok di Lampung secara harian berdasarkan data PIHPS yang disampaikan pada platform komunikasi bersama TPID Lampung dan Satgas Pangan Lampung.

b. Implementasi Lanjutan GNPIP Provinsi Lampung

Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi GNPIP, telah dilaksanakan program TPID Lampung sebagai upaya penguatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara *end to end*, yang terdiri atas:

1. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas aneka cabai, dan KAD Antar Provinsi, dengan fokus komoditas beras, bawang merah, telur, daging sapi, dan aneka produk UMKM;
2. Peningkatan nilai tambah hilirisasi produk pertanian dengan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, a.l *greenhouse*, alsintan (sumur bor dan traktor), bimtek pasca panen untuk bawang merah dan cabai merah, serta perluasan penggunaan pupuk organik MA11 melalui sosialisasi dan pendampingan.
3. Mendorong peningkatan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan melalui sosialisasi/penyelenggaraan regional event dengan fokus komoditas a.l cabai olahan, tepung singkong, dan bawang goreng olahan.

c. Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

Menghadapi risiko inflasi pada triwulan II 2024, TPID Provinsi Lampung melakukan beberapa langkah dalam rangka menjaga laju inflasi agar berada dalam range 2,5%±1%, antara lain sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Memastikan kelancaran distribusi **pupuk subsidi** kepada petani.

- b. Melakukan **operasi pasar beras/SPHP** secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
- c. Melakukan **monitoring harga** dan **pasokan**, salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (<https://www.bi.go.id/hargapangan>), khususnya pada komoditas-komoditas sbb:
 - a) Komoditas yang perlu diwaspadai kenaikan harganya: bawang putih, daging ayam, gula pasir, minyak goreng, dan beras;
 - b) Komoditas yang relatif terjaga, namun masih memiliki risiko kenaikan harga: Aneka cabai, bawang merah, telur ayam.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi Lampung, utamanya untuk komoditas yang sering bergejolak di Kota IHK.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan dan pompanisasi, pendistribusian varietas yang cukup resisten terhadap genangan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- b. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.
- c. Melanjutkan upaya percepatan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.
- d. Penguatan koordinasi antar OPD dan Kabupaten/Kota dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 tahun 2024 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah.

4. Komunikasi efektif

- a. Melakukan rapat koordinasi secara formal, dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal, melalui WhatsApp Group, dalam rangka menjaga *awareness* TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
- b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku *panic buying*.

d. Quick Wins Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

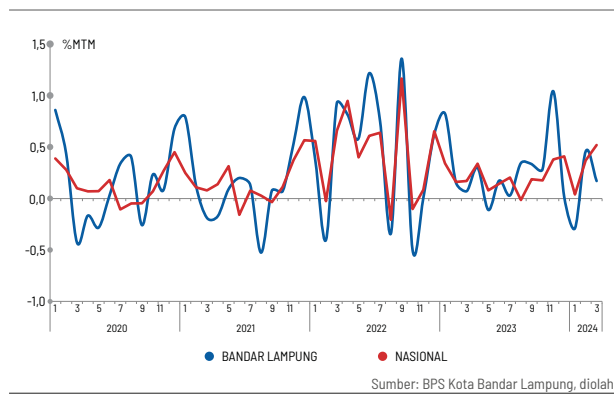
Diperlukan upaya dan pengambilan kebijakan yang bersifat *quick win* dan perbaikan faktor struktural untuk menahan laju inflasi saat ini dan ke depan diantaranya:

1. Pelaksanaan operasi pasar/Gerakan pangan murah dengan fokus komoditas beras, bawang merah, aneka cabai, daging & telur ayam ras, serta komoditas lainnya;
2. Sinergi pengendalian dan stabilisasi harga pangan dan hortikultura secara *end to end*;
3. Mempercepat akselerasi perluasan program KPB dengan pemberian insentif subsidi pupuk bagi kelompok tani yang telah/akan berkomitmen untuk menanam aneka cabai dan bawang merah;
4. Pelaksanaan Kerjasama Antar Dearah (KAD) Intra Provinsi, dengan fokus komoditas beras, dan KAD Kota Metro – Brebes untuk komoditas Bawang Merah;
5. Pelaksanaan pemeriksaan kesiapan angkutan, pelabuhan, bandara, jalan tol, sarana prasarana pendukung, dan personil, penambahan *extra flight*, persiapan layanan *e-ticketing* serta pos pengamanan dan layanan, perencanaan rekayasa lalin untuk memastikan kelancaran distribusi;
6. Peningkatan nilai tambah hilirisasi produk pertanian dengan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, a.l. *greenhouse*, alsintan (sumur bor dan traktor), bimtek pasca panen untuk bawang merah dan cabai merah, serta perluasan penggunaan pupuk organik MA11 melalui sosialisasi dan pendampingan;
7. Mendorong utilisasi fasilitas distribusi pangan yang difasilitasi Badan Pangan Nasional;
8. Perluas penggunaan bibit padi tahan kekeringan yang disesuaikan dengan karakteristik sawah dan daerah;
9. Mempercepat realisasi pupuk ber-subsidi bagi petani padi;
10. Koordinasi Dinas Pertanian, BPS, BMKG, dan Pengelola Irigasi untuk memetakan jadwal tanam dan mengalokasikan ketersediaan air irigasi berdasarkan proyeksi curah hujan;
11. Memperkuat penerapan Pergub No. 17 tahun 2017 dan SE No. 23 tahun 2024 terkait penerapan tata kelola gabah;
12. Dukungan terhadap reaktivasi usaha RMU yang vakum akibat mahalannya harga bahan baku dengan prioritas penjualan Beras Medium BULOG kepada RMU terdampak.

3.2 INFLASI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

3.2.1 Inflasi Kota Bandar Lampung

Pada bulan Januari 2024, IHK Kota Bandar Lampung mengalami deflasi sebesar 0,29% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 3,52% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang deflasi bulanan di Kota Bandar Lampung adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar secara bulanan -0,13%; -0,11%; dan -0,11%.



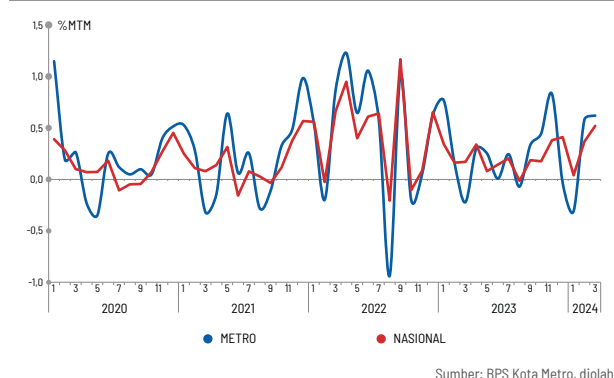
Grafik 3.14 Inflasi Bulanan Kota Bandar Lampung

Lebih lanjut, Kota Bandar Lampung di bulan Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,28% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 2,35% (yoy). Komoditas penyumbang inflasi di Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2024 antara lain beras, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,29%; 0,17%; 0,05%; dan 0,05%.

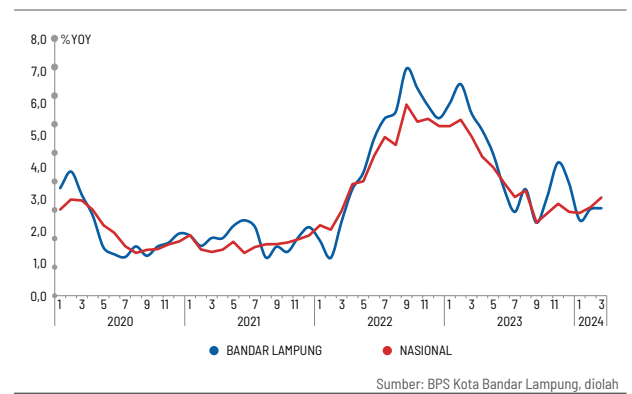
Pada bulan Maret 2024, Kota Bandar Lampung terpantau mengalami inflasi sebesar 0,17% (mtm), lebih rendah dari periode sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Bandar Lampung pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 2,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 2,69% (yoy). Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada periode ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,13% (mtm); 0,10% (mtm); dan 0,04% (mtm).

3.2.2 Inflasi Kota Metro

Sejalan dengan Kota Bandar Lampung, Kota Metro pada bulan Januari 2024 mencatatkan deflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi Kota Metro pada bulan Januari 2024 adalah sebesar 1,99% (yoy), juga lebih rendah



Grafik 3.16 Inflasi Bulanan Kota Metro

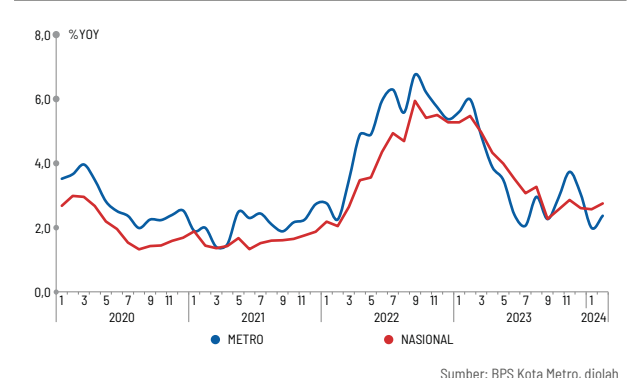


Grafik 3.15 Inflasi Tahunan Kota Bandar Lampung

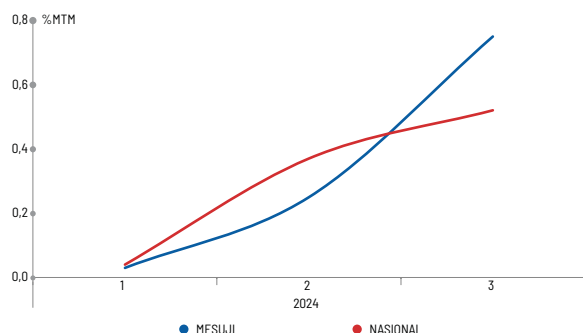
dibandingkan 3,05% (yoy) pada periode sebelumnya. Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi adalah sigaret kretek mesin (SKM), beras, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,15% (mtm), 0,11% (mtm), dan 0,03% (mtm).

Di bulan Februari 2024, Kota Metro mengalami inflasi sebesar 0,58% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,31% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Februari 2024 tercatat sebesar 2,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 1,99% (yoy). Inflasi yang terjadi pada periode Februari terutama didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,43% (mtm); 0,13% (mtm); 0,10% (mtm); dan 0,05% (mtm).

Pada bulan Maret 2024, Kota Metro mengalami inflasi sebesar 0,62% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,58% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kota Metro pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 2,37% (yoy). Adapun tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti ayam hidup, telur ayam ras, dan daging ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,19% (mtm), 0,08% (mtm) dan 0,06% (mtm).



Grafik 3.17 Inflasi Tahunan Kota Metro



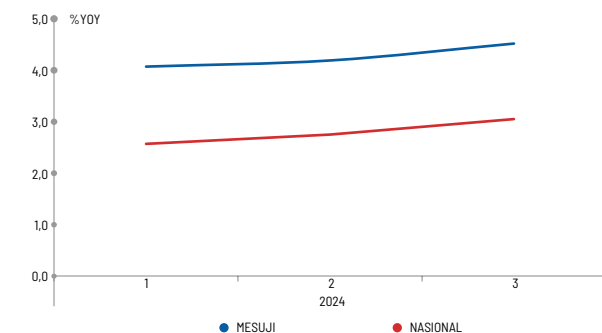
Grafik 3.18 Inflasi Bulanan Kabupaten Mesuji

3.2.3 Inflasi Kabupaten Mesuji

Terhitung tahun 2024, terdapat dua Kabupaten baru yang menjadi wilayah penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji menyumbang sekitar 6% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji pada bulan Januari 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,03% (mtm), dengan inflasi tahunan sebesar 4,07% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang inflasi adalah bawang merah, bawang putih, dan sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil masing-masing sebesar 0,18% (mtm), 0,17% (mtm), dan 0,04% (mtm).

Di bulan Februari 2024, Kabupaten Mesuji mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Mesuji pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 4,07% (yoy). Inflasi yang terjadi pada bulan Februari terutama didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,35% (mtm); 0,32% (mtm); dan 0,10% (mtm).



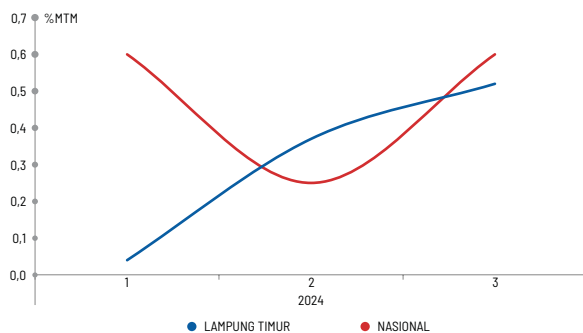
Grafik 3.19 Inflasi Tahunan Kabupaten Mesuji

Pada bulan Maret 2024, Kabupaten Mesuji mengalami deflasi sebesar 0,75% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,25% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Mesuji pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 4,19% (yoy). Adapun tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti telur ayam ras, bawang putih, dan ayam hidup dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,11% (mtm); 0,10% (mtm); dan 0,08% (mtm).

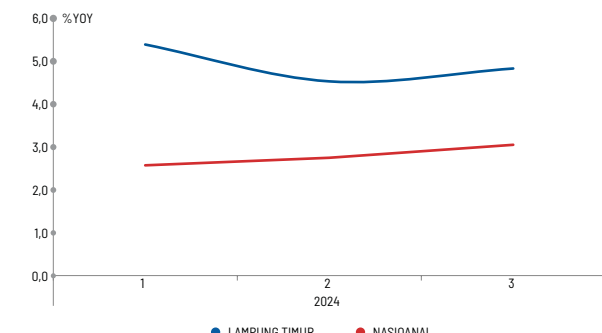
3.2.4 Inflasi Kabupaten Lampung Timur

Serupa dengan Kabupaten mesuji, Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah baru penyumbang Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur menyumbang sekitar 28% terhadap IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

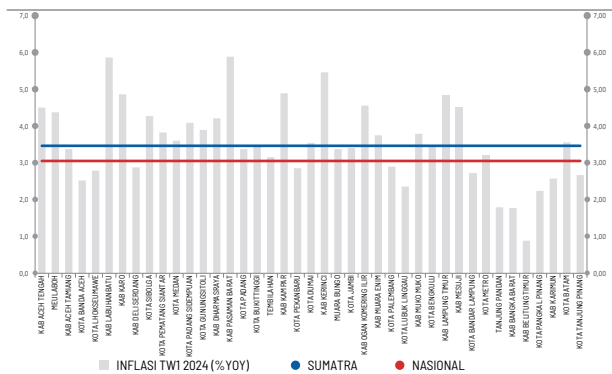
Kabupaten Lampung Timur pada bulan Januari 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,60% (mtm), dengan inflasi secara tahunan sebesar 5,39% (yoy). Dilihat dari sumbernya, komoditas utama penyumbang deflasi adalah cabai merah, bensin, cabai rawit, terong, dan telur ayam ras dengan andil masing-masing sebesar 0,13% (mtm); 0,04% (mtm); 0,03% (mtm); dan 0,02% (mtm).



Grafik 3.20 Inflasi Bulanan Kabupaten Lampung Timur



Grafik 3.21 Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Timur



Grafik 3.22 Inflasi Sumatera

Pada bulan Februari 2024, Kabupaten Lampung Timur mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm), lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,60% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,53% (yoy). Inflasi yang terjadi pada bulan Februari terutama didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,33% (mtm); 0,14% (mtm); 0,08% (mtm); dan 0,06% (mtm).

Pada bulan Maret 2024, Kabupaten Lampung Timur mengalami inflasi sebesar 0,60% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,25% (mtm). Secara tahunan, inflasi di Kabupaten Lampung Timur pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,83% (yoy). Adapun tekanan inflasi pada periode ini didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,21% (mtm); 0,14% (mtm); 0,14% (mtm); dan 0,13% (mtm).

3.3 INFLASI SUMATERA

Dari 41 kabupaten/kota di Sumatera (SBH 2022), terdapat sebanyak 22 kabupaten/kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional. Adapun dari seluruh wilayah tersebut, terdapat beberapa wilayah dari Provinsi Lampung yang melebihi tingkat inflasi nasional, yang meliputi Kabupaten Lampung Timur (4,83%yoy); Kabupaten Mesuji (4,52%yoy); dan Kota Metro (3,22%yoy). Secara umum, inflasi Kota Bandar Lampung yang relatif terjaga menempati peringkat 33 tertinggi Sumatera, diikuti dengan Kota Metro yang menempati peringkat 27, walaupun Kabupaten Mesuji dengan peringkat 8, dan Kabupaten Lampung Timur dengan peringkat 6 masih perlu menjadi perhatian.

3.4 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2024

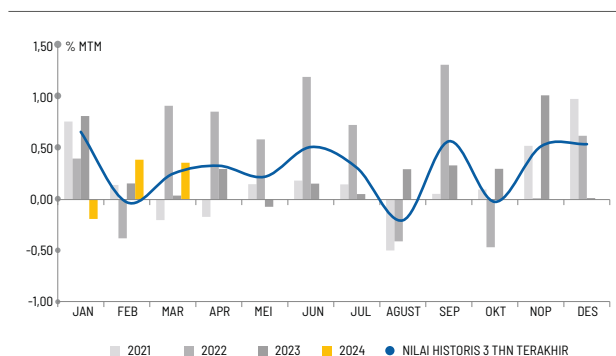
Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota Provinsi Lampung April 2024 tercatat mengalami deflasi 0,01% (mtm), lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm). Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada April dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan tingkat inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 0,38% (mtm) dan 0,25% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada April 2024 mengalami inflasi 3,29% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,00% (yoy). Tingkat inflasi tersebut telah melingkupi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur yang mengacu kepada Survei Biaya Hidup tahun dasar baru 2022 oleh Badan Pusat Statistik.

Dilihat dari sumbernya, deflasi pada April 2024 terutama didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas seperti: beras, cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit dan cabai hijau dengan andil masing-masing sebesar -0,04%; -0,26%; -0,07%; -0,07%; dan -0,02%. Penurunan harga beras sejalan dengan masuknya puncak panen raya pada April 2024 didukung dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, penurunan harga aneka cabai sejalan dengan masih berlangsungnya periode panen di beberapa daerah produsen cabai di Lampung dan Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu daerah pemasok cabai merah terbesar untuk Lampung. Adapun penurunan harga telur ayam ras sejalan dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri di tengah pasokan yang tetap terjaga.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung akan terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024.

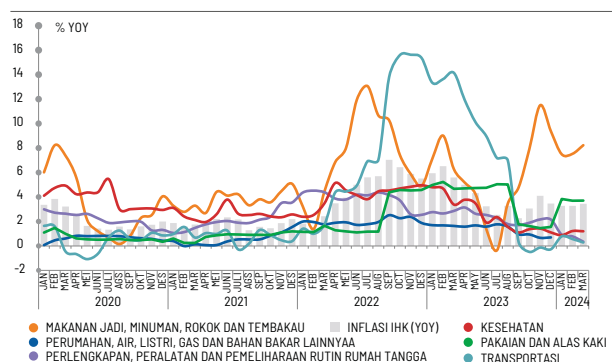
Beberapa risiko yang perlu dicermati dalam pencapaian sasaran inflasi di akhir tahun 2024 antara lain adalah:

- Potensi banjir yang dapat menghambat masa tanam komoditas pangan dan hortikultura;
- Meningkatnya harga daging dan telur ayam ras di tengah masih tingginya harga pakan ayam;
- Berlanjutnya kenaikan harga rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%;
- Potensi peningkatan harga BBM sejalan dengan konflik di timur tengah;
- Potensi kenaikan permintaan agregat yang didorong oleh kenaikan UMP tahun 2024;



Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah

Grafik 3.23 Realisasi Inflasi vs Nilai Historis Inflasi 3 Tahun Terakhir



Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah

Grafik 3.24 Realisasi Inflasi Maret 2024

- Berlanjutnya ketidakpastian global seiring belum meredanya tensi geopolitik global yang berpotensi mendorong peningkatan harga emas dunia;
- Ketidakpastian kondisi perang di Timur Tengah berisiko menyebabkan tingginya harga minyak dan gas dunia tahun 2024;
- Melemahnya nilai tukar berpotensi menghambat komoditas yang bertumpu pada impor.



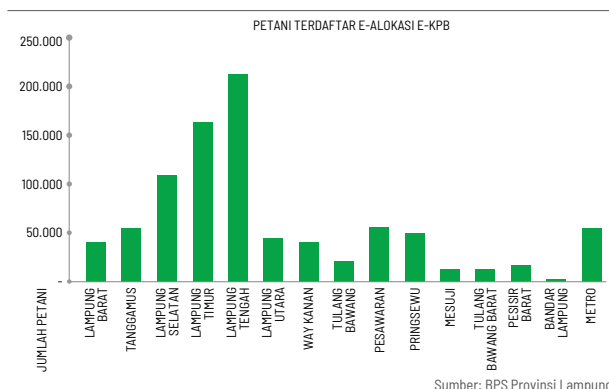
BOKS 3

Kartu Petani Berjaya (KPB), Pengungkit Sektor Pertanian Lampung

Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor tersebut mencatat sekitar 27% dari struktur perekonomian Lampung dan hingga tahun 2024, komoditas pangan dan hortikultura masih memegang andil yang besar terhadap tingkat inflasi IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada triwulan I 2024, IHK gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 3,45% (yoy), relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,47% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut umumnya didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, Rokok dan Tembakau yang mencatat Inflasi 8,23% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 2,64% (yoy). Dari kelompok tersebut, komoditas beras, bawang putih, dan daging ayam ras merupakan penyumbang tertinggi dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 26,01% (yoy), 27,72% (yoy), dan 12,48% (yoy). Hal ini menunjukkan tingginya pengaruh komoditas pangan dan hortikultura terhadap inflasi di Provinsi Lampung.

Pemerintah Lampung berupaya untuk meningkatkan pendapatan petani dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi melalui penerapan program Kartu Petani Berjaya (KPB). Mengacu kepada Peraturan Gubernur Lampung No. 9 tahun 2024 tanggal 13 Februari 2020 perihal Program Kartu Petani Berjaya, KPB merupakan program berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan input agrikultur, akses terhadap permodalan, dan dukungan teknologi. KPB akan mengintegrasikan seluruh kegiatan usaha berbudidaya pertanian antara lain kepastian pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi pertanian (saprotan), penyediaan bibit dan pupuk subsidi, pembinaan manajemen usaha dan teknologi, akses keuangan, kredit usaha rakyat, dan asuransi usaha.

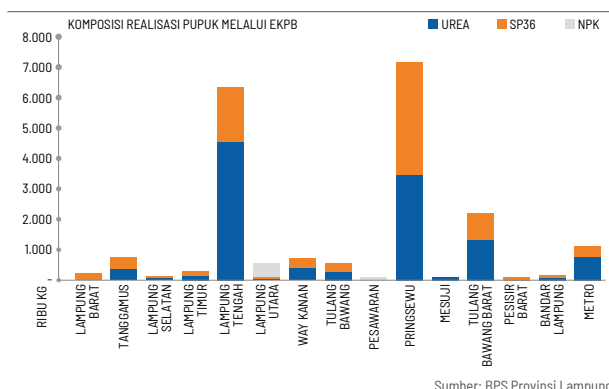
Hingga tahun 2024, KPB telah digunakan oleh 837.861 pengguna aktif; 77.655 kelompok tani; dan 1.398 kios. Secara spasial, hingga tahun 2023 kabupaten Lampung Tengah tercatat memiliki pengguna alokasi tertinggi (217.725), diikuti dengan Lampung Timur (167.917) dan Lampung Selatan (112.747). Lebih lanjut, realisasi pengadaan pupuk



Sumber: BPS Provinsi Lampung

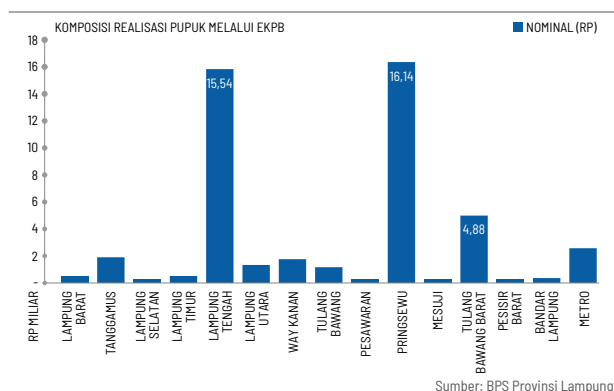
Grafik B3.1 Perkembangan Pasokan Komoditas Bawang Merah

melalui e-KPB hingga tahun 2023 mencapai 19,7 ribu Ton, dengan komposisi sebesar 11.471 ribu ton Urea, 7.817 ribu ton SP36, dan 422,5 ton NPK. Secara spasial, kabupaten Pringsewu tercatat sebagai wilayah dengan realisasi pupuk subsidi tertinggi (7.091 ribu ton), diikuti dengan Lampung Tengah (6.271 ribu ton), dan Tulang Bawang Barat (2.151 ribu ton). Adapun nilai transaksi pupuk melalui e-KPB hingga tahun 2023 mencapai Rp45,1 miliar, dengan wilayah dengan realisasi terbesar di Pringsewu (Rp16,1 miliar), Lampung Tengah (Rp15,5 miliar) dan Tulang Bawang Barat (Rp 4,8 miliar).



Sumber: BPS Provinsi Lampung

Grafik B3.2 Perkembangan Pasokan Komoditas Bawang Merah



Grafik B3.3 Perkembangan Pasokan Komoditas Bawang Merah

Penggunaan KPB yang cukup tinggi tersebut perlu dipertahankan secara konsisten melalui kepastian permodalan, bahan baku, serta pengetahuan yang baik, petani dapat meningkatkan hasil panen. Ke depan, program KPB ditargetkan mendorong petani untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengungkit produktivitas, serta terus memperoleh pendapatan yang lebih baik.



PERBANKAN LAMPUNG

BAB 4

Stabilitas Keuangan Daerah

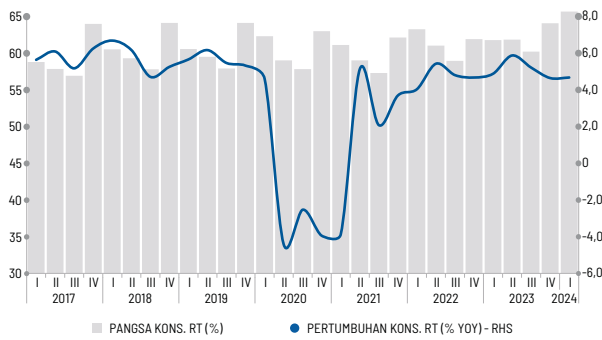
Kinerja rumah tangga di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (65,64% PDRB), tumbuh 4,67% (yoy) pada triwulan I 2024, relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 7,15% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,61% (yoy) pada triwulan IV 2023. Namun demikian, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi menurun terindikasi dari penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan I 2024, rata-rata IKE sebesar 117 lebih rendah jika dibandingkan dengan 119,67 pada triwulan sebelumnya.

Kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2024 juga tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Tetap kuatnya kinerja korporasi Lampung terutama ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) konstruksi yang meningkat di tengah tetap positifnya pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan Industri Pengolahan. Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan I 2024 berkontraksi sebesar 12,0% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar 20,7% (yoy).

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat meskipun tumbuh melambat. Perlambatan aset bank umum di Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar negatif 0,60% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 (4,89%, yoy). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode laporan tercatat sebesar 0,43% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 2,03% (yoy) pada triwulan IV 2023.

Kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2024 terindikasi tumbuh melambat. Sejalan dengan pertumbuhan aset Bank Umum, aset bank syariah pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 16,22% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 16,76% (yoy) pada triwulan IV 2024. Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan juga tumbuh melambat pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 19,43% (yoy) dari 21,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya.





Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

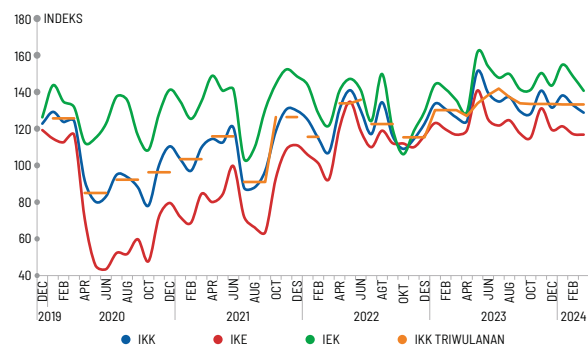
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga

4.1 ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

Kinerja rumah tangga pada triwulan I 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (65,64% PDRB), tumbuh 4,67% (yoy) pada triwulan I 2024, relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 7,15% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,61% (yoy) pada triwulan IV 2023. Namun demikian, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi menurun terindikasi dari penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan I 2024, rata-rata IKE sebesar 117 lebih rendah jika dibandingkan dengan 119,67 pada triwulan sebelumnya.

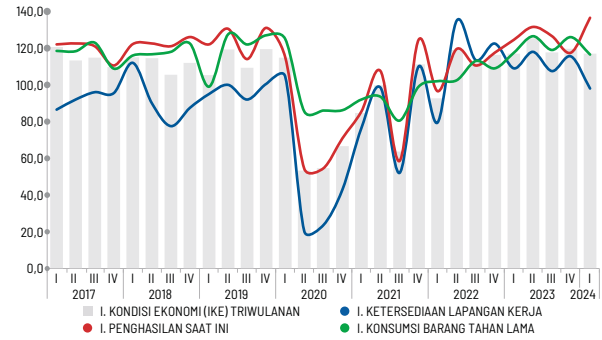
4.1.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Perlambatan konsumsi rumah tangga turut menahan ekspansi kredit konsumsi pada triwulan IV 2023. Pertumbuhan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 8,02% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 5,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Di sisi lain, peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga secara yoy pada triwulan I 2024 dibandingkan dengan triwulan IV 2023, tidak sejalan dengan keyakinan konsumen terhadap perkembangan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.2 Indeks Keyakinan Konsumen

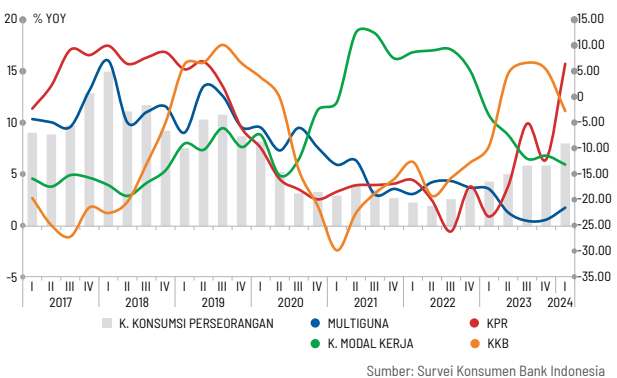


Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.3 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini

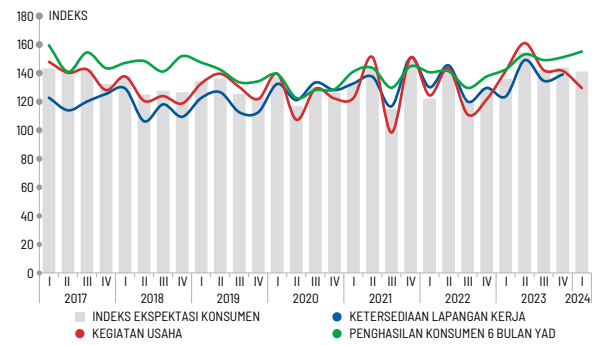
ekonomi pada triwulan berjalan yang menurun yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata IKE pada triwulan I 2024 sebesar 117, lebih rendah jika dibandingkan dengan 119,67 pada triwulan sebelumnya, (Grafik 4.2) sejalan penurunan keyakinan konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan konsumsi barang tahan lama (Grafik 4.3).

Pada triwulan I 2024, eksposur utang perseorangan yang ditunjukkan oleh kredit konsumsi mengalami sedikit peningkatan. Kredit konsumsi kepada perseorangan tercatat tumbuh sebesar 8,02% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,87% (yoy) pada triwulan IV 2023. Peningkatan kredit konsumsi pada triwulan I 2024 terutama



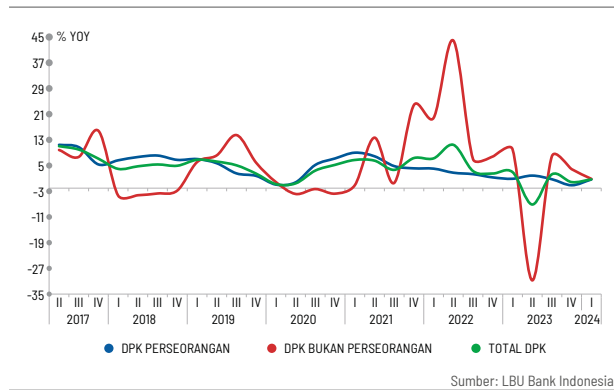
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.4 Kredit Perseorangan Lampung



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 4.5 Indeks Ekspektasi Konsumen 6 Bulan Mendatang



Grafik 4.6 Pertumbuhan DPK Perbankan

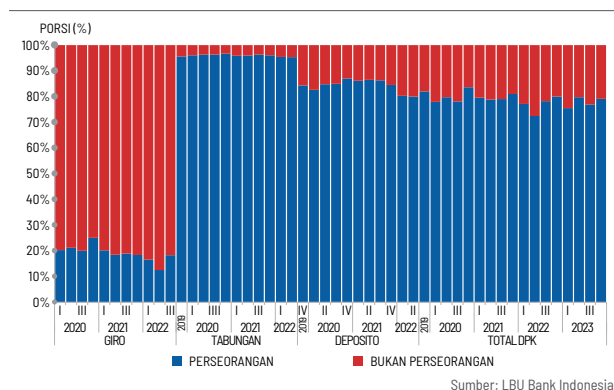
bersumber dari KPR dan Kredit Modal Kerja yang tumbuh positif masing-masing sebesar 15,72% (yoy) dan 5,96% (yoy). Adapun kredit konsumsi tertahan oleh penyaluran Alat Rumah Tangga dan KKB pada triwulan I 2024 masing-masing berkontraksi sebesar negatif 5,11% (yoy) dan 2,72% (yoy).

4.1.2 Kinerja Keuangan Rumah Tangga

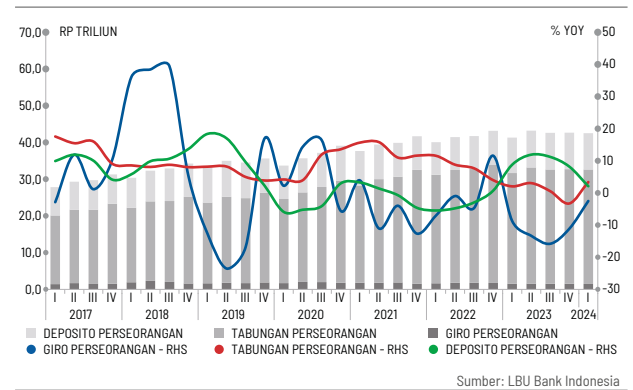
Meningkatnya konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan penghasilan konsumen di Lampung pada triwulan I 2024, penghasilan konsumen di Lampung juga mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan UMP dan kenaikan gaji PNS sebesar 8%. Pada triwulan I 2024, rata-rata indeks penghasilan konsumen tercatat sebesar 136,5, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 117,5 pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, kondisi ini tidak berdampak pada konsumsi barang tahan lama pada periode berjalan sebagaimana tercermin dari menurunnya konsumsi barang tahan lama pada periode berjalan. Pada TW I 2024, Indeks konsumsi barang tahan lama tercatat sebesar 116,5 lebih rendah jika dibandingkan dengan 126 pada periode sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan rata-rata indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini juga mengalami penurunan menjadi sebesar 98 pada triwulan I 2024, lebih rendah jika dibandingkan dengan 126 pada triwulan IV 2023.

4.1.3 Dana Pihak Ketiga Perseorangan di Perbankan

Simpanan rumah tangga di perbankan pada triwulan I 2024 turut mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2024, dana Pihak Ketiga (DPK) perseorangan di perbankan Lampung tercatat tumbuh sebesar



Grafik 4.7 Komposisi DPK Perbankan



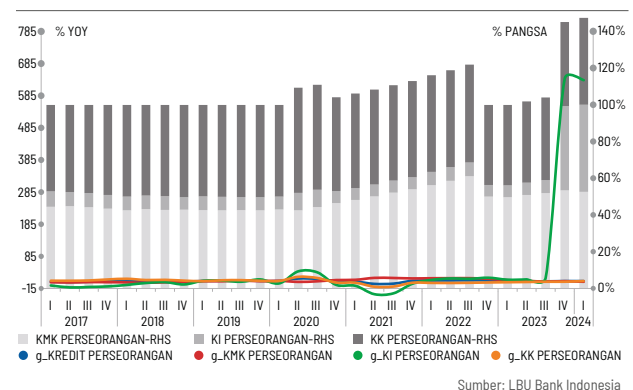
Grafik 4.8 Pertumbuhan DPK Perseorangan

2,88% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,96% (yoy) (Grafik 4.6). Namun demikian, pertumbuhan DPK perseorangan ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan total DPK perbankan pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,93 (yoy) pada periode yang sama. Meskipun demikian, sektor rumah tangga tetap menjadi pendorong kinerja sekaligus sumber utama pembiayaan perbankan Lampung dengan pangsa mencapai 75,44% (Grafik 4.7).

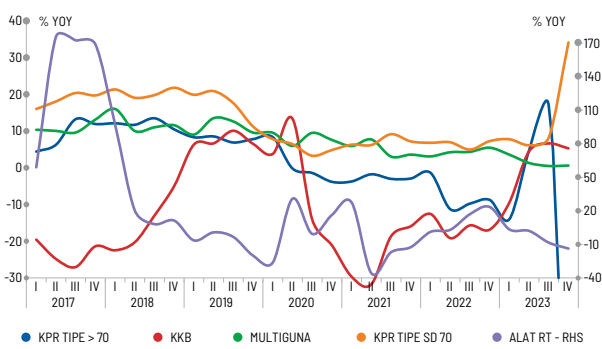
Meningkatnya pertumbuhan DPK perseorangan didorong terutama oleh peningkatan tabungan (Grafik 4.8). Pada triwulan I 2023, tabungan tercatat meningkat sebesar 3,40% (yoy), menguat jika dibandingkan dengan kontraksi sebesar negatif 3,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

4.1.4 Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

Portofolio kredit sektor rumah tangga (kredit perseorangan) pada triwulan laporan tercatat sedikit menurun. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 7,37% (yoy), sedikit meningkat dari 7,83% (yoy) pada triwulan IV 2023. Dari sisi penggunaan, meningkatnya penyaluran kredit dipengaruhi oleh penyaluran Kredit multiguna yang memiliki share terbesar dalam penyaluran kredit kepada rumah tangga yaitu sebesar 31,54% (Grafik 4.9). Penyaluran Kredit multiguna pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 12,33% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 0,63% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meski demikian,



Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Perseorangan



Sumber: LBU Bank Indonesia

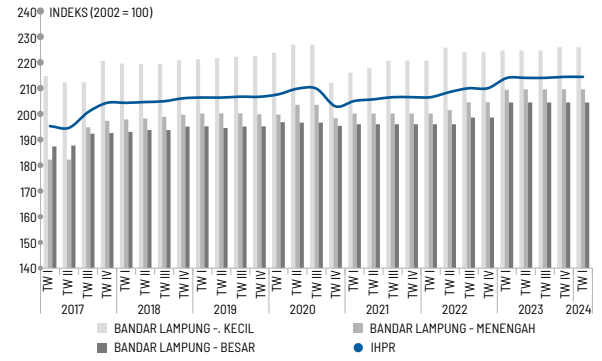
Grafik 4.10 Pertumbuhan Kredit Konsumsi Perseorangan

peningkatan pertumbuhan kredit kepada sektor rumah tangga juga sejalan dengan kinerja penyaluran KPR. Pada triwulan I 2024, penyaluran KPR tercatat tumbuh sebesar 15,72% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 8,86% (yoy) pada triwulan IV 2023 yang didominasi dengan KPR tipe>70 yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 24,88% (yoy). Sementara itu, pada triwulan I 2024 penyaluran kredit perseorangan tertahan oleh kontraksi Kredit alat rumah tangga sebesar negatif 5,11% (yoy), namun membaik jika dibandingkan dengan negatif 13,72% (yoy) pada periode sebelumnya.

4.2 ASESMEN SEKTOR KORPORASI

4.2.1 Kinerja Korporasi

Kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Tetap kuatnya kinerja korporasi Lampung terutama ditopang oleh kinerja Lapangan Usaha (LU) konstruksi yang meningkat di tengah tetap positifnya pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan Industri Pengolahan. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2024 tumbuh 15,16% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,16% (yoy) sejalan dengan peningkatan realisasi pengadaan semen dan produksi bahan galian akibat proyek konstruksi yang meningkat. Kinerja LU PBE tercatat tumbuh 8,16% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 7,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh 2,94% (yoy) dari 0,50% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja LU PBE utamanya didorong oleh kenaikan permintaan menjelang HKBN

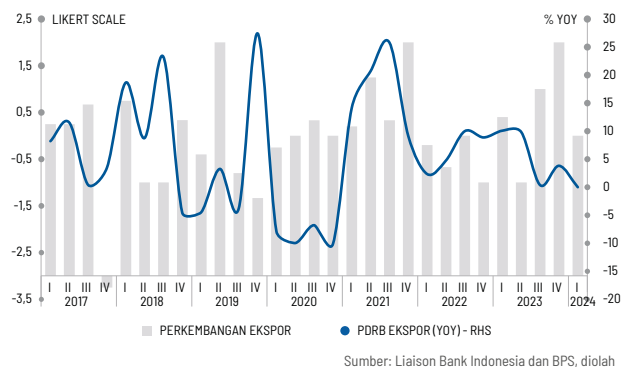


Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial

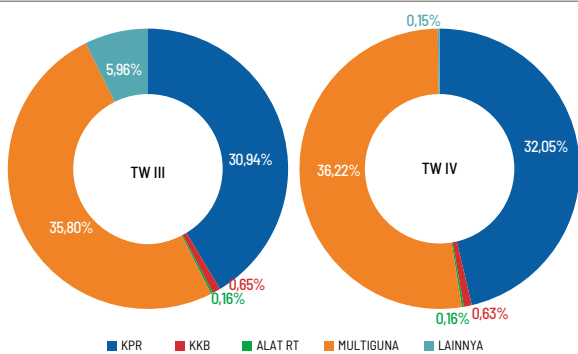
Nataru Tahun 2023 dan dimulainya aktivitas kampanye di tahun politik sementara peningkatan kinerja industri pengolahan a.l disebabkan oleh peningkatan kinerja LU PBE.

Peningkatan kinerja industri pengolahan pada triwulan I 2024 terkonfirmasi dari tetap positifnya kinerja ekspor serta indikator realisasi kegiatan usaha, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Liaison. Pada triwulan I 2024 realisasi kegiatan usaha yang ditunjukkan oleh Saldo Bersih Tertimbang (SBT) tercatat sebesar 44,60% lebih tinggi jika dibandingkan dengan 20,09% pada triwulan IV 2024. Sementara itu, berdasarkan hasil liaison, likert scale (LS) penjualan domestik korporasi pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 0,09, meningkat jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 tercatat sebesar negatif 0,27 (Grafik 4.13).



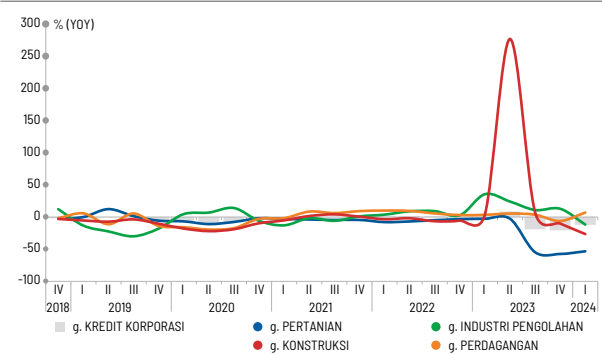
Sumber: Liaison Bank Indonesia dan BPS, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Ekspor



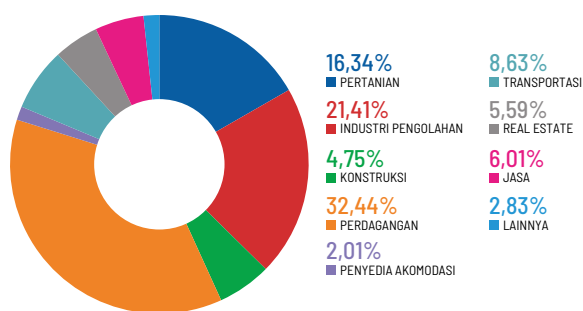
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.11 Komposisi Kredit Konsumsi Perseorangan



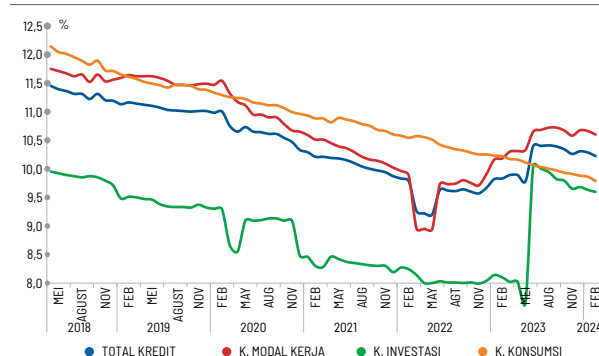
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit Korporasi



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.15 Komposisi Penyaluran Kredit Korporasi



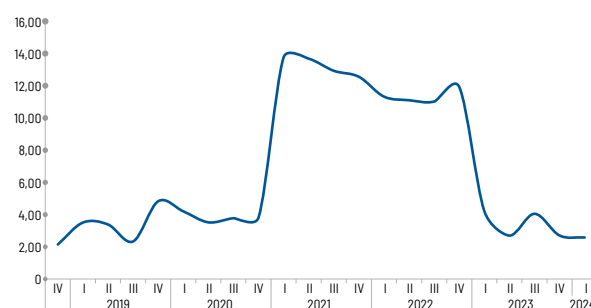
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16 Rata-Rata Suku Bunga Kredit Bank Umum

4.2.2 Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan I 2024 terkontraksi sebesar 12,0% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 20,7% (yoy) (Grafik 4.14). Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Listrik, Gas dan Air dan LU Konstruksi. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit pada LU Listrik, Gas dan Air tercatat mengalami peningkatan sebesar 33,09% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 32,44% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit pada LU Konstruksi tetap mendukung kinerja penyaluran kredit korporasi dengan mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,65% (yoy) jika dibandingkan dengan 2,01% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Adapun peningkatan penyaluran kredit perbankan tertahan terutama oleh penurunan penyaluran kredit pada LU industri pengolahan yang pada triwulan I 2024 tercatat 3,47% (yoy) jika dibandingkan 4,75% (yoy) pada periode sebelumnya. Peningkatan penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi sejalan didukung dengan penurunan rata-rata suku bunga kredit perbankan menjadi 10,22% pada triwulan IV 2023 dari 10,26% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.16)

Peningkatan kinerja penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2024 tidak diikuti dengan risiko kualitas kredit, terindikasi dari penurunan Non Performing Loan (NPL). Pada triwulan I 2024, NPL kredit korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17 Perkembangan NPL Kredit Korporasi

sebesar 2,58%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 2,70% pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.17).

4.3 ASESMEN INSTITUSI KEUANGAN

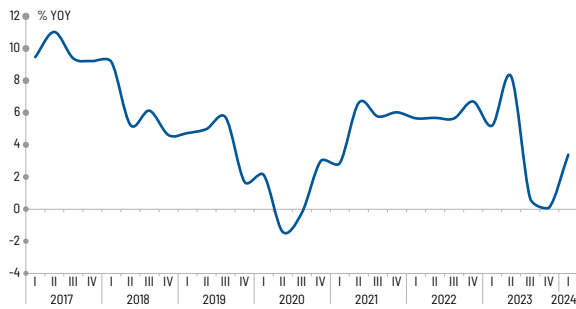
4.3.1 Bank Umum

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tetap kuat meskipun tumbuh melambat. Perlambatan aset bank umum di Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar negatif 0,60% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023 (4,89%, yoy) (Tabel 4.1). Sementara itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Bank Umum Provinsi Lampung

INDIKATOR PERBANKAN	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp. Miliar)	66.467,35	69.067	70.251	72.213	73.958	76.262	75.214	74.788	74.475	77.556	79.048	78.447	74.030
Pertumbuhan Aset (%yoy)	4,49	6,07	3,81	10,17	11,27	10,42	7,07	3,57	0,70	1,70	5,10	4,89	(0,60)
Total DPK (Rp. Miliar)	47.289,18	49.988	50.491	51.451	51.958	53.838	53.349	53.955	54.735	54.085	55.806	55.051	54.972
Pertumbuhan DPK (%yoy)	9,34	9,12	6,07	9,98	9,87	7,70	5,66	4,87	5,34	0,46	4,61	2,03	0,43
Total Kredit (Rp. Miliar)	57.379,46	58.955	59.890	60.858	60.627	62.309	63.275	64.939	63.782	67.457	63.698	65.010	60.365
Pertumbuhan Kredit (%yoy)	2,87	7,46	5,77	6,03	5,66	5,69	5,65	6,71	5,20	8,26	0,67	0,11	(5,36)
NPL (%)	5,52	5,49	5,36	5,00	4,70	4,94	4,66	4,55	2,60	2,29	2,81	2,42	2,53
LDR (%)	123,22	119,64	120,58	119,58	118,34	117,04	120,30	121,49	118,04	126,24	115,68	119,56	119,31

Sumber: Bank Indonesia, diolah

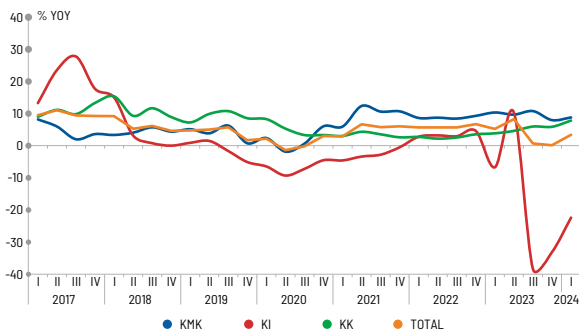


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Pertumbuhan Kredit Bank Umum

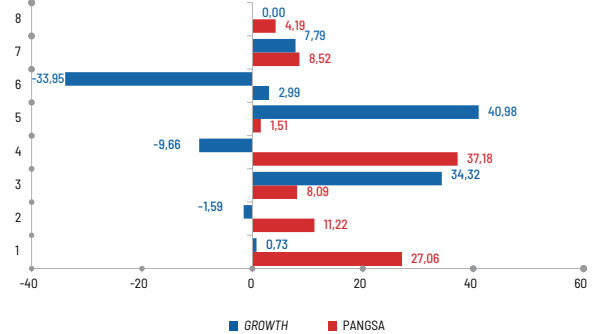
pada periode laporan tercatat sebesar 0,43% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 2,03% (yoy) pada triwulan IV 2023.

Kinerja kredit bank umum pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 3,39% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (0,11%; yoy), sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK kinerja perekonomian (Grafik 4.18). Berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit Bank Umum di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi untuk Kredit Modal Kerja (KMK), dengan pangsa yang mencapai 56,47% dari keseluruhan penyaluran kredit Bank Umum, diikuti oleh kredit konsumsi (31,28%) dan kredit investasi (12,25%). Peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit bank umum pada triwulan I 2024 terutama disebabkan tumbuhnya kredit investasi (KI). Pada triwulan I 2024, KI berkontraksi sebesar 22,40% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontraksi sebesar 33,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan kredit bank umum tetap didukung oleh KMK dan KK yang mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2023, KMK tumbuh sebesar 8,77% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan peningkatan sebesar 7,94% (yoy) pada periode sebelumnya. Sama halnya dengan KMK, penyaluran KK tumbuh sebesar 7,81% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya (**Grafik 4.19**). Meskipun mengalami peningkatan, kualitas kredit pada triwulan I 2024 tetap terjaga tercermin dari NPL yang relatif rendah di bawah 5% (2,53%; yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

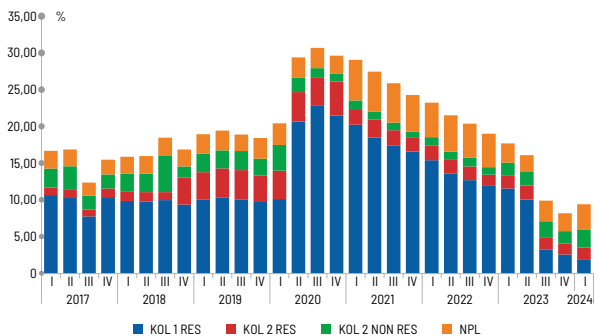
Grafik 4.19 Pertumbuhan Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU Bank Indonesia

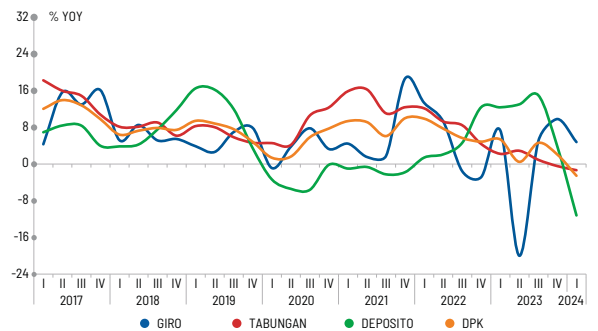
Grafik 4.20 Pangsa Sektor Ekonomi Utama Lampung

Sementara itu, dari sisi pendanaan, pertumbuhan DPK bank umum tercatat tumbuh kuat. Pada TW I 2024, DPK bank umum tercatat tumbuh sebesar 2,09% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan tumbuh 2,09% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan DPK terutama didorong oleh meningkatnya komponen tabungan dan deposito. Pada triwulan I 2024, tabungan tercatat tumbuh sebesar 3,12% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,66% (yoy), sementara deposito tercatat berkontraksi 2,02% (yoy), menurun jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 2,66%. Di samping itu, komponen deposito mendorong pertumbuhan DPK bank umum dengan tumbuh sebesar 0,06% (yoy) walaupun menurun jika dibandingkan dengan 2,09% (yoy) pada triwulan sebelumnya (**Grafik 4.22**). Adapun efisiensi



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.21 Pertumbuhan NPL dan LaR Lampung



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.22 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Bank Syariah Provinsi Lampung

INDIKATOR PERBANKAN	2021				2022				2023				2024
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Total Aset (Rp. Miliar)	4.830	4.669	4.722	5.352	4.990	5.174	5.372	5.244	5.326	5.436	5.775	6.123	6.190
Pertumbuhan Aset (%yoy)	11,02	6,93	5,03	9,80	3,31	10,82	13,76	-2,01	6,74	5,06	7,50	16,76	16,22
Total DPK (Rp. Miliar)	3.420	3.465	3.527	3.763	3.633	3.822	3.871	4.039	3.987	3.869	4.138	4.556	4.377
Pertumbuhan DPK (%yoy)	13,04	13,97	11,37	9,44	6,23	10,28	9,74	7,35	9,74	1,23	6,90	12,77	9,77
Total Pembiayaan (Rp. Miliar)	3.612	3.788	3.774	3.833	3.892	3.990	4.258	4.434	4.672	4.857	5.154	5.397	5.580
Pertumbuhan Pembiayaan (%yoy)	8,73	15,97	10,40	7,81	7,74	5,34	12,81	15,69	20,05	21,72	21,05	21,70	19,43
NPF (%)	2,46	2,24	1,76	1,77	2,05	2,16	2,10	1,98	1,93	1,92	2,23	2,39	2,44
FDR (%)	107,08	110,72	108,57	102,46	107,17	104,51	110,10	109,77	117,19	125,55	124,57	118,46	127,50

Sumber: LBUS Bank Indonesia, diolah

bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada triwulan I 2024, tercermin dari Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang sebesar 79,38%, lebih efisien jika dibandingkan dengan inefisiensi 50,04% pada triwulan IV 2023. Sementara di sisi lain, bank dapat menghasilkan profit, yang tercermin dari ROA pada triwulan I 2024 sebesar 5,91%, lebih tinggi dari 4,45% pada triwulan IV 2023.

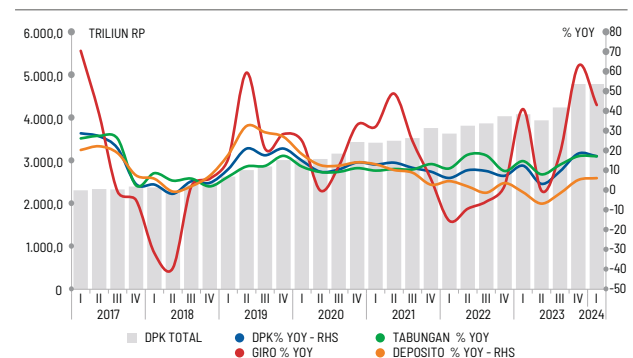
4.3.2 Bank Syariah

Kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2024 terindikasi tumbuh melambat. Sama halnya dengan pertumbuhan aset Bank Umum, aset bank syariah pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 16,22% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 16,76% (yoy) pada triwulan IV 2024 (Tabel 4.2). Dari sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan juga tumbuh melambat pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 19,43% (yoy) dari 21,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.2 5).

Pada triwulan I 2024, pertumbuhan DPK Bank Syariah terpantau tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK Bank Syariah pada triwulan I 2024 tercatat tumbuh sebesar 9,77% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 12,77% (yoy) pada periode sebelumnya. Penurunan DPK pada triwulan berjalan didorong oleh melambatnya pertumbuhan giro dan tabungan. Pada triwulan I 2024, giro dan tabungan masing-masing tercatat tumbuh sebesar 43,14%

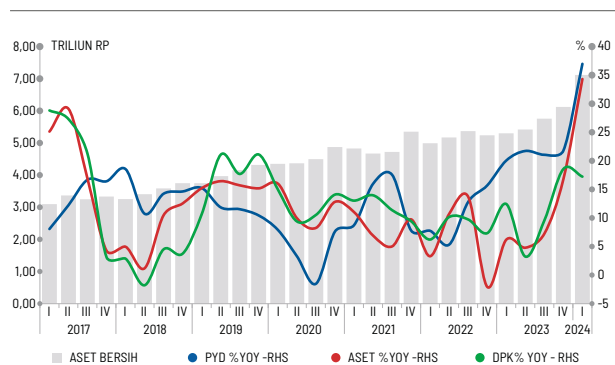
(yoy) dan 17,26% (yoy), menurun dibandingkan dengan 62,95% (yoy) dan 17,28% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.24).

Dari sisi pengelolaan risiko, rasio *Non Performing Financing* (NPF) kredit bank syariah terus mengalami perbaikan sejak tahun 2018. Pada triwulan I 2024, rasio NPF tetap terjaga dalam batas aman di bawah 5%, yaitu sebesar 2,44% meski sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,39% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, sejalan dengan kuatnya kinerja ekonomi Lampung pada triwulan I 2024, pembiayaan investasi tercatat tumbuh sebesar 60,54% (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan 54,98% (yoy) pada TW IV 2023



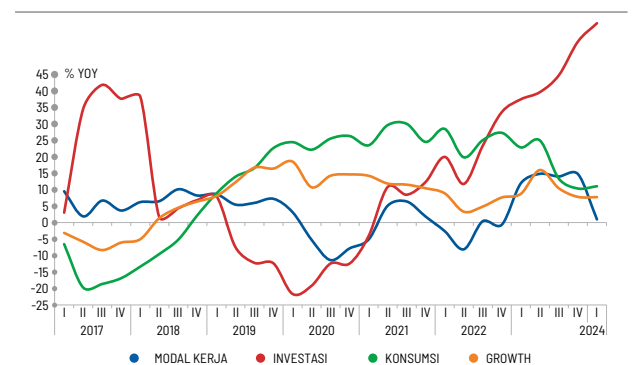
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.24 Pertumbuhan DPK Bank Syariah



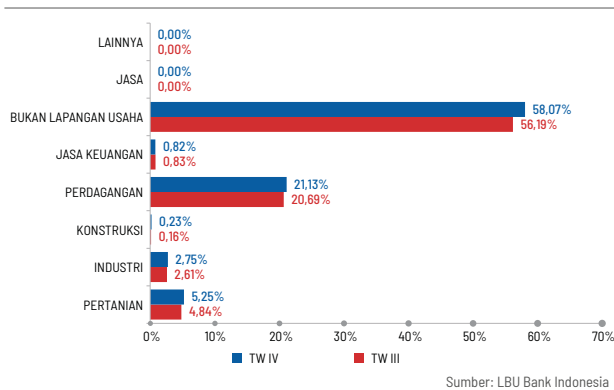
Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.23 Pertumbuhan Aset, DPK & Pembiayaan Bank Syariah



Sumber: LBU Bank Indonesia

Grafik 4.25 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan



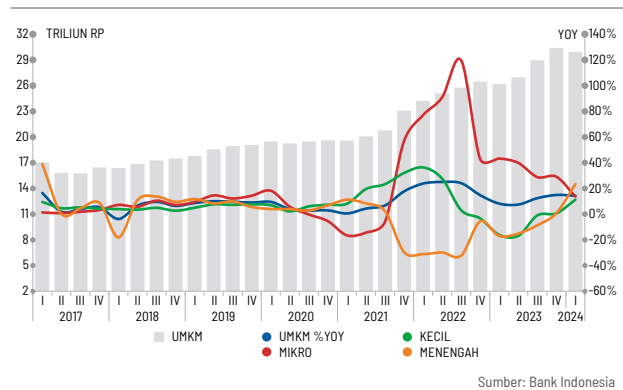
Grafik 4.26 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Sektoral

(Grafik 4.25). Sementara itu, berdasarkan sektornya, pembiayaan tertinggi tercatat masih dialokasikan untuk sektor perdagangan (20,18%) (Grafik 4.26).

4.4 PERKEMBANGAN KREDIT UMKM

Dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan I 2024 tumbuh melambat, tercermin dari peningkatan kredit UMKM yang tercatat melambat sebesar 12,38% (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan dengan 14,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 4.27). Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2023, sejalan dengan masih adanya kebijakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bank Indonesia. Pada triwulan I 2024, pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 45,37 (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 32,29% (yoy) pada triwulan IV 2023.

Tetap tumbuhnya penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 disertai dengan tetap terjaganya kualitas kredit. Di tengah pertumbuhan kredit UMKM yang tetap kuat, kualitas kredit UMKM terpantau dalam batas aman (dibawah 5%). Rasio *Non Performing Loan* (NPL) kredit UMKM pada triwulan I 2024 tercatat rendah sebesar 3,30%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 3,72% pada triwulan IV 2023 (Grafik 4.28).

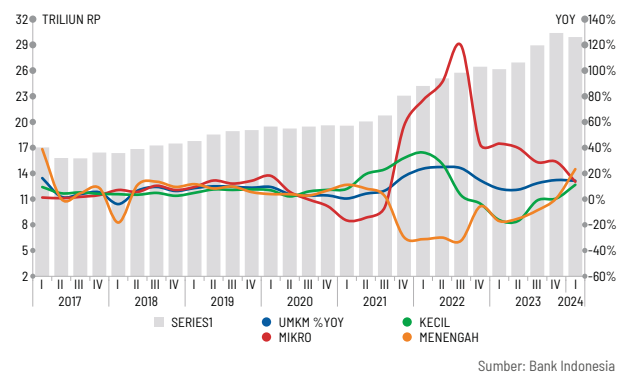


Grafik 4.27 Perkembangan Kredit UMKM

4.5 PENINGKATAN AKSES KEUANGAN UMKM

Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM baik dari sisi peningkatan produksi, pemasaran, dan akses keuangan, Bank Indonesia Provinsi Lampung memiliki program kluster binaan. Sampai dengan Desember 2023, terdapat 17 (tujuh belas) UMKM binaan yang mendapat pendampingan dari Bank Indonesia, dengan tujuh diantaranya telah mendapatkan pinjaman dari perbankan (Tabel 4.3).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan di Provinsi Lampung selama triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp2,26 Triliun. Berdasarkan kota/kabupaten, realisasi KUR tertinggi adalah di Kabupaten Lampung

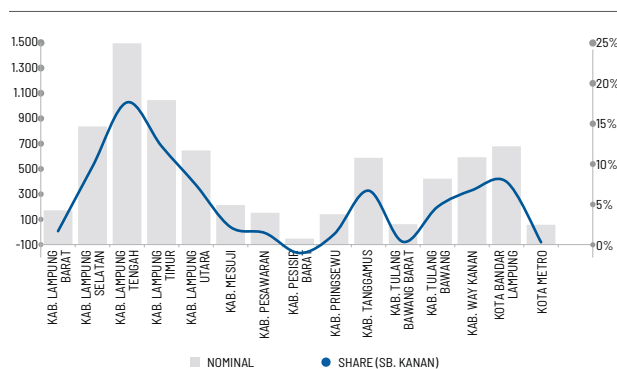


Grafik 4.28 NPL Kredit UMKM

Tabel 4.3 Akses Kluster Binaan Bank Indonesia

NAMA KLASTER/ USAHA/ KELOMPOK USAHA	KABUPATEN/KOTA	SATUAN JUMLAH UMKM	BENTUK USAHA	BENTUK KELEMBAGAAN DAN LEGALITAS USAHA				LEMBAGA PEMBERI PINJAMAN
				FORMAL			NON FORMAL	
				PT	CV	KOPERASI		
GENDIS AYU JAHE	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Bank
Kluster Budidaya Bawang Merah (Koperasi Koga Sera Tani)	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Petani	KELOMPOK	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK	
Telaga Rizqy	KOTA METRO	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	
Usaha Bahari	KOTA BANDAR LAMPUNG	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK	
CV Dr. Koffie Jaya Raya	KOTA BANDAR LAMPUNG	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK	
Griya Aisyah Tapis Lampung	KOTA BANDAR LAMPUNG	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK	
CV. Multi Anugerah (Souvenir dan Clothing Lampung)	KOTA BANDAR LAMPUNG	Pengusaha	INDIVIDU	TIDAK	YA	TIDAK	TIDAK	

Sumber: Fungsi Pengembangan UMKM, Bank Indonesia Provinsi Lampung



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

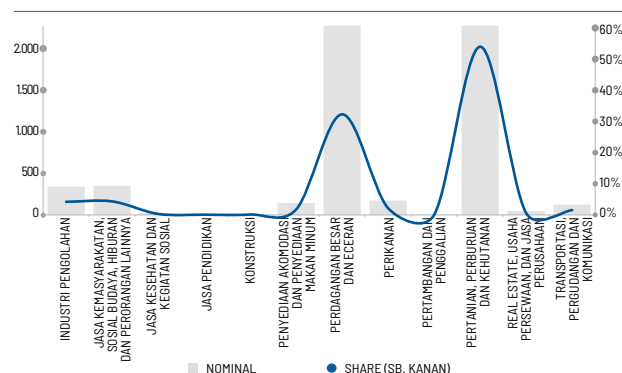
Grafik 4.29 Penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota

Tengah (Grafik 4.29) dengan share 19,90%, diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur (13,50%). Total debitur yang menerima manfaat KUR di Provinsi Lampung selama triwulan I 2024 mencapai 172.665 debitur dengan sebaran debitur terbanyak di kabupaten Lampung Tengah (Tabel 4.4) dengan 34.355 debitur (19,90%) dan Kabupaten Lampung Timur dengan 23.314 debitur (13,50%). Dari sisi LU, sektor utama penerima KUR adalah Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang mencapai 53,32%, serta sektor PBE yang mencapai 31,89% dari total

Tabel 4.4 Sebaran Debitur KUR berdasarkan Kabupaten/ Kota Tw I 2024

KABUPATEN/KOTA	DEBITUR	SHARE(%)
Lampung Barat	7.192	4,17%
Lampung Selatan	17.571	10,18%
Lampung Tengah	34.355	19,90%
Lampung Timur	23.314	13,50%
Lampung Utara	18.386	10,65%
Mesuji	5.788	3,35%
Pesawaran	4.616	2,67%
Pesisir Barat	1.066	0,62%
Pringsewu	4.292	2,49%
Tanggamus	14.341	8,31%
Tulang Bawang Barat	2.756	1,60%
Tulangbawang	8.418	4,88%
Way Kanan	16.669	9,65%
Bandarlampung	11.303	6,55%
Metro	2.598	1,50%
Total	172.665	100,00%

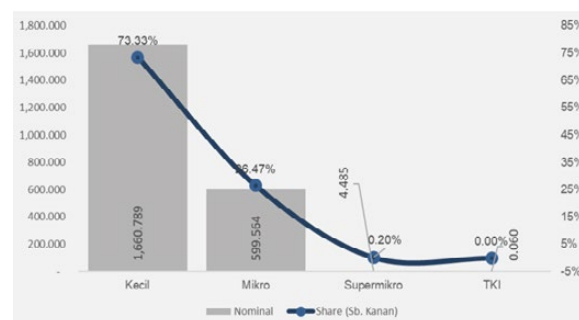
Sumber: DJPB Provinsi Lampung



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.30 Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi

KUR yang disalurkan (Grafik 4.30). Sektor ekonomi penerima KUR lainnya adalah Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (4,27%) dan Industri Pengolahan (4,14%). Total debitur yang menerima KUR di Provinsi Lampung selama triwulan I 2024 tercatat paling banyak dengan skema Kecil (Grafik 4.31) mencapai 1,66 Triliun (73,33%), diikuti dengan skema Mikro mencapai 599 Miliar (26,47%).



Sumber: DJPB Provinsi Lampung

Grafik 4.31 Penyaluran KUR berdasarkan Skema



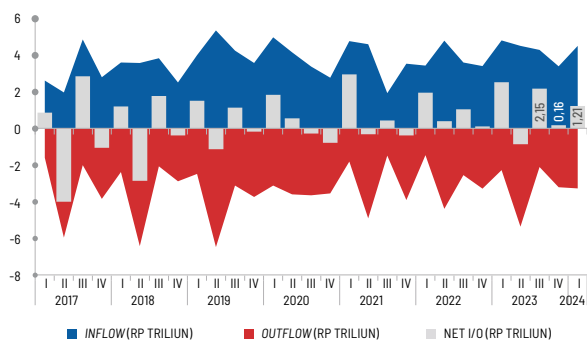
BAB 5

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan uang kartal di Lampung pada triwulan I 2024 sesuai dengan pola musimannya . Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami *net inflow* sebesar Rp1,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp0,16 triliun. Kondisi *net inflow* yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan tingginya uang yang masuk ke Bank Indonesia pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru.

Transaksi pembayaran nilai besar menunjukkan adanya indikator membaiknya perekonomian Lampung. Transaksi melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi RTGS mengalami peningkatan yakni dari Rp35,28 triliun menjadi sebesar Rp35,58 triliun. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif. Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 14,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 27,23% (yoy). Berdasarkan jenisnya, fenomena melambatnya penurunan transaksi kliring tersebut didorong oleh pertumbuhan kliring kredit serta kliring debit yang tercatat terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perkembangan *merchant* QRIS di Lampung menunjukkan peningkatan sejalan dengan tren peningkatan *merchant* QRIS di wilayah Sumatera. Sampai dengan Maret 2023, *merchant* QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 527.051 *merchant*. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi *merchant* QRIS se-Sumatera pada triwulan I 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,55%, 16,25%, dan 13,24% (qtq) . Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,46% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsaanya, *merchant* QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,46%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.



Sumber : Bank Indonesia

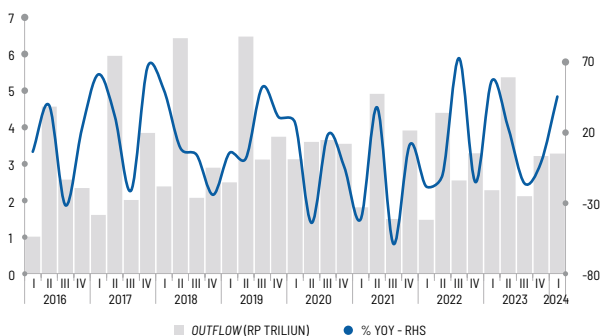
Grafik 5.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal Triwulanan

5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Perkembangan transaksi sistem pembayaran tunai dilihat dari beberapa indikator, antara lain jumlah aliran uang masuk dari Perbankan ke Bank Indonesia (*inflow*), jumlah aliran uang keluar dari Bank Indonesia ke Perbankan (*outflow*), termasuk dukungan penyediaan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan, seperti penukaran uang melalui Bank Indonesia, Kas Keliling, dan Kas Titipan.

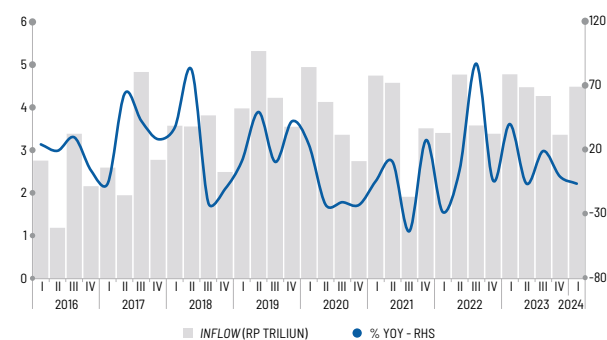
5.1.1 Perkembangan Aliran Uang Kartal

Bank Indonesia, sebagai otoritas sistem pembayaran, berkomitmen untuk menyediakan uang tunai sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung. Perkembangan uang kartal di Lampung pada triwulan I 2024 sesuai dengan pola musimannya. **Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp1,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp0,16 triliun.** Kondisi *net inflow* yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan tingginya uang yang masuk ke Bank Indonesia pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru (**Grafik 5.1**). Secara lebih rinci, dapat dilihat bahwa aliran uang kartal *inflow* tercatat menurun sebesar 6,11% (yoy) (**Grafik 5.2**) pada triwulan I 2024, lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat menurun sebesar 0,59% (yoy). Di sisi lain, aliran uang kartal *Outflow* mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 43,93% (yoy) (**Grafik 5.3**), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang masih mengalami terkontraksi sebesar 2,29% (yoy).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Aliran Uang Kartal Outflow



Sumber : Bank Indonesia

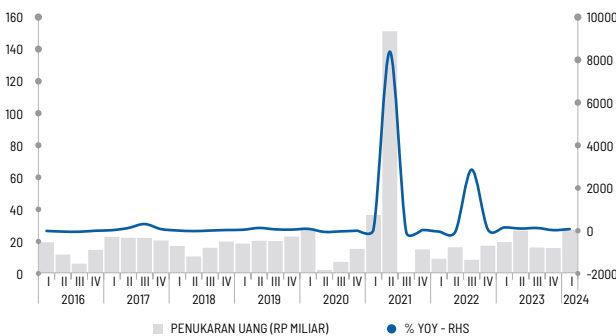
Grafik 5.2 Aliran Uang Kartal Inflow

5.1.2 Penyediaan Uang Layak Edar

Dalam pelaksanaan tugas pada bidang Pengelolaan Uang Rupiah, Bank Indonesia melakukan pengedaran uang ke berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tersedia dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan tentunya dalam kondisi yang layak edar.

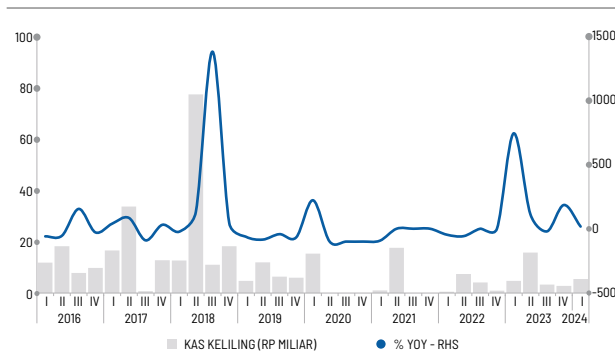
Sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang layak edar (*clean money policy*) tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung secara berkala melaksanakan layanan penukaran Uang Tidak Layak Edar (UTLE) baik secara langsung melalui loket penukaran kantor Bank Indonesia dan kas keliling, serta bersinergi dengan Perbankan untuk turut menerima penukaran uang. Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitasnya (*soil level*), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung juga secara berkala melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).

Pada triwulan I 2024 penukaran uang melalui Bank Indonesia tercatat sebesar Rp26,98 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15,44 miliar (Grafik 5.4). Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang tidak layak edar yang disetor oleh masyarakat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, serta tingginya minat masyarakat untuk menukar uang baru menjelang HKBN Idul Fitri pada acara Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2024 yang diselenggarakan pada Maret hingga April 2024. Pada triwulan I 2024, penukaran melalui kas keliling tercatat sebesar Rp5,52 miliar meningkat jika dibandingkan dengan Rp2,79 miliar triwulan sebelumnya (**Grafik 5.5**).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.4 Penukaran Uang Melalui BI



Sumber : Bank Indonesia

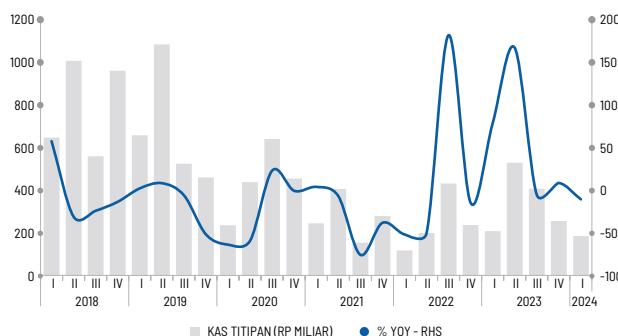
Grafik 5.5 Kas Keliling

Selanjutnya, KPwBI Provinsi Lampung tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan Uang Layak Edar (ULE) khususnya di daerah terpencil melalui kegiatan kas titipan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung saat ini memiliki 1 (satu) Kas Titipan yang berada di Liwa, Kabupaten Lampung Barat dengan Bank Pengelola PT BRI KC Liwa. Kas Titipan Liwa memiliki 4 (empat) Bank Peserta yang terdiri dari BNI, Bank Mandiri, BSI, dan BPD Lampung. Adapun selama triwulan I 2024, transaksi keluar kas titipan Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp183,32 miliar (Grafik 5.6), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp254,03 miliar.

Pada periode laporan, UTLE yang dimusnahkan tercatat sebesar Rp1,4 triliun. Dibandingkan dengan nominal inflow, persentase pemusnahan tersebut tercatat sebesar 31,35%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 38,26% (Grafik 5.7).

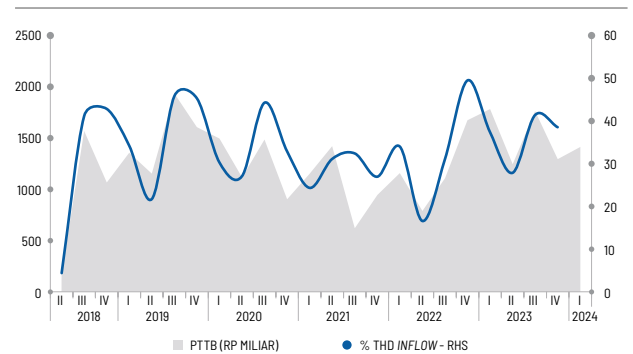
5.1.3 Perkembangan Temuan Uang Palsu

Pada triwulan I 2024, terdapat temuan uang palsu sebanyak 1042 lembar di Provinsi Lampung (Grafik 5.8). Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan temuan uang palsu pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 860 lembar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah uang palsu yang ditemukan mengalami penurunan sebesar 17,04% (yoy). Berdasarkan komposisinya, temuan uang palsu pada triwulan I 2024 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB) (Grafik 5.9), dengan pecahan terbanyak



Sumber : Bank Indonesia

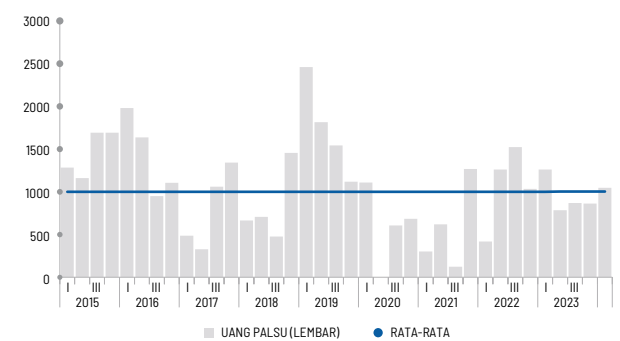
Grafik 5.6 Kas Titipan



Sumber : Bank Indonesia

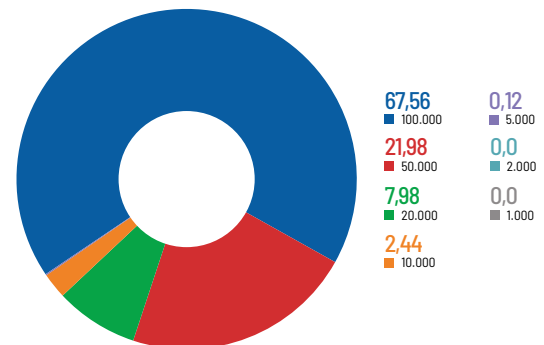
Grafik 5.7 Perkembangan Pemusnahan UTLE

Rp100.000. Sementara itu, untuk Uang Pecahan Kecil (UPK) tercatat ditemukan 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp20.000, 36 (tiga puluh enam) lembar pecahan Rp10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp2.000, dan 2 (dua) lembar pecahan Rp1.000. Upaya pencegahan dan penanganan uang palsu tetap terus dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung melalui sosialisasi dan edukasi program Cinta Bangsa Pahami Rupiah yang mencakup materi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR) kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui berbagai platform. Selain itu, sinergi dengan perbankan dan pihak aparaturnya hukum juga dilakukan sebagai upaya untuk terus menurunkan tindak kejahatan peredaran uang palsu di Provinsi Lampung.



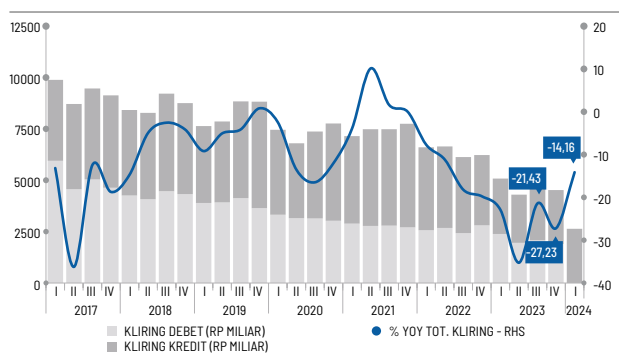
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Temuan Uang Palsu



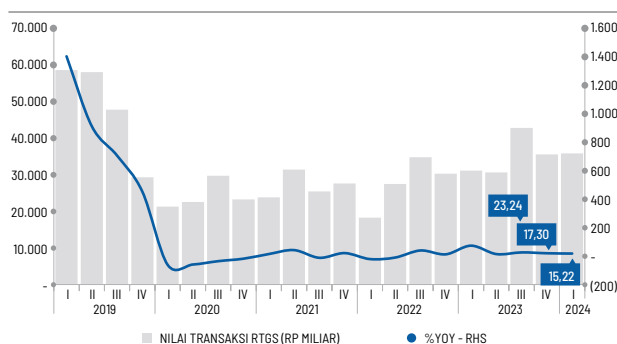
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Pecahan Uang Palsu Tw IV 2023



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi Klining



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi RTGS

5.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BANK INDONESIA

Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, *Real Time Gross Settlement* (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Klining Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Transaksi pembayaran melalui SKNBI tercatat terkontraksi sebesar 14,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi sebesar 27,23% (yoy) (**Grafik 5.10**). Berdasarkan jenisnya, fenomena melambatnya penurunan transaksi klining tersebut didorong oleh pertumbuhan klining kredit serta klining debit yang tercatat terkontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal transaksi klining debit tercatat terkontraksi sebesar 27,34% (yoy). Sejalan dengan nominal transaksi klining debit yang mengalami kontraksi sebesar 2,49% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan tahunan transaksi SKNBI yang berada pada area pertumbuhan negatif sejak tahun 2017.

Selanjutnya, berbeda dengan SKNBI, nilai transaksi pembayaran melalui RTGS tercatat tumbuh positif, yakni sebesar 15,22% (yoy) (Grafik 5.11). Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, nominal transaksi RTGS mengalami peningkatan yakni dari Rp35,28 triliun menjadi sebesar Rp35,58 triliun. Adapun perkembangan transaksi RTGS tersebut merupakan salah satu indikator atas membaiknya aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Selain ditopang oleh momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19, hal ini juga menjadi indikasi perubahan *landscape* penggunaan sistem pembayaran di Provinsi Lampung seiring peningkatan akseptasi sistem pembayaran non tunai.

Lebih lanjut, untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transfer dana yang lebih efisien, cepat (*real-time*), serta tersedia setiap saat (24/7), Bank Indonesia telah mengembangkan BI-FAST sebagai infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat

mengakomodasi kebutuhan dimaksud. Dengan kehadiran BI-FAST, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional melalui penyediaan alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional eksisting yang terbatas pada jam operasional tertentu.

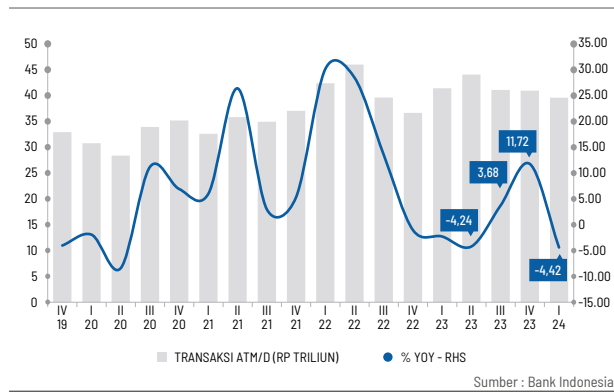
Fitur BI-FAST antara lain mencakup operasional setiap saat (24/7), dana diterima secara *real-time* oleh nasabah dan bank, melayani transfer kredit (*push*) dan debit (*pull*), dapat menggunakan *proxy address* (antara lain nomor *handphone* dan *email*) sebagai pengganti nomor rekening, notifikasi kepada nasabah secara otomatis, *fraud detection system* dan *Anti Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT). BI-FAST telah diimplementasikan mulai Desember 2021 melalui kanal *mobile/internet* maupun *counter*, yang kemudian akan dikembangkan melalui kanal lainnya, a.l. QRIS, ATM, dan EDC.

5.3 PERKEMBANGAN TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK

Perkembangan alat pembayaran di Indonesia terus berevolusi dengan pesat. Jika semula alat pembayaran hanya berupa instrumen tunai (*cash based*), saat ini sudah semakin beralih menjadi alat pembayaran non tunai. Beberapa contoh pembayaran non tunai, seperti cek dan bilyet giro, diproses menggunakan mekanisme klining/*settlement*. Selain itu, saat ini juga dikenal alat pembayaran *paperless*, seperti alat pembayaran menggunakan Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit (*card based*) serta transfer dana elektronik.

Mengacu pada perkembangan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam satu dekade terakhir telah terjadi gelombang digitalisasi yang cukup signifikan dan mengubah perilaku masyarakat secara drastis. Pola konsumsi masyarakat kini mulai bergeser dan menuntut pembayaran serba *mobile*, cepat, serta aman melalui berbagai *platform*.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang sistem pembayaran memiliki tugas untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar. Oleh karena itu, perkembangan sistem pembayaran harus



Grafik 5.12 Perkembangan Transaksi Kartu ATM/D

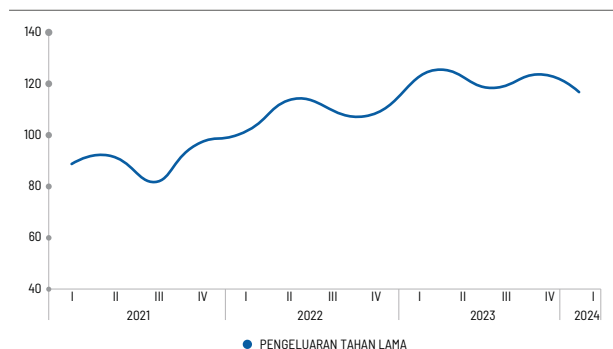
selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan berjalannya kegiatan sistem pembayaran nasional.

5.3.1 Perkembangan Transaksi APMK

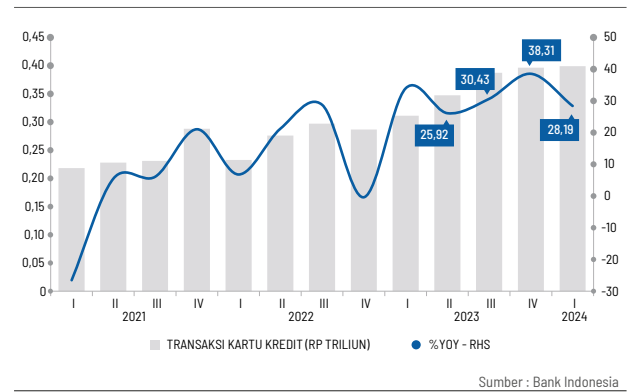
Pada periode laporan, nominal transaksi kartu ATM/Debit tercatat terkontraksi sebesar 4,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan 11,72% triwulan sebelumnya (yoy) (**Grafik 5.12**). Pertumbuhan transaksi kartu ATM/Debit yang melambat tersebut terpantau juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, dimana indeks pengeluaran konsumsi untuk barang tahan lama menunjukkan angka yang optimis (>100) namun lebih rendah selama periode triwulan I 2023, dengan rata-rata sebesar 117,00 (**Grafik 5.13**).

Sejalan dengan perkembangan kartu ATM/Debit, transaksi pembayaran melalui kartu kredit pada triwulan I 2024 terpantau 28,19% (yoy) (**Grafik 5.14**), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 38,31% (yoy).

Secara lebih rinci, berdasarkan jenis transaksinya terlihat bahwa pertumbuhan yang lebih rendah transaksi kartu kredit secara signifikan disebabkan oleh lebih dalam terkontraksinya transaksi billpay yang pada periode sebelumnya tercatat sebesar 59,47% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar 63,56% (yoy). Di sisi lain, transaksi belanja tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 22,89%, lebih rendah jika dibandingkan 41,55% triwulan sebelumnya (**Grafik 5.15**).



Grafik 5.13 Indeks Pengeluaran Konsumsi Barang Tahan Lama

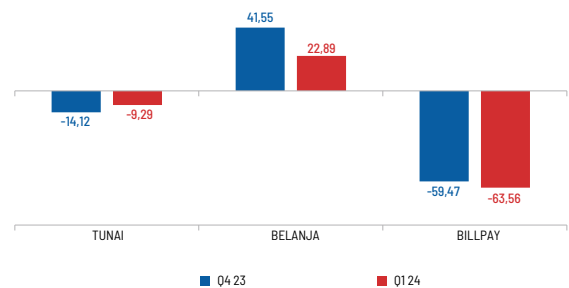


Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

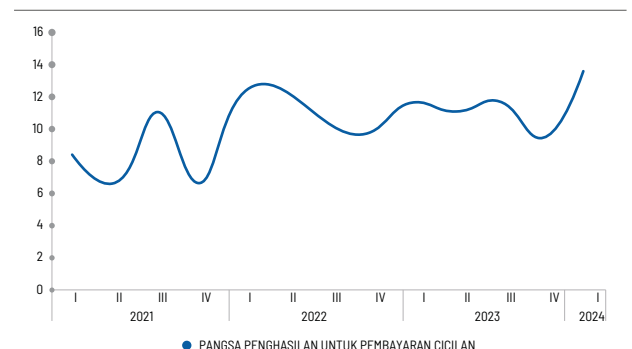
Lebih lanjut, lebih rendahnya transaksi belanja juga terpantau sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung. Pada periode laporan, pangsa penghasilan untuk pembayaran cicilan terpantau mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (**Grafik 5.16**).

5.3.2 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

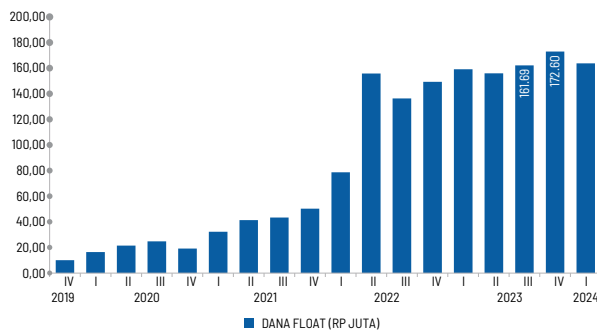
Pada triwulan I 2024, dana *float* atau nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna tercatat sebesar Rp163,28 miliar (**Grafik 5.18**), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar Rp172,60 miliar. Berdasarkan jenis transaksinya, perkembangan uang elektronik pada triwulan I 2024



Grafik 5.15 Pertumbuhan Kartu Kredit Per Jenis Transaksi (% yoy)



Grafik 5.16 Pangsa Penghasilan untuk Pembayaran Cicilan (Hasil SK)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.17 Perkembangan Dana Float UE

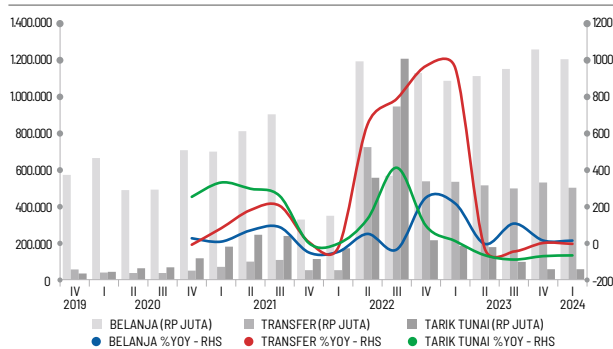
mengalami pertumbuhan pada transaksi belanja sebesar 10,86% (yoy) meskipun lebih rendah jika dibandingkan 11,34% pada triwulan sebelumnya. Sedangkan, untuk transaksi transfer dan tarik tunai mengalami kontraksi masing-masing sebesar 5,99% (yoy) dan 69,48% (yoy) (Grafik 5.18).

Berdasarkan pangsa, transaksi uang elektronik pada periode laporan sebagian besar berasal dari transaksi belanja dengan pangsa mencapai 65,27% (Grafik 5.19). Sementara itu, pada kedua jenis transaksi lainnya, yaitu tarik tunai dan transfer pangsa masing-masing sebesar 3,04% dan 27,23%.

Secara umum, tren peningkatan penggunaan digitalisasi pembayaran di Provinsi Lampung juga tergambar dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), yakni dari 5,58 di tahun 2021 menjadi sebesar 5,63 di tahun 2022. Peningkatan tersebut ditopang oleh komponen penggunaan yang meningkat sebesar 3,31%. (Grafik 5.20).

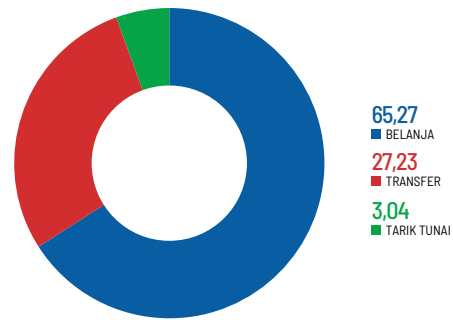
5.4 PERKEMBANGAN MERCHANT & PENGGUNA QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan akseptasi pembayaran digital melalui implementasi QRIS dengan tujuan untuk mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, perluasan QRIS



Sumber : Bank Indonesia

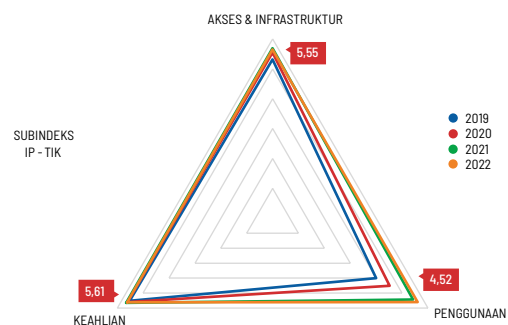
Grafik 5.18 Perkembangan Transaksi UE Per Jenis Transaksi



Sumber : Bank Indonesia

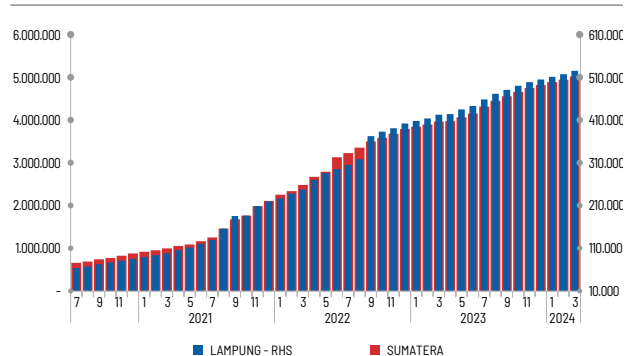
Grafik 5.19 Pangsa Transaksi UE Triwulan I 2024

difokuskan pada fungsi-fungsi ekonomi tradisional yang bersifat massal (pasar tradisional). Perkembangan merchant QRIS di Lampung menunjukkan peningkatan sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera (Grafik 5.21). Sampai dengan Maret 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 527.051 merchant.. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan I 2024 dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara, Provinsi, Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 24,55%, 16,25%, dan 13,24% (qtq) (Grafik 5.22). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 10,46% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsa, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,46%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau (Grafik 5.23).



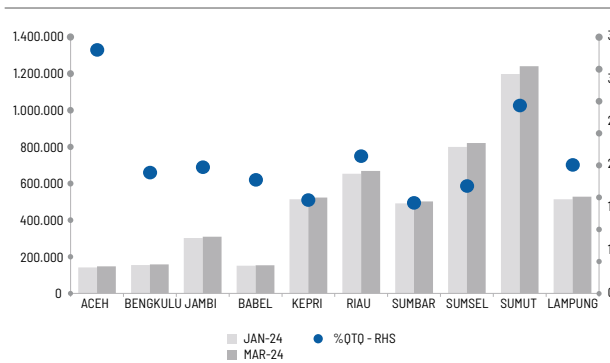
Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 5.20 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.21 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



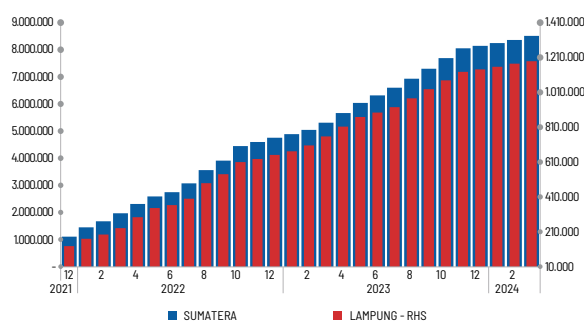
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.22 Pertumbuhan Merchant QRIS Triwulanan

Sampai dengan Desember 2024, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.188.366 (**Grafik 5.24**). Jumlah ini mengalami pertumbuhan 1,22% (qtq) dari triwulan sebelumnya.

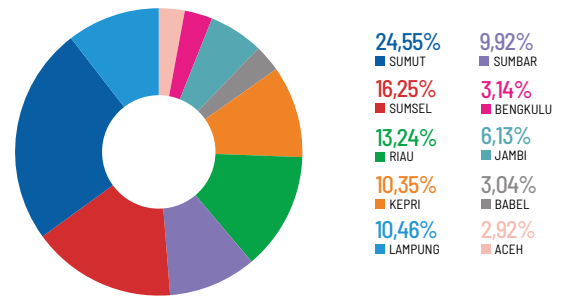
Berbagai strategi program perluasan QRIS telah dilakukan oleh KPwBI Provinsi Lampung dalam rangka perluasan QRIS pada tahun 2024, antara lain:

- *Showcasing* produk UMKM dengan metode pembayaran QRIS, bekerja sama dengan UMKM mitra dan binaan KPwBI Provinsi Lampung pada tanggal 23 Februari - 3 Maret 2024.
- Dukungan penyelenggaraan *High Level Meeting* TP2DD Provinsi Lampung pada 27 Maret 2024 bersama dengan Kota Metro dengan tema "Meningkatkan Kapasitas Aparatur Tentang Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada pengelolaan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Metro pada 27 Februari 2024.
- Penyelenggaraan Capacity Building dan Koordinasi Perluasan Digitalisasi Provinsi Lampung pada 7-8 Maret 2024 bersama dengan KPwDN Sumatera Utara dan Jawa Timur serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada wilayah tsb di Jakarta.
- Berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dalam penyediaan Posko Mudik Lebaran tahun 2024 di KM20 Tol Bakauheni - Terbanggi Besar.
- Dukungan penyelenggaraan *High Level Meeting* TP2DD Kabupaten



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.24 Perkembangan Pengguna QRIS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.23 Pangsa Merchant QRIS di Sumatera

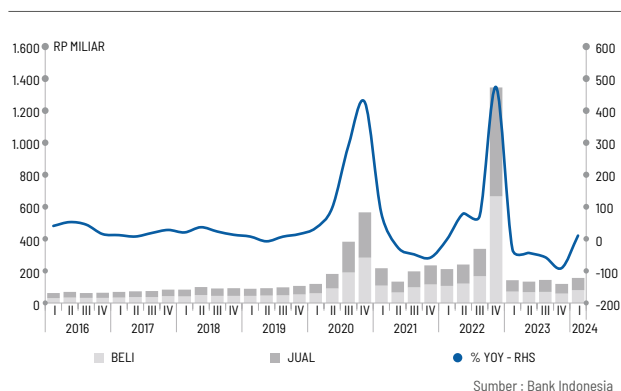
Pringsewu dalam rangka menjalankan program peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna percepatan digitalisasi pada pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 26 April 2024.

- Partisipasi pengambilan race pack dengan menggunakan QRIS Rp1,- pada penyelenggaraan HUT Provinsi Lampung ke-60.
- Sosialisasi penggunaan QRIS, BI-FAST, CBP Rupiah dan Perlindungan Konsumen kepada berbagai komunitas Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan GenBI.
- Kontribusi dalam Pekan Raya Lampung, berupa QRIS *Experience* kepada *tenant* dengan penggunaan QRIS terbanyak
- Pemilihan Duta QRIS CBP dan Muli Mekhanai Lampung 2024
- Dukungan Pemilihan Puti Indonesia Provinsi Lampung
- *QRIS Experience* kepada UMKM binaan dan juga *Coffee Shop* di Provinsi Lampung.
- *Training of Trainers* (ToT) QRIS dan CBP Rupiah kepada Guru SD dan SMP se-Kota Bandar Lampung

5.5 KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)

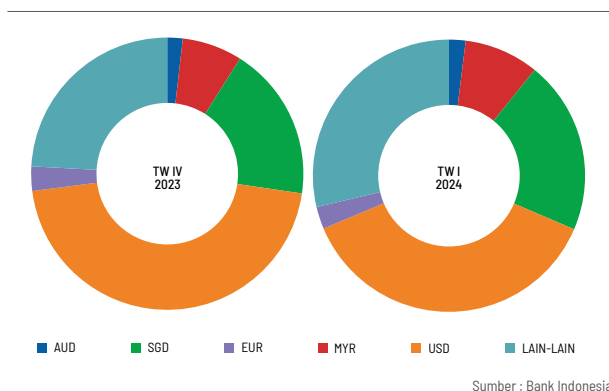
Kegiatan Penukaran Valuta Asing merupakan kegiatan jual beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*Traveller's Cheque*). Kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh Perbankan maupun badan usaha bukan bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, atau biasa disebut dengan *money changer*. Guna mendukung terciptanya perdagangan valuta asing yang sehat dan aman bagi masyarakat, Bank Indonesia telah mengatur tata cara perizinan dan pengawasan Kegiatan Penukaran Valuta Asing yang dilakukan oleh Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan tersebut tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Pada triwulan I 2024 transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp157,18 miliar, meningkat dibandingkan total transaksi triwulan sebelumnya sebesar Rp120,49 miliar. Nominal transaksi

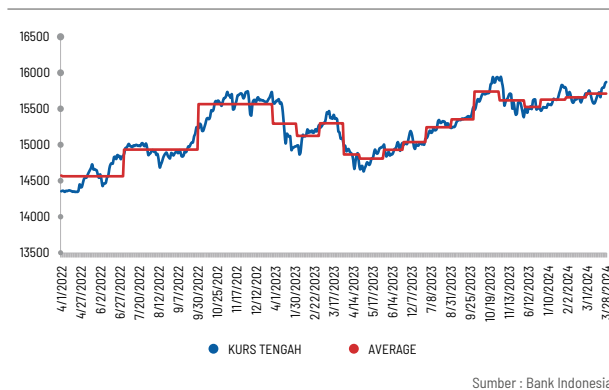


Grafik 5.25 Transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung

tersebut tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 9,93% (yoy) (**Grafik 5.25**). Berdasarkan jenis transaksinya, pangsa transaksi jual (dilihat dari sisi KUPVA BB) pada periode laporan tercatat sebesar 49,13%, sedangkan transaksi beli sebesar 50,87%. Rata-rata kurs tengah US Dollar pada triwulan I 2024 tercatat sebesar Rp15.711,39, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar Rp15.527,86 (**Grafik 5.27**). Sementara itu, berdasarkan komposisi mata uangnya, dapat dilihat bahwa pangsa transaksi penjualan dan pembelian mata uang USD dan SGD mendominasi transaksi KUPVA BB di Provinsi Lampung, masing-masing sebesar 37,21% dan 20,60% (**Grafik 5.26**).



Grafik 5.26 Transaksi KUPVA BB Per Jenis Mata Uang



Grafik 5.27 Pergerakan Kurs Nilai Tukar USD-IDR



BOKS 4

Dorong Perluasan QRIS, Bank Indonesia Provinsi Lampung Gandeng PJP Dan Influencer Pada Event Kuliner



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Lampung

Gambar B4.1 Sambutan Kepala KPwBI Provinsi Lampung pada KLF x BNI Food Festival



Sumber: Bank Indonesia Provinsi Lampung

Gambar B4.2 Kolaborasi dengan Influencer Mendorong Transaksi QRIS

Sebagai respon pada transformasi ekonomi ke arah digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung terus berupaya mengakselerasi perluasan digitalisasi transaksi pembayaran di Provinsi Lampung. Akseptansi pembayaran digital di masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan infrastruktur dan instrumen pembayaran retail, salah satunya melalui kanal *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Pada tahun 2024, KPwBI Provinsi Lampung memfokuskan perluasan QRIS melalui event kuliner yang merupakan salah satu sektor pendorong perekonomian di Provinsi Lampung. Pelaksanaan event kuliner tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) baik bank maupun non-bank serta *influencer* lokal Lampung.

Pada 23 Februari 2024, Bank Indonesia berkolaborasi dengan BNI dan Kuliner Lampung (*content creator*) menyelenggarakan Kuliner Lampung Festival x BNI Food Festival berlokasi di Lampung City Mall dengan durasi acara selama 10 hari. Kegiatan tersebut berhasil menyumbangkan 26.263 frekuensi transaksi menggunakan QRIS dengan omset total > Rp1 miliar.

Melanjutkan suksesnya Kuliner Festival dengan BNI, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kuliner Lampung menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan replikasi kegiatan tersebut pada event Kuliner Lampung Festival x Beauty Fair yang berlangsung pada 29

Maret s.d. 2 April 2024. Pada acara ini terdapat 29 *merchant* kuliner & *beauty*, serta seluruh transaksi pembayaran dilakukan melalui kanal QRIS.

Selain dengan PJP Bank, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut berkolaborasi dengan PJP Non-Bank, yaitu AstraPay. Bertepatan dengan 35 tahun FIFGROUP, diselenggarakan event kuliner Mini Localicious berkolaborasi dengan Kuliner Lampung Fest. Event ini merupakan bentuk kolaborasi pertama Bank Indonesia Provinsi Lampung dengan AstraPay dan diharapkan akan terus berlanjut pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mini Localicious yang diadakan selama 10 hari berhasil mencapai transaksi QRIS dengan total nominal Rp625,5 juta dan frekuensi sebanyak 23.039 transaksi.

Pada setiap event kuliner yang diadakan, Bank Indonesia Provinsi Lampung turut mengapresiasi *merchant* dengan nominal dan frekuensi transaksi tertinggi dengan harapan seluruh *merchant* yang terlibat dapat terus menjadi agen perluasan QRIS di Provinsi Lampung.







BAB 6

Ketenagakerjaan & Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja, meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,56% poin dari 72,07% pada Februari 2023 menjadi 71,51% per Februari 2024, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,47% poin dibandingkan Agustus 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 sebesar 3,30% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,06% poin menjadi 4,12% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2024 mencapai 22,18%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 46,19% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17,92%.

Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 120,58; meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 115,66.

Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023.



Tabel 6.1 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung

INDIKATOR	2020		2021		2022		2023		2024	Δ YoY	Δ qtq
	FEB	AUG	FEB	AUG	FEB	AUG	FEB	AUG	FEB		
Penduduk Usia Kerja (15+) (ribu)	6.189,4	6.399,5	6.440,1	6.481,2	6.855,6	6.560,3	6.942,0	7.003,3	7.053,6	111,60	50,29
Angkatan Kerja (ribu)	4.433,6	4.489,7	4.619,7	4.495,0	4.971,1	4.595,9	5.003,1	4.909,9	5.044,0	40,90	134,14
Bekerja	4.243,8	4.280,1	4.409,8	4.284,3	4.756,8	4.388,0	4.794,0	4.697,7	4.836,3	42,30	138,67
Pengangguran	189,7	209,6	209,9	210,6	214,3	208,0	209,1	207,2	207,7	(1,41)	0,46
Bukan Angkatan Kerja (ribu)	1.755,8	1.909,9	1.820,5	1.986,2	1.884,5	1.964,3	1.938,8	2.098,3	2.009,5	70,70	(88,78)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	71,6	70,16	71,73	69,35	72,51	70,06	72,1	70,0	71,5	(0,56)	1,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	4,3	4,67	4,54	4,7	4,31	4,52	4,2	4,2	4,1	(0,06)	(0,11)
Pekerja Tidak Penuh (ribu)	1.605,4	1.917,6	1.890,7	1.792,5	1.953,8	1.606,9	1.986,2	1.744,7	2.011,6	25,40	266,89
Setengah Penganggur	378,1	564,3	422,9	442,4	390,9	303,5	369,9	399,3	521,6	151,70	122,30
Pekerja Paruh Waktu	1.227,3	1.353,3	1.467,8	1.350,1	1.562,9	1.303,4	1.616,3	1.345,4	1.490,0	(126,30)	144,59

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

6.1 KETENAGAKERJAAN

Pada Februari 2020 dan Februari 2021 penghitungan indikator ketenagakerjaan masih menggunakan penimbang hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015). Sementara untuk Februari 2022 penghitungan indikator ketenagakerjaan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk interim yang merupakan proyeksi sementara hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Penimbang adalah faktor pengali sampel survei untuk menghasilkan estimasi populasi penduduk. Data yang disajikan saat ini adalah tiga titik periode semesteran yaitu Februari 2023, Agustus 2023, dan Februari 2024.

Berdasarkan data terkini kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja, meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

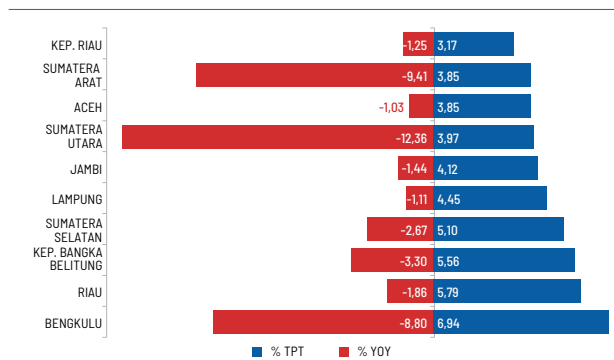
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada Februari 2024 sebesar 71,51% mengalami perlambatan sebesar 0,56% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 72,07%, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,47% poin dibandingkan Agustus 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 sebesar 3,30% (yoy). Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, peningkatan jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 terjadi pada sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi dengan penambahan persentase angkatan kerja sebesar 30,71% dan pada sektor jasa pendidikan sebesar 28,99%. Apabila dibandingkan dengan Agustus 2023, peningkatan jumlah angkatan kerja terbesar berada pada jasa penyediaan akomodasi dan makan minum (30,80%); sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (27,32%); serta sektor konstruksi (20,46%).

Apabila dilihat dari komposisi, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,19%; perdagangan besar dan eceran sebesar 17,92%; dan pertambangan, industri pengolahan sebesar 9,04%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan Februari 2023, tiga kategori lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kontribusi terbesar adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 1,12%, sektor jasa pendidikan sebesar 1,04%, dan sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,69%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2023, peningkatan distribusi terbesar berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 3,87%, sektor jasa pendidikan sebesar 0,60%, dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 0,40%.

Aspek lain terkait TPAK adalah disparitas gender di pasar tenaga kerja. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, TPAK pria mengalami kontraksi sebesar 0,63% poin (dari 88,39% pada Februari 2023 menjadi 87,76% pada Februari 2024). Sejalan dengan hal tersebut, TPAK Perempuan turut mengalami kontraksi sebesar 0,43% poin (dari 54,98% per Februari 2023 menjadi 54,55% per Februari 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan disparitas gender di pasar tenaga kerja Provinsi Lampung.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat berkontraksi sebesar 0,06% poin dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu dari 4,18% pada Februari 2023 menjadi 4,12% pada periode laporan. Terkontraksinya angka TPT merupakan salah satu tolak ukur berkurangnya permasalahan ketenagakerjaan akibat keberlanjutan pemulihan roda perekonomian dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Sumatera relatif bervariasi. TPT tertinggi dialami oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu 6,94%.



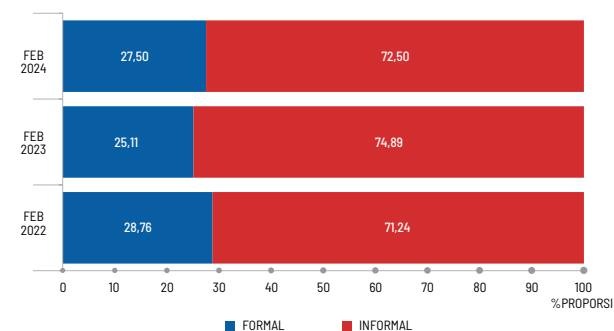
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka se-Sumatera

Sedangkan TPT yang paling rendah sebesar 3,17% dialami oleh Provinsi Bengkulu. Adapun Provinsi Lampung memiliki TPT terendah kelima se-Sumatera (Grafik 6.1).

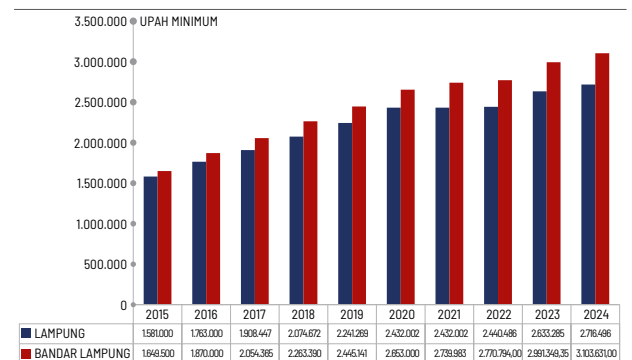
Patut dicermati bahwa angka pengangguran terbuka relatif lebih tinggi di kawasan perkotaan (5,46%) dibandingkan kawasan pedesaan (3,41%). Jika dibandingkan dengan Februari 2023, TPT perkotaan mengalami kontraksi sebesar 0,28 poin dan TPT pedesaan mengalami kontraksi sebesar 0,04% poin. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan angka pengangguran terbuka baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan mengalami penurunan akibat mobilitas masyarakat kembali normal. Hal ini didukung dengan realisasi kegiatan usaha yang meningkat signifikan 24,51%, sejalan dengan pembukaan beberapa lapangan kerja baru.

Selain dilihat dari sisi faktor penawaran yang mengalami perbaikan, kondisi pasar tenaga kerja Provinsi Lampung juga perlu dilihat dari sisi perkembangan tingkat upah tenaga kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2024 tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp83.211,89 (3,16%) menjadi Rp2.716.496,39 dibanding tahun 2023 yang semula sebesar Rp2.633.285,50. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan tingkat UMP pada tahun 2024 sebesar 3,75% menjadi Rp3.103.631,00 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.991.349,35 (Grafik 6.2).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.3 Porsi Penduduk Bekerja

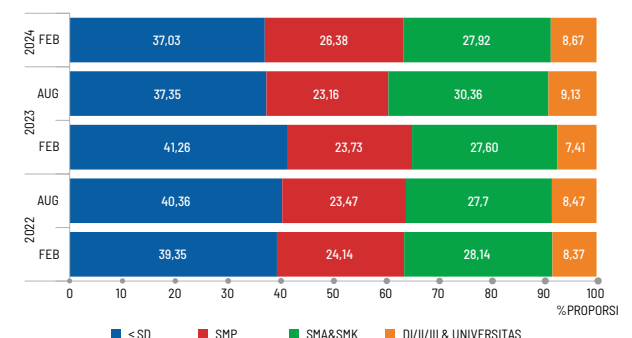


Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.2 Perkembangan Upah Minimum Lampung

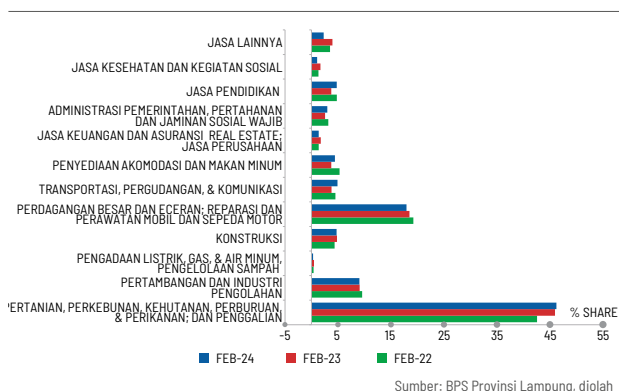
Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja di periode laporan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari menurunnya jumlah *full time worker* (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 0,16% (yoy) dibanding Februari 2023 atau tercatat sebesar 2.824,7 ribu orang (58,41%). Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu dan tidak memerlukan tambahan pekerjaan mengalami penurunan sebesar 2,90% (yoy) atau tercatat sebesar 1.490,0 ribu orang (30,81%) dari total penduduk bekerja. Selanjutnya untuk kategori pekerja setengah penganggur dalam arti bekerja kurang dari 35 jam dan masih mengharapkan tambahan pekerjaan dan jam kerja, tercatat juga mengalami peningkatan sebesar 3,07% (yoy) atau sebesar 521,6 ribu orang (10,78%).

Berdasarkan status pekerjaan utama, belum terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi tenaga kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sektor informal terpantau masih mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan pangsa 72,50% jauh lebih tinggi dibanding sektor formal yang hanya mencapai 27,50% dari keseluruhan tenaga kerja di Provinsi Lampung (Grafik 6.3). Dibandingkan posisi Februari 2023, jumlah pekerja informal dan formal masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar -2,39% dan 2,39% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan lapangan kerja meningkat seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

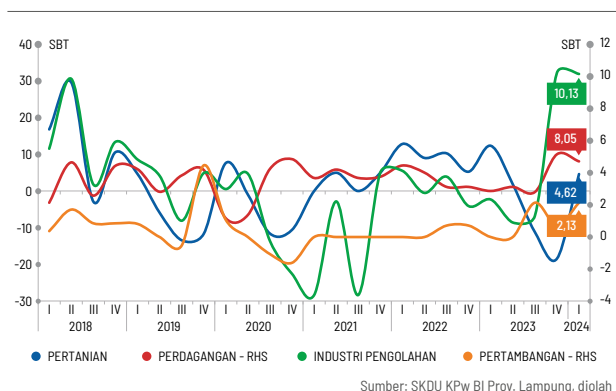
Grafik 6.4 TPAK Menurut Tingkat Pendidikan



Grafik 6.5 Share Tenaga Kerja

Selaras dengan status pekerjaan utama tenaga kerja di Provinsi Lampung pada periode Februari 2024 yang masih didominasi oleh pekerjaan informal, ditinjau dari tingkat pendidikan tercatat bahwa sebagian besar pekerja berada pada kategori pendidikan rendah. Sebesar 1.790,7 ribu orang (37,03%) merupakan tamatan SD ke bawah dan 1.276,0 ribu orang (26,38%) merupakan tamatan SMP. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah atau tamatan SMA umum maupun SMK Kejuruan tercatat sebesar 1.350,3 ribu orang (27,92%). Adapun untuk level pendidikan tinggi atau DI/II/III dan Universitas tercatat sebesar 419,3 ribu orang (8,67%) (Grafik 6.4).

Perlu menjadi perhatian bahwa pada periode laporan, TPT terbesar disumbang oleh kategori tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,60%, sedangkan TPT yang paling rendah adalah tenaga kerja dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 1,38%. Hal ini mengindikasikan pemulihan yang belum sepenuhnya pulih pasca selesainya pandemi COVID-19. Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja sebagai



Grafik 6.6 Hasil SKDU Realisasi Kegiatan Usaha Berdasarkan Sektor

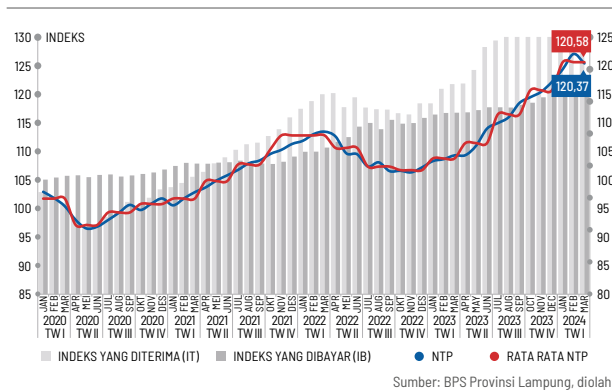
upaya dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian dalam membuka lapangan kerja, khususnya untuk percepatan pemulihan perekonomian. Program tersebut ditujukan untuk para pencari kerja, buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi dalam pengembangan perekonomian dalam skala mikro dan kecil. Adapun pendaftaran Kartu Prakerja pada 2024 telah sampai pada gelombang 68 pada 17 Mei 2024.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2024 mencapai 22,18%, sektor industri pengolahan dengan pangsa 18,24% dan sektor perdagangan dengan pangsa mencapai 15,20%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 46,19% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 17,92% (Grafik 6.5). Adapun sektor industri pengolahan berhasil menyerap 9,04% dari total penduduk bekerja.

Tabel 6.2 Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Lampung

NO	INDIKATOR	2020				2021				2022				2023				YOY (%)
		FEB-20 (ribuan orang)	PORSI	AGS-20 (ribuan orang)	PORSI	FEB-21 (ribuan orang)	PORSI	AGS-21 (ribuan orang)	PORSI	FEB-22 (ribuan orang)	PORSI	AGS-22 (ribuan orang)	PORSI	FEB-23 (ribuan orang)	PORSI	AGS-23 (ribuan orang)	PORSI	
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan; dan Penggalian	2048,9	47,00	1915,8	44,76	2019,90	45,81	1843,5	42,01	2010,79	42,54	1914,1	43,62	2297,42	45,92	1987,97	42,32	2.233,8 (46,19)
2	Pertambangan dan Industri Pengolahan	401,9	9,22	392,6	9,17	390,20	8,85	397,9	9,07	454,28	9,55	426,8	9,73	454,78	9,09	446,68	9,51	437,3 (9,04)
3	Pengadaan Listrik, Gas, & Air Minum, Pengelolaan Sampah	22,7	0,52	14,2	0,33	21,50	0,49	17,3	0,39	19,03	0,40	25,40	0,58	24,01	0,48	22,78	0,48	14,5 (0,30)
4	Konstruksi	195,9	4,49	241,0	5,63	216,90	4,92	251,0	5,72	207,40	4,36	216,7	4,94	241,15	4,82	261,03	5,56	228,5 (4,73)
5	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	800,8	18,37	807,3	18,86	811,80	18,41	829,3	18,90	913,79	19,21	866	19,74	924,57	18,48	890,46	18,96	866,8 (17,92)
6	Transportasi, Pergudangan, & Komunikasi	147,3	3,38	161,8	3,78	165,80	3,76	165,5	3,77	215,01	4,52	166,3	3,79	189,62	3,79	211,73	4,51	237,5 (4,91)
7	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163,9	3,84	168,8	3,94	198,00	4,49	194,8	4,44	251,64	5,29	183,5	4,18	186,62	3,73	240,01	5,11	213,9 (4,42)
8	Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate; Jasa Perusahaan	57,6	1,36	61,5	1,44	47,30	1,07	50,5	1,15	65,17	1,37	67,7	1,54	87,55	1,75	83,07	1,77	66,2 (1,37)
9	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,6	3,41	123,4	2,88	133,10	3,02	132,3	3,02	151,27	3,18	120,5	2,75	128,58	2,57	144,67	3,08	144,6 (2,99)
10	Jasa Pendidikan	181,6	4,27	180,6	4,22	188,00	4,26	185,3	4,22	227,38	4,78	191,7	4,37	186,62	3,73	195,71	4,17	230,5 (4,77)
11	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51,6	1,22	45,5	1,06	58,70	1,33	61,5	1,40	62,79	1,32	63,3	1,44	85,05	1,70	48,98	1,04	51,7 (1,07)
12	Jasa Lainnya	124,4	2,92	145,1	3,39	158,50	3,59	131,3	2,99	166,49	3,50	146,00	3,33	197,62	0,04	164,58	3,5	111,0 (2,30)

Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

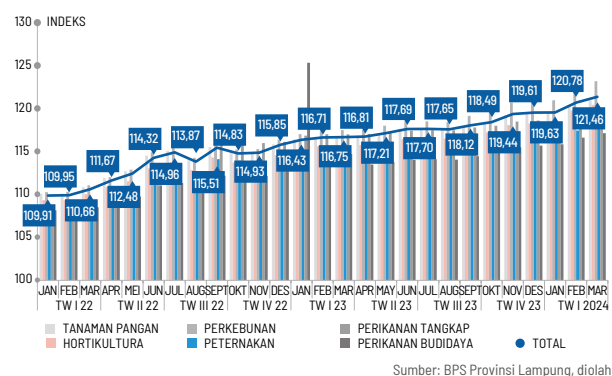


Grafik 6.7 NTP Provinsi Lampung dan Komponen Penyusunnya

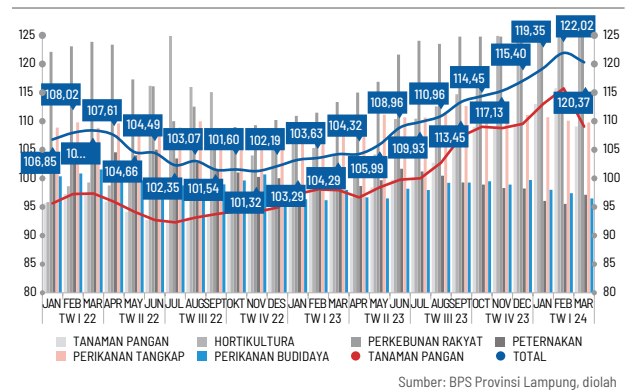
Di sisi lain, berdasarkan data realisasi kegiatan usaha hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Provinsi Lampung triwulan I 2024 secara keseluruhan tercatat tumbuh signifikan sebesar 44,60% SBT, dari triwulan IV 2023 sebesar 44,60% SBT. Secara sektoral, realisasi kegiatan usaha mengalami perlambatan pada sektor Perdagangan dari 9,98% SBT menjadi 8,05% SBT dan sektor Industri Pengolahan dari 10,20% SBT menjadi 10,13% SBT. Di sisi lain, pada sektor Pertanian mengalami pertumbuhan yang signifikan dari -18,38% SBT menjadi 4,62% SBT dan sektor Pertambangan dari 0,71% SBT menjadi 2,13% SBT. (Grafik 6.6).

Berdasarkan sektor lapangan pekerjaan, persentase penduduk bekerja di Lapangan Usaha (LU) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi mengalami peningkatan tertinggi sebesar 30,71% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya (yoy). Sektor Jasa Pendidikan juga mengalami peningkatan, tercermin dari pertumbuhan tenaga kerja sebesar 28,99% (yoy). Di sisi lain, jumlah penduduk bekerja di LU Pengadaan Listrik, Gas & Air Minum, Pengelolaan Sampah mengalami kontraksi sebesar 37,23% (yoy). Adapun LU lain yang juga mencatatkan kontraksi serapan pekerja adalah LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 36,56% (yoy). (Tabel 6.2).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sehingga sedikit menekan laju jumlah tenaga kerja menganggur sampai dengan triwulan I 2024, antara lain



Grafik 6.9 Indeks yang Dibayar per Sub Sektor



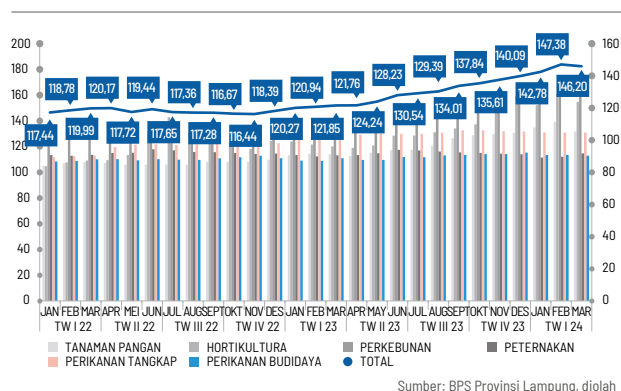
Grafik 6.8 NTP Per Sub Sektor

melalui penyelenggaraan berbagai program salah satunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas calon tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja, Pembekalan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Fasilitasi Bantuan Pelatihan Kerja Membatik bagi Penyandang Disabilitas, serta kegiatan magang dalam negeri untuk peningkatan pelayanan dan keterampilan calon pekerja migran. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder seperti Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan APINDO.

6.2 NILAI TUKAR PETANI

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator dalam melihat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Rata-rata NTP Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 120,58; meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang sebesar 115,66. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pada indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,15% (qtq) dan indeks yang diterima petani (It) sebesar 4,98% (qtq) (Grafik 6.7). Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya NTP pada triwulan I 2024 dibanding triwulan sebelumnya, maka tingkat kemampuan/daya beli petani di Provinsi Lampung menguat; sehingga dinilai kesejahteraan petani secara umum pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan.

Kemudian secara sektoral, rata-rata NTP beberapa sektor tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan IV 2023, yaitu sektor tanaman pangan yang tumbuh 3,20% (qtq), hortikultura yang tumbuh 2,89% (qtq), dan perkebunan rakyat yang tumbuh 7,19% (qtq). Disisi lain, NTP pada sektor peternakan tercatat kontraksi sebesar 2,28% (qtq), perikanan tangkap yang kontraksi sebesar 1,34% (qtq), dan perikanan budidaya yang kontraksi sebesar 2,09% (qtq) (Grafik 6.8). Secara lebih rinci, rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) di Provinsi Lampung pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 120,62 dari 119,18 pada triwulan sebelumnya (Grafik 6.9). Hal ini juga didukung oleh rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 yang tercatat mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 145,45 dari 137,85 pada triwulan sebelumnya. (Grafik 6.10).



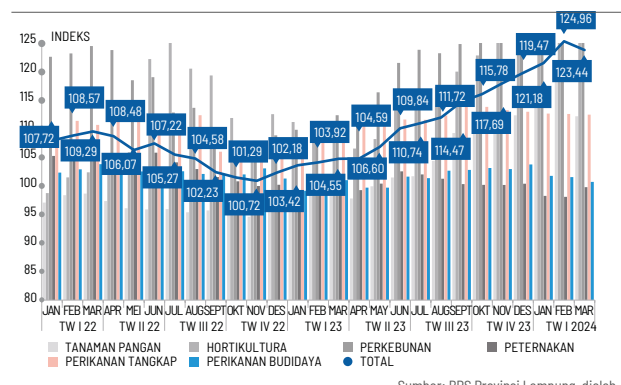
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.10 Indeks yang Diterima per Sub Sektor

Sejalan dengan hal tersebut, bila dibandingkan dengan petani provinsi lain di Sumatera, NTP Provinsi Lampung pada Triwulan I 2024 sebesar 120,37 menempati posisi keenam terbawah dari 10 Provinsi dan berada di atas Nasional yang sebesar 119,39 (Grafik 6.11). Sementara dilihat dari NTUP yang mencerminkan pengeluaran riil petani untuk usaha taninya, tercatat NTUP Provinsi Lampung meningkat sebesar 4,71% (qtq), dengan peningkatan terbesar terjadi pada sektor perkebunan dan sektor tanaman pangan masing-masing sebesar 8,21% (qtq) dan 3,17% (qtq) (Grafik 6.12).

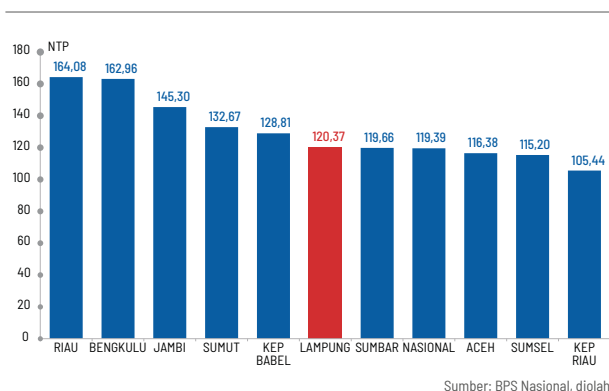
6.3 KEMISKINAN

Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebesar 3,17% (yoy), dari 995,59 ribu jiwa pada September 2022 menjadi 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023. Dari sisi komposisinya, hingga Maret 2023 penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Penduduk miskin yang terkonsentrasi di wilayah pedesaan tercatat sebesar 76%, sedangkan sisanya sebesar 24% berada di daerah perkotaan. **Dibandingkan dengan Nasional (9,36%), persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi yakni sebesar 11,11% (Grafik 6.13).** Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 jika dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera, di bawah Provinsi Aceh (14,45%), Provinsi Bengkulu (14,04%) dan Provinsi Sumatera Selatan (11,78%).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.12 Pertumbuhan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) per Subsektor



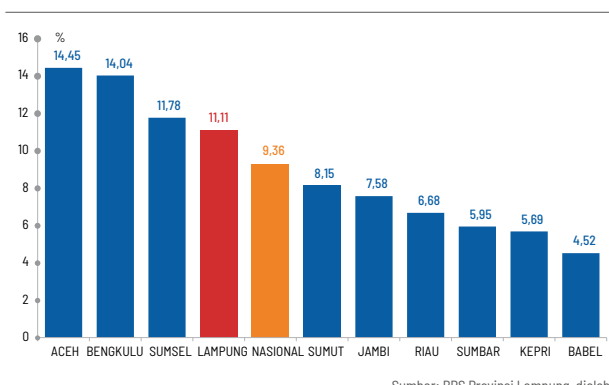
Sumber: BPS Nasional, diolah

Grafik 6.11 NTP Provinsi-Provinsi di Sumatera

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan Provinsi Lampung pada Maret 2023 mencapai 232,96 ribu jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 234,78 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Provinsi Lampung pada Maret 2023 tercatat sebanyak 737,71 ribu jiwa atau menurun sebesar 3,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 767,63 ribu jiwa (Grafik 6.14).

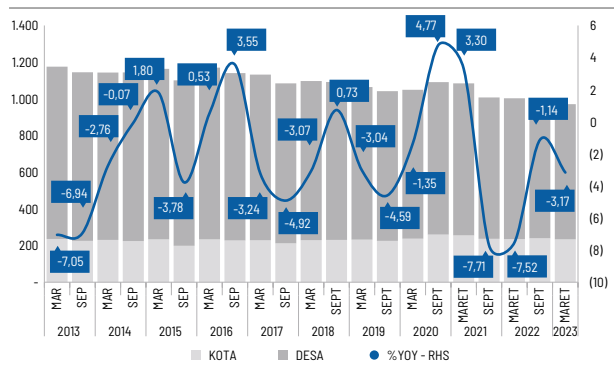
Dilihat dari pergerakan Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Lampung pada periode September 2022 sampai dengan Maret 2023 tercatat meningkat 2,38% menjadi sebesar Rp559.011,- per kapita/bulan pada Maret 2023 dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar Rp545.992,- per kapita/bulan. GK merupakan faktor lain yang menentukan tingkat kemiskinan selain faktor penghasilan. Angka GK dipengaruhi oleh komponennya yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pergerakan harga kelompok makanan sebagai komponen utama GKM (74,64%) dengan beras dan rokok kretek filter sebagai komoditas kelompok makanan yang memiliki sumbangan terbesar terhadap GK di kota maupun desa. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan menjadi salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Lampung.

Di perkotaan dan pedesaan, beras memberikan sumbangan terbesar terhadap GKM, yaitu 18,92% di perkotaan dan 20,86% di pedesaan,



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.13 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera dibandingkan Nasional



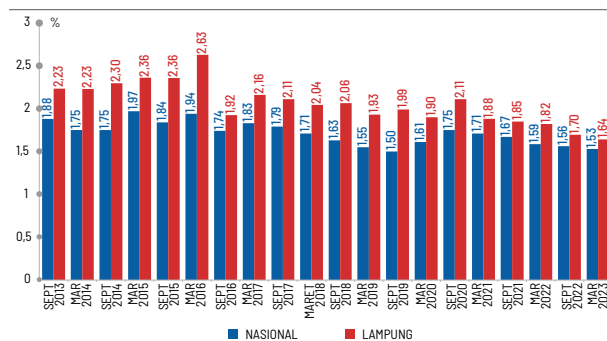
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.14 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan di Lampung

diikuti oleh komoditi rokok kretek filter, telur ayam ras, tempe, mie instan, roti, bawang merah, dan cabe rawit. Selain kelompok makanan, komoditi bukan makanan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap GKM adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi sehingga perkembangan harga komoditas-komoditas tersebut juga perlu terus dicermati (Tabel 6.3).

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan hingga 0,18 poin, yakni dari 1,82 pada Maret 2022 menjadi 1,64 pada Maret 2023 (Grafik 6.15). Sementara itu, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Lampung dalam satu tahun terakhir juga turut mengalami penurunan sebesar 0,05 poin, yakni dari 0,41 pada Maret 2022 menjadi 0,36 pada Maret 2023 (Grafik 6.16). P1 dan P2 merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta keragaman tingkat pengeluaran penduduk miskin.

Sementara itu, Koefisien Gini tercatat meningkat sebesar 0,011 poin, dari indeks 0,313 pada September 2022 menjadi sebesar 0,324 pada Maret 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan pada masyarakat Provinsi Lampung. Sejalan dengan hal tersebut, Koefisien Gini Nasional tercatat meningkat sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 0,388 poin pada Maret 2023 dan 0,381 poin pada September 2022 (Grafik 6.17).



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

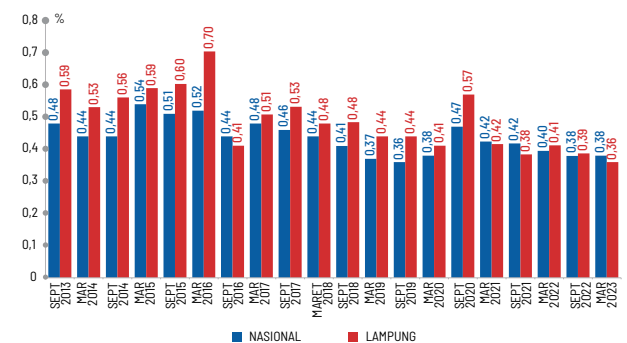
Grafik 6.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tabel 6.3 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2023

JENIS KOMODITI	PERKOTAAN	JENIS KOMODITI	PERDESAAN
Makanan	73,98	Makanan	75,07
Beras	18,92	Beras	20,86
Rokok Kretek Filter	13,08	Rokok Kretek Filter	13,34
Telur Ayam Ras	4,30	Telur Ayam Ras	3,77
Tempe	2,65	Cabe Rawit	2,87
Mie Instan	2,54	Bawang Merah	2,42
Roti	2,51	Tempe	2,33
Bawang Merah	2,23	Roti	2,16
Cabe Rawit	2,20	Mie Instan	2,10
Bukan Makanan	26,02	Bukan Makanan	24,93
Perumahan	7,94	Perumahan	7,46
Bensin	3,88	Bensin	4,68
Listrik	3,02	Listrik	2,28
Pendidikan	2,31	Pendidikan	1,29
Perlengkapan Mandi	1,18	Perlengkapan Mandi	1,08

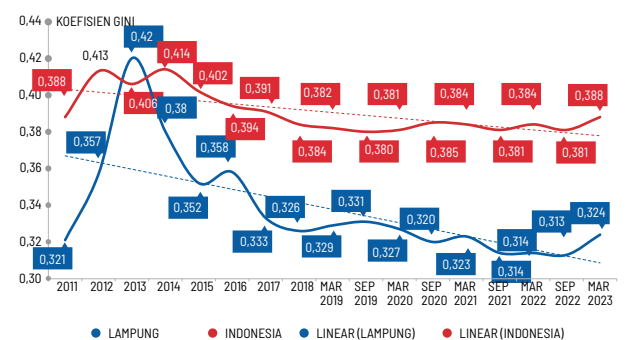
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan program Desa Berjaya yang merupakan program bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi, Kabupaten, Desa di Lingkungan Provinsi Lampung dan sumber lainnya. Program Desa Berjaya sebagai upaya untuk mengentaskan desa-desa tertinggal dengan



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Grafik 6.17 Koefisien Gini Lampung dan Nasional

menitikberatkan pada penanganan masalah-masalah kemiskinan, ketertinggalan dan potensi yang ada melalui peran aktif seluruh *stakeholder* provinsi dan kabupaten menuju desa-desa Lampung yang Berjaya. Program Desa Berjaya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2021 tentang Program Desa Berjaya. Pada akhir 2019, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 19 desa sangat tertinggal sebagai *locus* pengentasan kemiskinan Program Desa Berjaya Tahun 2019. Berdasarkan Rekap Status Indeks Desa Membangun Tahun 2023, Provinsi Lampung memiliki 2.446 desa yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 Desa yang masih dalam kategori Tertinggal, 1.253 kategori Berkembang, 1008 kategori Maju dan 181 kategori Mandiri. Setiap desa yang telah ditetapkan sebagai *locus* Program Desa Berjaya ditangani secara spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan rekomendasi dari tim yang telah melakukan observasi di lapangan. Pemetaan permasalahan dilakukan untuk menjadi dasar bagi masing-masing OPD untuk berkoordinasi menangani permasalahan sesuai dengan kekhususan setiap OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan desa. Masing-masing OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penanganan mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial kemasyarakatan hingga pengembangan SDM. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan pengembangan kawasan pedesaan dan melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan, demi tercapainya percepatan pembangunan wilayah pedesaan untuk pengentasan kemiskinan. Adapun berdasarkan peringkat nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, Provinsi Lampung memiliki nilai rata-rata IDM sebesar 0,7184 dan menempati urutan ke-17 dengan status IDM adalah "Maju" serta berada di atas rata-rata Nasional yang memiliki nilai rata-rata IDM sebesar 0.6935.

Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI) sejak 2021, berhasil mengakselerasi pertumbuhan dan inovasi desa-desa di Provinsi Lampung. Desa-desa wisata di Provinsi Lampung telah berbenah dan berinovasi serta berupaya menyesuaikan diri dengan berbagai standardisasi antara lain sertifikasi CHSE. Hal ini dibuktikan dengan masuknya salah satu desa wisata kopi Riris Jaya di Lampung Barat pada tahun 2021 sebagai Juara III Desa Wisata Rintisan. Selain itu Desa Pahawang di Lampung Selatan juga berhasil menerima penghargaan dalam ajang ADWI sebagai Juara Harapan Dua kategori Desa Wisata Maju Terbaik ADWI 2022. Selanjutnya saat ini Desa Wisata Kelawi, Lampung Selatan masuk menjadi 50 Besar nominasi peraih ADWI 2023.

Di tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung juga meluncurkan program Smart Village yang merupakan tindak lanjut dalam perwujudan Desa Berjaya Lampung. Program Smart Village adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui gerakan kesadaran sosial Masyarakat di Desa yang peduli pada perubahan digital. Sehingga desa dapat menyelesaikan berbagai

permasalahannya dengan cerdas dan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi nilai tambah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Dengan mengusung konsep digitalisasi pedesaan yang terintegrasi pada semua lini, diharapkan program ini dapat memberikan kemudahan dan integrasi data yang sehari-hari dilakukan masyarakat desa, seperti layanan administrasi, pajak, transaksi perbankan, Program Kartu Petani Berjaya melalui integrasi data KPB, mendorong perkembangan BUMDes dan UMKM di pedesaan, penanganan desa *blank spot* jaringan dan lain sebagainya.

Untuk mengakselerasi perwujudan dari Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Forum Komunikasi Desa Digital (FKDD) pada 13 Desember 2022. Pembentukan FKDD ini diharapkan sebagai penggerak dan mendorong keberlanjutan program Smart Village untuk mewujudkan *smart government*, *smart economy* dan *smart people* akan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga desa Maju-Mandiri-Sejahtera (DESA BERJAYA) dapat terwujud. Salah satu upaya dalam mengakselerasi program Smart Village adalah penerapan digitalisasi dalam pembayaran yang diwujudkan melalui penerapan aplikasi e-Samdes yang digunakan untuk melakukan pembayaran *billing* bekerjasama dengan Bank Lampung.

Beberapa penghargaan yang telah diraih dalam ajang lomba nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT yaitu Lomba Desa/ Kelurahan dimana Provinsi Lampung mendapat Juara kedua Tingkat Nasional untuk Lomba Desa yang diraih oleh Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya dalam Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Nasional, Provinsi Lampung berhasil meraih juara satu untuk kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan oleh Heri Irawan Yuli Sunaryo dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Juara kedua untuk kategori Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Berprestasi oleh Kabupaten Lampung Tengah, dan Juara ketiga untuk kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tulang Bawang.

Dana bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2024 masih terus berlanjut di Provinsi Lampung. Untuk periode triwulan I 2024, di Provinsi Lampung telah dilakukan realisasi penyaluran bansos PKH kepada 427.091 keluarga penerima manfaat (KPM) atau dengan total nominal sebesar Rp213,39 miliar dan telah terserap sebesar 99,60% (Tabel 6.4). Bantuan di triwulan I 2024 tersebut telah disalurkan kepada 15 Kabupaten/Kota secara 2 (dua) mekanisme yaitu: 1) non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia di 504 Kab/Kota; serta 2) tunai oleh PT Pos Indonesia di 514 Kab/Kota. PKH merupakan salah satu program untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang diberikan kepada keluarga kurang mampu. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk keluarga kurang mampu, dengan besaran Rp900 ribu hingga Rp3 juta per tahun.

Tabel 6.4 Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I 2024

ROW LABELS	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	PENYALURAN (Jml KPM)	PENYALURAN (Nominal)	% PENYALURAN (Jml KPM)	% PENYALURAN (Nominal)	PENYERAPAN (Jml KPM)	% PENYERAPAN (Jml KPM)
LAMPUNG	430.330	215.615.244.547	427.091	213.398.311.215	99,25%	98,97%	425.399	99,60%
KOTA BANDAR LAMPUNG	34.257	18.187.813.513	33.750	17.766.438.513	98,52%	97,68%	33.491	99,23%
KOTA METRO	4.947	2.667.824.628	4.873	2.595.499.628	98,50%	97,29%	4.872	99,98%
LAMPUNG BARAT	15.965	7.857.348.847	15.853	7.789.440.515	99,30%	99,14%	15.802	99,68%
LAMPUNG SELATAN	55.734	27.499.379.711	55.401	27.300.679.711	99,40%	99,28%	55.188	99,62%
LAMPUNG TENGAH	60.473	29.113.862.873	60.288	29.002.312.873	99,69%	99,62%	59.999	99,52%
LAMPUNG TIMUR	56.518	29.071.088.042	55.788	28.556.838.042	98,71%	98,23%	55.621	99,70%
LAMPUNG UTARA	47.182	24.004.079.737	46.924	23.848.904.737	99,45%	99,35%	46.803	99,74%
MESUJI	9.488	4.504.324.461	9.440	4.474.424.461	99,49%	99,34%	9.372	99,28%
PESAWARAN	26.389	12.966.531.333	26.288	12.906.631.333	99,62%	99,54%	26.214	99,72%
PESISIR BARAT	9.921	5.048.957.297	9.891	5.030.507.297	99,70%	99,63%	9.854	99,63%
PRINGSEWU	19.048	9.144.631.955	18.982	9.102.931.955	99,65%	99,54%	18.903	99,58%
TANGGAMUS	40.554	20.607.705.431	40.173	20.374.855.431	99,06%	98,87%	40.073	99,75%
TULANG BAWANG BARAT	11.107	5.402.049.360	11.019	5.347.949.360	99,21%	99,00%	10.943	99,31%
TULANG BAWANG	14.983	7.935.207.468	14.769	7.762.682.468	98,57%	97,83%	14.693	99,49%
WAY KANAN	23.764	11.604.439.891	23.652	11.538.214.891	99,53%	99,43%	23.571	99,66%

Sumber: HIMBARA, diolah

Selama masa pandemi juga terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) reguler bagi keluarga yang belum menerima PKH, bantuan sembako, dan Kartu Prakerja sebesar Rp600 ribu/bulan selama 3 bulan yang bersumber dari Dana Desa, serta BLT dana desa bagi keluarga yang belum menerima PKH, bantuan sembako, dan Kartu Prakerja. Bantuan khusus dari alokasi Dana Desa ini ditujukan kepada keluarga miskin/prasejahtera, belum terdata di program-program bantuan sosial pemerintah dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

Program Sembako telah disalurkan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu: 1) non tunai oleh Himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) dan Bank Syariah Indonesia di 421 Kab/Kota; serta 2) tunai oleh PT Pos Indonesia di 514 Kab/Kota. Berdasarkan hal tersebut, realisasi penyerapan program

sembako yang disalurkan hingga saat ini secara non tunai dan tunai per Maret 2024 masing-masing 627.076 KPM dan 54.589 KPM atau 98,29% dan 100% dengan total nominal masing-masing sebesar Rp 125,42 miliar dan Rp10,92 miliar.

Pada triwulan I 2024 penyaluran BSNT PKH dan program sembako di Provinsi Lampung yang baru disalurkan adalah dengan persentase sebanyak 99,26% kepada 692.486 KPM. Adapun bantuan program Sembako yang telah disalurkan kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kabupaten penerima bansos terbanyak adalah Kabupaten Lampung Tengah yang tercatat memiliki 60.288 KPM, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 55.788 KPM, dan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 55.401 KPM. **(Tabel 6.5).**

Tabel 6.5 Penyaluran Program Sembako Posisi Triwulan I 2024

PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	PENYALURAN											
				TAHAP JANUARI				TAHAP FEBRUARI				TAHAP MARET			
				JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	48.410	100,00%	9.682.000.000	100,00%	48.368	100,00%	9.673.600.000	100,00%	48.368	100,00%	9.673.600.000	100,00%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	1.874	87,41%	374.800.000	87,41%	1.949	97,79%	389.800.000	97,79%	1.949	97,79%	389.800.000	97,79%
LAMPUNG	KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	7.103	100,00%	1.420.600.000	100,00%	7.104	100,00%	1.420.800.000	100,00%	7.104	100,00%	1.420.800.000	100,00%
LAMPUNG	KOTA METRO	TUNAI	POS	261	87,58%	52.200.000	87,58%	278	98,58%	55.600.000	98,58%	278	98,58%	55.600.000	98,58%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	24.660	100,00%	4.932.000.000	100,00%	24.599	100,00%	4.919.800.000	100,00%	24.599	100,00%	4.919.800.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	3.751	92,48%	750.200.000	92,48%	3.935	99,09%	787.000.000	99,09%	3.935	99,09%	787.000.000	99,09%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	85.883	100,00%	17.176.600.000	100,00%	85.877	100,00%	17.175.400.000	100,00%	85.877	100,00%	17.175.400.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	9.318	67,83%	1.863.600.000	67,83%	10.105	99,30%	2.021.000.000	99,30%	10.105	99,30%	2.021.000.000	99,30%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	84.330	100,00%	16.886.000.000	100,00%	84.449	100,00%	16.889.800.000	100,00%	84.449	100,00%	16.889.800.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	2.537	90,90%	507.400.000	90,90%	2.586	98,55%	517.200.000	98,55%	2.586	98,55%	517.200.000	98,55%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	78.647	100,00%	15.729.400.000	100,00%	77.987	100,00%	15.597.400.000	100,00%	77.987	100,00%	15.597.400.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	3.943	91,78%	788.600.000	91,78%	4.165	97,75%	833.000.000	97,75%	4.165	97,75%	833.000.000	97,75%



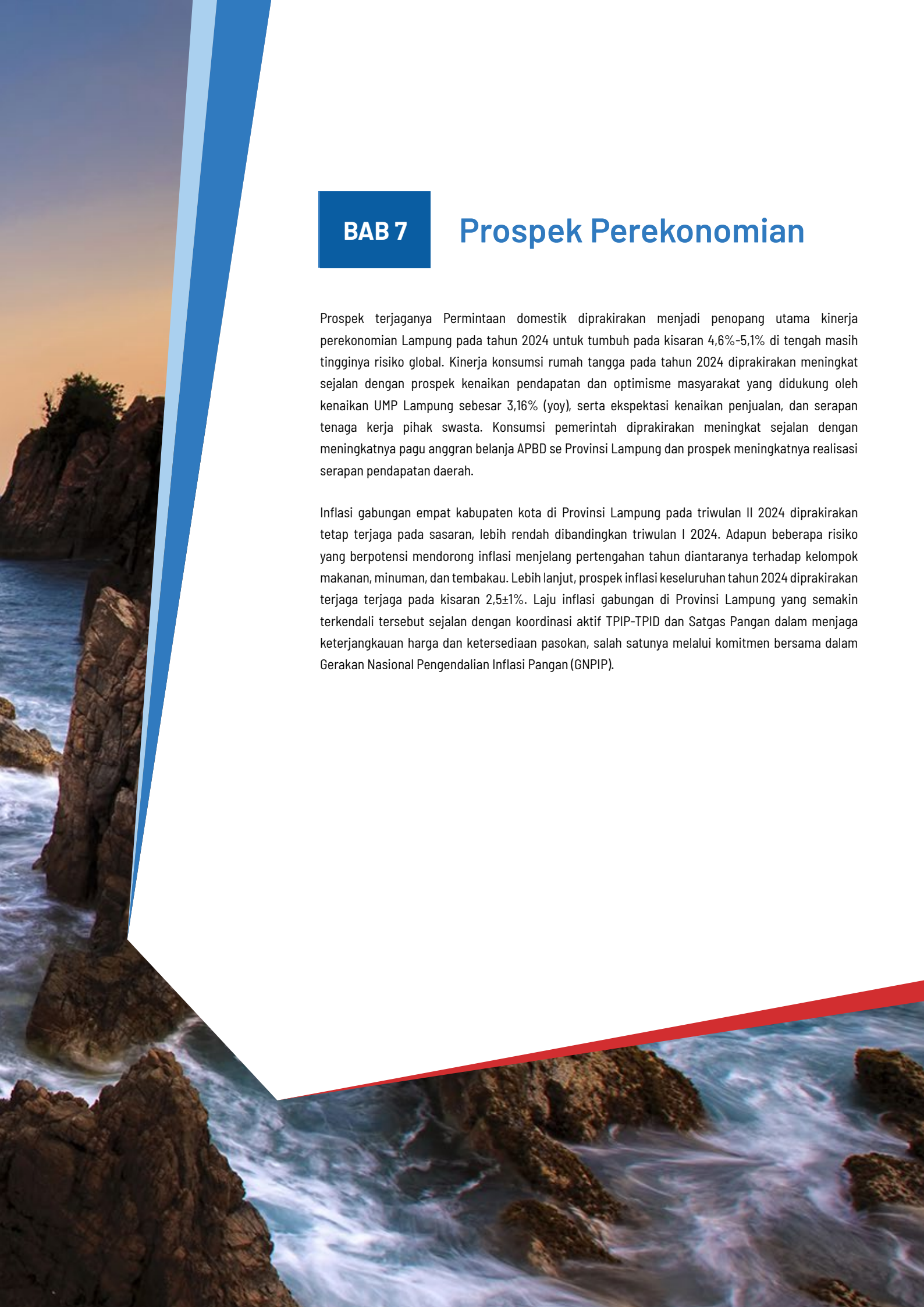
PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	PENYALURAN											
				TAHAP JANUARI				TAHAP FEBRUARI				TAHAP MARET			
				JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	61.936	100,00%	12.387.200.000	100,00%	61.868	100,00%	12.373.600.000	100,00%	61.868	100,00%	12.373.600.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	12.830	94,96%	2.566.000.000	94,96%	13.719	99,56%	2.743.800.000	99,56%	13.719	99,56%	2.743.800.000	99,56%
LAMPUNG	MESUJI	NON TUNAI	BMRI	16.880	100,00%	3.376.000.000	100,00%	16.869	100,00%	3.373.800.000	100,00%	16.869	100,00%	3.373.800.000	100,00%
LAMPUNG	MESUJI	TUNAI	POS	762	84,57%	152.400.000	84,57%	749	97,78%	149.800.000	97,78%	749	97,78%	149.800.000	97,78%
LAMPUNG	PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	42.004	100,00%	8.400.800.000	100,00%	41.978	100,00%	8.395.600.000	100,00%	41.978	100,00%	8.395.600.000	100,00%
LAMPUNG	PESAWARAN	TUNAI	POS	2.269	87,67%	453.800.000	87,67%	2.294	99,18%	458.800.000	99,18%	2.294	99,18%	458.800.000	99,18%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	15.632	100,00%	3.126.400.000	100,00%	15.622	100,00%	3.124.400.000	100,00%	15.622	100,00%	3.124.400.000	100,00%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	TUNAI	POS	460	84,25%	92.000.000	84,25%	462	98,51%	92.400.000	98,51%	462	98,51%	92.400.000	98,51%
LAMPUNG	PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	30.462	100,00%	6.092.400.000	100,00%	30.343	100,00%	6.068.600.000	100,00%	30.343	100,00%	6.068.600.000	100,00%
LAMPUNG	PRINGSEWU	TUNAI	POS	2.235	93,48%	447.000.000	93,48%	2.286	99,18%	457.200.000	99,18%	2.286	99,18%	457.200.000	99,18%
LAMPUNG	TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	59.184	100,00%	11.836.800.000	100,00%	59.127	100,00%	11.825.400.000	100,00%	59.127	100,00%	11.825.400.000	100,00%
LAMPUNG	TANGGAMUS	TUNAI	POS	7.779	95,64%	1.555.800.000	95,64%	8.198	99,24%	1.639.600.000	99,24%	8.198	99,24%	1.639.600.000	99,24%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	25.204	100,00%	5.040.800.000	100,00%	25.188	100,00%	5.037.600.000	100,00%	25.188	100,00%	5.037.600.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	TUNAI	POS	1.034	85,74%	206.800.000	85,74%	1.004	96,82%	200.800.000	96,82%	1.004	96,82%	200.800.000	96,82%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	17.356	100,00%	3.471.200.000	100,00%	17.344	100,00%	3.468.800.000	100,00%	17.344	100,00%	3.468.800.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	444	81,62%	88.800.000	81,62%	439	97,34%	87.800.000	97,34%	439	97,34%	87.800.000	97,34%
LAMPUNG	WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	41.183	100,00%	8.236.600.000	100,00%	41.174	100,00%	8.234.800.000	100,00%	41.174	100,00%	8.234.800.000	100,00%
LAMPUNG	WAY KANAN	TUNAI	POS	2.354	93,41%	470.800.000	93,41%	2.420	99,10%	484.000.000	99,10%	2.420	99,10%	484.000.000	99,10%

PROVINSI	KAB/KOTA	MEKANISME PENYALURAN	PENYALUR	PENYALURAN											
				TAHAP JANUARI				TAHAP FEBRUARI				TAHAP MARET			
				JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%	JUMLAH KPM	%	NOMINAL Rp	%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	NON TUNAI	BRI	47.388	97,89%	9.477.600.000	97,89%	47.182	97,55%	9.436.400.000	97,55%	47.182	97,55%	9.436.400.000	97,55%
LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	TUNAI	POS	1.874	100,00%	374.800.000	100,00%	1.949	100,00%	389.800.000	100,00%	1.949	100,00%	389.800.000	100,00%
LAMPUNG	KOTA METRO	NON TUNAI	BRI	7.047	99,21%	1.409.400.000	99,21%	7.011	98,69%	1.402.200.000	98,69%	7.011	98,69%	1.402.200.000	98,69%
LAMPUNG	KOTA METRO	TUNAI	POS	261	100,00%	52.200.000	100,00%	278	100,00%	55.600.000	100,00%	278	100,00%	55.600.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	NON TUNAI	BMRI	24.301	98,54%	4.860.200.000	98,54%	24.186	98,32%	4.837.200.000	98,32%	24.186	98,32%	4.837.200.000	98,32%
LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	TUNAI	POS	3.751	100,00%	750.200.000	100,00%	3.935	100,00%	787.000.000	100,00%	3.935	100,00%	787.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	NON TUNAI	BRI	84.527	98,42%	16.905.400.000	98,42%	84.254	98,11%	16.850.800.000	98,11%	84.254	98,11%	16.850.800.000	98,11%
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	TUNAI	POS	9.318	100,00%	1.863.600.000	100,00%	10.105	100,00%	2.021.000.000	100,00%	10.105	100,00%	2.021.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	NON TUNAI	BRI	83.080	98,52%	16.616.000.000	98,52%	82.950	98,22%	16.590.000.000	98,22%	82.950	98,22%	16.590.000.000	98,22%
LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	TUNAI	POS	2.537	100,00%	507.400.000	100,00%	2.586	100,00%	517.200.000	100,00%	2.586	100,00%	517.200.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	NON TUNAI	BMRI	77.343	98,34%	15.468.600.000	98,34%	76.522	98,12%	15.304.400.000	98,12%	76.522	98,12%	15.304.400.000	98,12%
LAMPUNG	LAMPUNG TIMUR	TUNAI	POS	3.943	100,00%	788.600.000	100,00%	4.165	100,00%	833.000.000	100,00%	4.165	100,00%	833.000.000	100,00%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	NON TUNAI	BMRI	61.444	99,21%	12.288.800.000	99,21%	61.296	99,08%	12.259.200.000	99,08%	61.296	99,08%	12.259.200.000	99,08%
LAMPUNG	LAMPUNG UTARA	TUNAI	POS	12.830	100,00%	2.566.000.000	100,00%	13.719	100,00%	2.743.800.000	100,00%	13.719	100,00%	2.743.800.000	100,00%
LAMPUNG	MESUJI	NON TUNAI	BMRI	16.677	98,80%	3.335.400.000	98,80%	16.628	98,57%	3.325.600.000	98,57%	16.628	98,57%	3.325.600.000	98,57%
LAMPUNG	MESUJI	TUNAI	POS	762	100,00%	152.400.000	100,00%	749	100,00%	149.800.000	100,00%	749	100,00%	149.800.000	100,00%
LAMPUNG	PESAWARAN	NON TUNAI	BMRI	41.504	98,81%	8.300.800.000	98,81%	41.439	98,72%	8.287.800.000	98,72%	41.439	98,72%	8.287.800.000	98,72%
LAMPUNG	PESAWARAN	TUNAI	POS	2.269	100,00%	453.800.000	100,00%	2.294	100,00%	458.800.000	100,00%	2.294	100,00%	458.800.000	100,00%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	NON TUNAI	BRI	15.400	98,52%	3.080.000.000	98,52%	15.322	98,08%	3.064.400.000	98,08%	15.322	98,08%	3.064.400.000	98,08%
LAMPUNG	PESISIR BARAT	TUNAI	POS	460	100,00%	92.000.000	100,00%	462	100,00%	92.400.000	100,00%	462	100,00%	92.400.000	100,00%
LAMPUNG	PRINGSEWU	NON TUNAI	BRI	30.029	98,58%	6.005.800.000	98,58%	29.826	98,30%	5.965.200.000	98,30%	29.826	98,30%	5.965.200.000	98,30%
LAMPUNG	PRINGSEWU	TUNAI	POS	2.235	100,00%	447.000.000	100,00%	2.286	100,00%	457.200.000	100,00%	2.286	100,00%	457.200.000	100,00%
LAMPUNG	TANGGAMUS	NON TUNAI	BMRI	58.485	98,82%	11.697.000.000	98,82%	58.324	98,64%	11.664.800.000	98,64%	58.324	98,64%	11.664.800.000	98,64%
LAMPUNG	TANGGAMUS	TUNAI	POS	7.779	100,00%	1.555.800.000	100,00%	8.198	100,00%	1.639.600.000	100,00%	8.198	100,00%	1.639.600.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	NON TUNAI	BMRI	24.629	97,72%	4.925.800.000	97,72%	24.552	97,47%	4.910.400.000	97,47%	24.552	97,47%	4.910.400.000	97,47%
LAMPUNG	TULANG BAWANG	TUNAI	POS	1.034	100,00%	206.800.000	100,00%	1.004	100,00%	200.800.000	100,00%	1.004	100,00%	200.800.000	100,00%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	NON TUNAI	BMRI	17.044	98,20%	3.408.800.000	98,20%	16.983	97,92%	3.396.600.000	97,92%	16.983	97,92%	3.396.600.000	97,92%
LAMPUNG	TULANG BAWANG BARAT	TUNAI	POS	444	100,00%	88.800.000	100,00%	439	100,00%	87.800.000	100,00%	439	100,00%	87.800.000	100,00%
LAMPUNG	WAY KANAN	NON TUNAI	BMRI	40.681	98,78%	8.136.200.000	98,78%	40.601	98,61%	8.120.200.000	98,61%	40.601	98,61%	8.120.200.000	98,61%
LAMPUNG	WAY KANAN	TUNAI	POS	2.354	100,00%	470.800.000	100,00%	2.420	100,00%	484.000.000	100,00%	2.420	100,00%	484.000.000	100,00%

Sumber: HIMBARA, diolah







BAB 7

Prospek Perekonomian

Prospek terjaganya Permintaan domestik diperkirakan menjadi penopang utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 untuk tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggaran belanja APBD se Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan terjaga pada kisaran $2,5 \pm 1\%$. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Tabel 7.1 Proyeksi Perekonomian Global 2024

SUBSTANSI	World Economic Outlook - IMF, April 2024				
	2023	2024F	Bias/Revisi WEO Jan'24	2025F	Bias/Revisi WEO Jan'24
Pertumbuhan Ekonomi (%; yoy)					
Dunia	3,20	3,20	0,10	3,20	0,00
Negara Maju	1,60	1,70	0,20	1,80	0,00
AS	2,50	2,70	0,60	1,90	0,20
Eropa	0,40	0,80	-0,10	1,50	-0,20
Jepang	1,90	0,90	0,00	1,00	0,20
Negara Berkembang	4,30	4,20	0,10	4,20	0,00
Tiongkok	5,20	4,60	0,00	4,10	0,00
India	7,80	6,80	0,30	6,50	0,00
Laju Inflasi (%; yoy)					
Dunia	6,80	5,90	0,10	4,50	0,10
Negara Maju	4,60	2,60	0,00	2,00	0,00
Negara Berkembang	8,30	8,30	0,20	6,20	0,20
Indikator lainnya (%; yoy)					
World Trade Volume	0,30	3,00	-0,30	3,30	-0,30
Oil Price	-16,40	-2,50	-0,20	-6,30	-1,50

Sumber: IMF, 2024

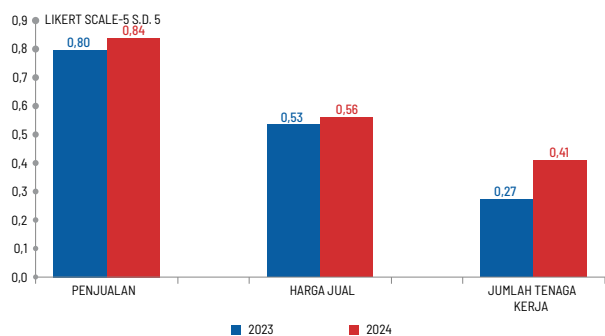
7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan berlanjutnya ketidakpastian global. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 2,9% pada tahun 2024 sebelum meningkat menjadi 3,00% pada tahun 2025. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook (WEO) periode April 2024 memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2024-2025 stabil sebesar 3,20% (Tabel 1). Prakiraan kinerja perekonomian global untuk tahun 2024 oleh IMF tersebut direvisi 0,10% lebih tinggi dibandingkan prakiraan pada WEO Januari 2024 seiring dengan kinerja perekonomian Amerika Serikat dan beberapa negara berkembang yang lebih tinggi dari prakiraan. Namun demikian, prakiraan tersebut masih di bawah rata-rata historis pra pandemi yang sebesar 3,80%. Adapun Bank Indonesia memprakirakan kinerja

perekonomian global pada tahun 2024 tumbuh sebesar 3,00%, melambat dibandingkan tahun 2023 yang diestimasikan tumbuh 3,1%. Prospek perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh eskalasi ketidakpastian global, sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, dan konflik Laut Merah yang mendistrupsi rantai pasok global, serta prakiraan berlanjutnya perlambatan kinerja perekonomian Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

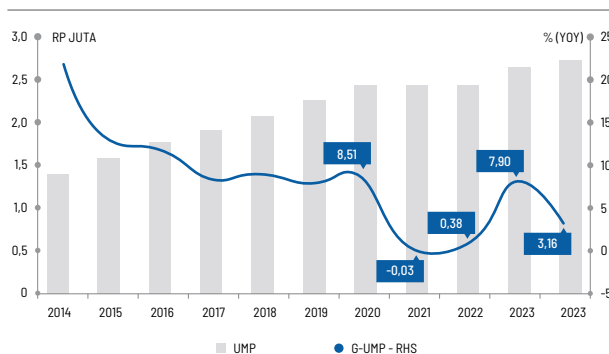
Perekonomian Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah masih tingginya risiko global.

Peningkatan tersebut terutama didukung oleh prospek tetap kuatnya permintaan domestik sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan, meningkatnya optimisme masyarakat dan ekspektasi pelaku usaha yang semakin baik, dan stimulus kebijakan fiskal yang ekspansif. Dari sisi permintaan, prospek kinerja perekonomian Lampung yang lebih baik didorong oleh prakiraan meningkatnya kinerja konsumsi rumah



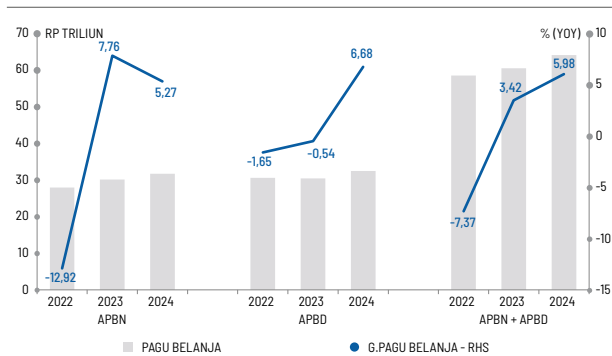
Sumber: Liaison KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung

Grafik 7.1 Ekspektasi Pelaku Usaha atas Kegiatan Usaha ke Depan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 7.2 UMP Provinsi Lampung



Sumber: DJPB, diolah

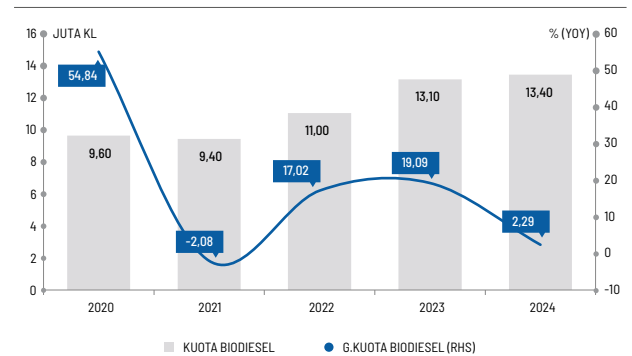
Grafik 7.3 Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi Lampung

tangga dan pengeluaran pemerintah di tengah perlambatan kinerja investasi. Dari sisi penawaran, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU PBE diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek konsumsi swasta (konsumsi rumah tangga dan LNPR) yang lebih baik. Dari sisi eksternal, prospek perlambatan ekonomi mitra dagang utama dan penurunan permintaan sejumlah komoditas utama Lampung diperkirakan menahan pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung produksi komoditas pangan yang lebih baik.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan terjaganya optimisme masyarakat di tengah laju inflasi yang lebih terkendali.

Akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga terutama didukung oleh berlanjutnya pemulihan kegiatan usaha dan maraknya aktivitas politik pada periode pemilihan umum serentak yang mendorong peningkatan aktivitas konsumsi swasta. Optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian ke depan cenderung meningkat setelah menghadapi tantangan peningkatan laju inflasi dan penurunan pendapatan ekspor pada tahun 2023. Hal ini terkonfirmasi dari hasil liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi pelaku usaha terhadap penjualan dan penyerapan tenaga kerja di tengah kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% pada tahun 2024 (Grafik 7.1 dan 7.2). Di samping itu, penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 diperkirakan turut memengaruhi dinamika perekonomian Provinsi Lampung, dimana belanja yang timbul dari aktivitas politik, termasuk pengeluaran pemerintah dan LNPR diperkirakan mampu menstimulus daya beli Masyarakat.

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan pagu belanja APBD tahun 2024. Pagu belanja APBD se-Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 6,68% (yoy), meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,54% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pagu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang



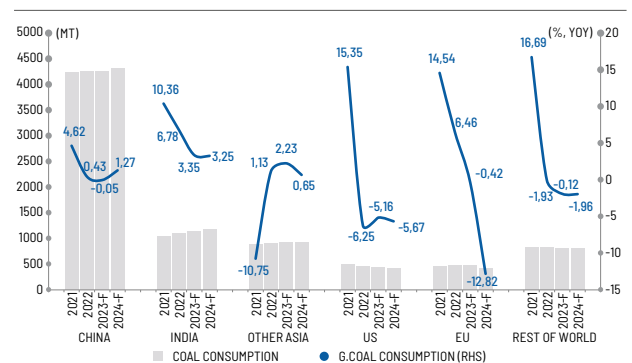
Sumber: Ditjen EBTKE

Grafik 7.4 Kuota Biodiesel

masing-masing tumbuh sebesar 7,93% (yoy) dan 4,91% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan 3,27% (yoy) dan -0,92% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tumbuh 5,27% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 7,76% (yoy) pada tahun sebelumnya. Tetap positifnya pertumbuhan pagu belanja APBN di Provinsi Lampung terutama didukung oleh meningkatnya pagu dana transfer yang tumbuh 6,10% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pagu belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi Lampung pada tahun 2024 secara keseluruhan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 7.3).

Kinerja investasi pada tahun 2024 diperkirakan melambat seiring prospek tertahanya kinerja investasi bangunan dan investasi swasta pada tahun politik.

Prospek tersebut sejalan dengan berakhirnya pembangunan sejumlah proyek investasi bernilai besar, seperti rampungnya pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Margatiga dan dikeluarkannya Kawasan Industri Tanggamus dari daftar PSN, serta progres pembangunan 17 ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai 85% pada tahun 2023. Di samping itu, kecenderungan sikap investor untuk menunggu kepastian (*wait and see*) pada tahun politik diperkirakan menahan pertumbuhan investasi swasta pada tahun laporan. Meski melambat, kinerja investasi Provinsi Lampung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif didukung oleh berlanjutnya pembangunan



Sumber: EIA, 2022

Grafik 7.5 Konsumsi Batu Bara Global

proyek investasi bernilai besar lainnya pada tahun 2024, seperti PSN Bakauheni Harbour City (BHC) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM Way Rilau.

Moderasi kinerja sektor eksternal diperkirakan berlanjut pada tahun 2024 sejalan dengan prospek penurunan kinerja ekspor. Pada tahun 2024, kinerja ekspor Provinsi Lampung diperkirakan termoderasi sejalan dengan prospek perlambatan negara mitra dagang utama, penurunan harga sejumlah komoditas ekspor utama. Permintaan minyak kelapa sawit domestik diperkirakan meningkat sejalan dengan berlanjutnya implementasi B35 yang akan berlanjut ke B40 pada tahun 2024, dimana kuota biodiesel nasional mengalami peningkatan menjadi 13,41 Juta KL dan berpotensi mendorong peningkatan permintaan CPO domestik (Grafikk 7.4). Sementara itu, terkait dengan kinerja ekspor batubara, permintaan batubara global pada tahun 2024 diperkirakan kembali melambat seiring dengan prospek perekonomian Tiongkok dan India yang belum optimal hingga tahun 2024 (Grafik 7.5). Lebih lanjut, melambatnya kinerja ekspor turut dipengaruhi oleh normalisasi IHKEI seiring dengan pemulihan produksi kelapa sawit Malaysia, perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok – Australia, meningkatnya akses EU terhadap *pipeline* gas non-Rusia, dan berlanjutnya pemulihan ekspor Rusia.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan permintaan domestik pada tahun 2024 terutama akan tercermin pada peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan dan terjaganya kinerja LU PBE. Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan utamanya didukung oleh meningkatnya kuota biodiesel sejalan dengan berlanjutnya implementasi program B35, perbaikan kinerja produksi komoditas perkebunan pendukung industri makanan-minuman, dan penurunan harga gula dunia. Adapun kinerja LU PBE diperkirakan tetap kuat sejalan dengan akselerasi permintaan domestik pada tahun politik di Tengah berkurangnya faktor *base effect* dari pemulihan pasca Pandemi Covid-19 pada dua tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Perikanan dan Perhutanan, serta peningkatan LU Pertambangan dan Penggalian turut mendukung peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2024, terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif dan revitalisasi *main oil line* (pipa bawah air) milik Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES).

Kondisi cuaca yang lebih kondusif diperkirakan mampu mendorong perbaikan kinerja LU Pertanian pada tahun 2024. Prospek peningkatan kinerja LU Pertanian terutama ditopang oleh produksi padi yang diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif seiring dengan menurunnya intensitas El Nino dan pada tahun 2024. Penguatan infrastruktur pertanian dalam rangka antisipasi El Nino pada tahun sebelumnya juga turut mendukung aktivitas produksi pada tahun laporan. Bendungan Margatiga yang direncanakan beroperasi mulai tahun 2024 diperkirakan mampu

Tabel 7.2 Harga Komoditas Ekspor dan Impor Utama Provinsi Lampung

KOMODITAS UTAMA	2021	2022	2023	2024-F	2025-F
Minyak Kelapa Sawit (USD/MT)	1.131,00	1.276,00	886,00	905,00	825,00
Ekspor Batubara (USD/MT)	138,10	344,90	172,80	125,00	110,00
Kopi Robusta (USD/Kg)	1,98	2,29	2,63	3,50	2,80
Gula (USD/Kg)	0,39	0,41	0,52	0,50	0,46
Impor Daging Sapi (USD/Kg)	5,34	5,62	4,90	5,20	5,30
Pupuk (Index)	152,30	235,70	153,50	120,20	112,90

Sumber: World Bank Commodity Price Forecasts, April 2024

meningkatkan volume tampungan air untuk menjaga suplai air irigasi ke lahan pertanian, penyediaan air baku dan pengendalian banjir dalam rangka mendukung keberlanjutan peningkatan produksi pertanian. Peningkatan kinerja LU ini juga didukung oleh prospek meningkatnya produksi ubikayu, jagung dan kopi didukung kinerja pemupukan yang lebih optimal pada kondisi cuaca yang lebih kondusif.

Permintaan domestik yang tetap kuat mendorong kinerja LU Industri Pengolahan tahun 2024. Prakiraan akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun laporan ditopang oleh permintaan domestik yang semakin solid, seiring berlanjutnya implementasi B35 dan terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga. Perkembangan tersebut berpotensi mendorong optimalisasi utilisasi faktor produksi industri pengolahan minyak kelapa sawit seiring dengan meningkatnya permintaan biodiesel dan RBD *Palm Olein*, dimana kapasitas utilisasi terpakai pada industri subsektor ini sudah mencapai 90% pada tahun 2023. Pada subsektor Industri Makanan dan Minuman lainnya, kinerja industri pengolahan didukung oleh penurunan harga gula dunia, yaitu dari USD0,52/kg pada tahun 2023 menjadi USD0,49/kg pada tahun 2024¹. Lebih lanjut, peningkatan permintaan pangan pada skala nasional diperkirakan mendorong kinerja industri pengolahan pakan ternak. Ekspansi Industri Tekstil dan *Pulp* menjelang tahun politik juga merupakan faktor pendukung pertumbuhan kinerja LU Industri Pengolahan. Meski demikian, akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan lebih lanjut masih menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global dan penurunan kuota impor gula rafinasi menjadi 3,45 juta ton pada tahun 2024 dari 3,61 juta ton pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, kinerja LU yang memiliki keterkaitan tinggi dengan mobilitas masyarakat diperkirakan termoderasi. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2024 diperkirakan melambat, kembali ke tingkat pertumbuhannya pada periode normal setelah mencapai kinerja pertumbuhan yang tinggi pada dua tahun sebelumnya. Selanjutnya, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan serta LU akomodasi dan penyediaan makan minum pada tahun 2024 diperkirakan melambat setelah tumbuh tinggi pada dua tahun terakhir, dipengaruhi oleh penurunan mobilitas masyarakat yang tidak setinggi tahun sebelumnya sejalan dengan berkurangnya faktor *base effect* pasca Pandemi Covid-19. Adapun volume pengangkutan batubara

¹ World Bank Commodity Price Forecasts (Released: October 26, 2023)

kereta barang diperkirakan mengalami penurunan akibat prospek perlambatan ekspor batu bara sejalan dengan transisi *green energy* dan perbaikan hubungan geopolitik Tiongkok-Australia. Sementara itu, kinerja LU Pertambangan dan Penggalan diperkirakan terakselerasi didukung oleh telah selesainya revitalisasi *main oil line* (pipabawah air) sepanjang 30 km milik PHE OSES pada 2023 yang mendorong produksi/hari meningkat menjadi 20.500 BOPD dari 6.100 BOPD.

7.2 INFLASI

Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 diperkirakan terjaga pada kisaran 2,5±1%.

Laju inflasi pada awal tahun 2024 terutama disebabkan oleh akselerasi permintaan menjelang periode Pemilu dan Pilkada serentak seiring dengan meningkatnya aktivitas kampanye. Aktivitas kampanye diperkirakan mendorong peningkatan uang beredar di masyarakat, serta meningkatkan kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan gula pasir. Lebih lanjut, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau sejalan dengan kondisi El Nino pada akhir tahun 2023 yang menyebabkan perlambatan masa panen pada awal tahun 2024. Meski demikian, laju inflasi kelompok pangan ini dapat diminimalisir melalui koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Di samping itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menyebabkan pergeseran permintaan agregat dan mendorong peningkatan harga, terutama pada komoditas di kelompok inti. Di sisi lain, ketidakpastian kondisi perekonomian global ke depan masih cukup tinggi, disertai dengan disrupsi rantai pasok, krisis energi, dan bahan pangan.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih optimal dengan pencapaian sasaran inflasi di tengah instabilitas global dan meningkatnya risiko inflasi akibat tekanan eksternal, maka diperlukan upaya penguatan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak.

Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dirangkum untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi:

1. Mengakselerasi pengembangan kebijakan hilirisasi pangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, memperkuat permintaan domestik, meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan hilirisasi pangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya meningkatkan nilai tambah dan produktifitas dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian khususnya melalui peningkatan pertumbuhan di sektor investasi dan industri pengolahan. Hilirisasi pangan ditujukan pada komoditas utama pertanian seperti beras, aneka cabai, dan bawang, serta

perkebunan seperti kopi, lada, dan kakao. Kebijakan penguatan strategi difokuskan pada tiga aspek yaitu perbaikan faktor produksi, penguatan aspek pengaturan dan kelembagaan, dan penguatan aspek kerjasama perdagangan dan promosi. Khusus kebijakan hilirisasi pangan pada komoditas padi diarahkan pada pentingnya industri penggilingan padi dalam menghasilkan beras sebagai output utama dan berbagai produk turunannya.

2. Memperkuat peran belanja APBN dan APBD sebagai stimulus kinerja perekonomian dan pengendalian inflasi daerah

melalui peningkatan efektivitas dan perluasan *multiplier effect* dari program pengembangan ekonomi dan pengendalian harga Pemerintah Daerah, serta optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);

3. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- Pelaksanaan TPID - GNPIP yang bertujuan untuk mengoptimalkan dan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar mampu mendukung ketahanan pangan dan daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian Lampung. Implementasi GNPIP diperkuat dengan mengacu program peta jalan pengendalian inflasi dan strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
- Kegiatan FOILA untuk mempercepat realisasi investasi. Pemerintah Daerah perlu menggali potensi dan menyusun proyek investasi daerah agar dapat dipromosikan dengan cara menyusun Investment Project Ready to Offer (I-PRO). Selain itu perlu juga didorong program kemitraan antara perusahaan besar dengan pengusaha lokal UMKM untuk meningkatkan pencapaian realisasi investasi.
- Kebijakan akselerasi digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas. Kebijakan digitalisasi diharapkan meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan transaksi pembayaran yang cepat, efisien dan aman, serta peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan daerah.
- Peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Lampung melalui optimalisasi potensi desa wisata dan pengembangan *quality tourism* yang lebih mengembangkan aspek lingkungan, budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Administered prices

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

Andil Inflasi

Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bobot Inflasi

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

CAR

Capital Adequacy Ratio. Merupakan ratio yang menunjukkan ukuran perbandingan antara modal yang dimiliki suatu bank dengan tingkat risiko yang terjadi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

DPK

Dana Pihak Ketiga. Yaitu dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.

IEK

Indeks Ekspektasi Konsumen. Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.

IHK

Indeks Harga Konsumen. Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

IKE

Indeks Kondisi Ekonomi. Salah satu pembentukan IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.

IKK

Indeks Keyakinan Konsumen. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.

Investasi

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

IPM

Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran Kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.

LDR

Loan to Deposit Ratio. Merupakan ratio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.

Migas

Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.

MTM

Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

NPL

Non Performing Loan. Merupakan klasifikasi yang menunjukkan tingkat kesehatan terhadap pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat.

Omzet

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

RHS

Right Hand Scale (axis kanan).

PAD

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

QTQ

Quarter to quarter. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya

Sektor Ekonomi Dominan

Sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Share Effect

Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB.

Share of Growth

Kontribusi pertumbuhan suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.

Volatile Food

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor musiman.

YOY

Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Sultan Hasanuddin No.38,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Telp. (0721) 496355 / Fax. (0721) 481131
www.bi.go.id

